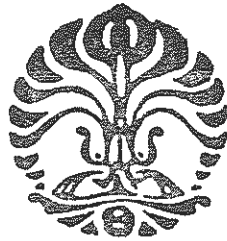


Politik - Jepang -

*R.
320.52.
Pur.
j.*



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SKRIPSI
JEPANG DALAM PERCaturan POLITIK DI ASIA TIMUR 1970-1980
**(PENGARUH EKONOMI JEPANG TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI
NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR)**

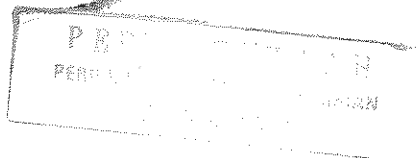
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Oleh :

HARI PURWANTO

098002073.5

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
Jakarta, Oktober 1989





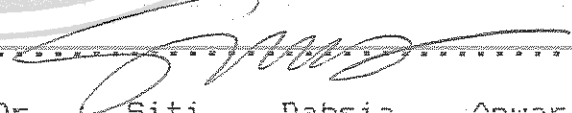
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hari Purwanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 09 80 02 073.5
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Politik/ Hubungan Internasional
Judul Skripsi : JEPANG DALAM PERCATURAN POLITIK DI ASIA
TIMUR 1970-1980 (PENGARUH EKONOMI JEPANG
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA-
NEGARA ASIA TIMUR)

PANITIA PENGAWAS SKRIPSI

BHAKTI - DHARMA

Ketua Jurusan Ilmu Politik : 
(Dr. Amir Santoso)
Pembimbing Pertama 15.1.90 : 
(Drs. Zulfikar Ghazali)
Pembimbing Kedua 15.1.90 : 
(Dr. Siti Dahsia Anwar)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada hambanya yang dhoif ini, sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tanpa karunia dan nikmatNya itu rasanya tidak mungkin bagi kami untuk menyelesaikan studi ini.

Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kedua orang pembimbing kami. Bapak Drs. Zulfikar Ghazali yang telah membantu dalam banyak masalah agar terselesaikan studi kami ini. Suatu bantuan yang tidak kecil artinya bagi kami. Juga kepada Ibu Dr. Siti Dahsia Anwar yang tidak jemu-jemunya memacu kami agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan studi ini. Betapa besar bantuan mereka berdua ini dalam penyelesaian studi kami.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Amir Santoso sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik yang telah mengingatkan tugas utama kami yaitu menyelesaikan studi. Demikian pula dengan Bapak Drs. Dwi Susanto MA atas kerelaan mengingatkan hal tersebut kami ucapkan banyak terima kasih.

Juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hero U. Kuntjorojakti atas saran dan pandangan-pandangan yang telah diberikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Suatu pengorbanan yang tidak kecil artinya bagi kami. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran-saran bagi terselesaikannya skripsi ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Khususnya kepada saudara Syahmunir Arifin yang telah

memberikan fasilitas bagi terselesaikannya studi ini.

Jakarta, Oktober 1989

Hari Purwanto



ABSTRAK

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK

Hari Purwanto, 098002073.5

JEPANG DALAM PERCATURAN POLITIK DI ASIA TIMUR 1970-1980
(PENGARUH EKONOMI JEPANG BAGI PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA-NEGARA
ASIA TIMUR).

vi + 80 hal. + 10 tabel + 2 gambar + lamp. + bibl. 55 (1948 -
1987)

Skripsi ini membahas peranan Jepang secara ekonomi bagi negara-negara Asia Timur. Peranan tersebut mempunyai implikasi politik bagi negara-negara yang berkonflik di kawasan ini.

Kemampuan Jepang dalam menjembatani kebutuhan akan bahan baku, perluasan pasar dan tarikan dari negara-negara yang berkonflik menempatkan Jepang dengan peran baru sesuai dengan kemampuan ekonominya tersebut. Kemampuan itu tidak bisa dilepaskan dari peranan AS pada awal pendudukan atas Jepang, sehingga di antara kedua negara ada ikatan khusus dalam menangani sejumlah masalah di Asia Timur, baik ekonomi maupun politik.

Peran AS yang besar terhadap Jepang terlihat dengan kepatuhan Jepang mengikuti kebijakan AS dalam bidang politik sampai akhirnya Jepang menyadari bahwa dirinya dapat melepaskan diri dari pengaruh AS dan mengambil peranan mandiri di Asia Timur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
KERANGKA TEORI	12
HIPOTESA	20
METODE PENELITIAN	22
PEMBABAKAN	22
BAB II: PERUBAHAN KEMAMPUAN EKONOMI JEPANG 1950 - 1970	24
PERKEMBANGAN DAN PILIHAN POLITIK PADA MASA SURVIVAL 1945 - 1951	24
KEBANGKITAN KEMBALI EKONOMI JEPANG (1952 - 1960)	38
DASAWARSA PERTUMBUHAN EKONOMI TERTINGGI (1961-1970)	43
BAB III: PERANAN JEPANG DI ASIA TIMUR DALAM DEKADE 1970-AN	47
TEKANAN INTERNASIONAL TERHADAP JEPANG	47
MENENANGKAN KECEMASAN POLITIK INTERNAL	64
BAB IV: KESIMPULAN	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL I	: Distribusi Pekerja antar Sektor	29
TABEL II	: Net Domestic Product Sesuai Sektor Usaha Menurut Harga Yang Berlaku Pada Saat Itu	30
TABEL III	: Net Domestic Product Sesuai Sektor Usaha Menurut Harga Yang Berlaku Tetap	32
TABEL IV	: Bantuan AS Terhadap Jepang Setelah PD II	36
TABEL V	: GNP Jepang 1960-1970	43
TABEL VI	: Ekspor-Import Jepang-AS dan Jepang-Korea Selatan	49
TABEL VII	: Ekspor-Import Jepang-Taiwan dan Jepang-RRC	51
TABEL VIII	: Gross National Expenditure Jepang 1974-1980	56
TABEL IX	: Anggaran Pertahanan Jepang 1970-1980	61
TABEL X	: Tingkat Pertumbuhan Ekspor-Import Jepang Dengan Beberapa Negara Di Asia Timur 1974-1980	69
GAMBAR I	: Pola Hubungan Negara-Negara Di Asia Timur	21
GAMBAR II	: Bentuk Koalisi Empat Kekuatan Besar Di Asia Timur	22

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : The Postdam Proclamation
- Lampiran II : The Constitution of Japan
- Lampiran III : Treaty of Peace with Japan
- Lampiran IV : Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States of America and Japan (1960)
- Lampiran V : Gross National Product: Current Prices 1905-1970
- Lampiran VI : Gross National Product: Constant Prices 1905-1940, 1953-1965
- Lampiran VII : Gross National Expenditure: Current Prices, 1905-1970
- Lampiran VIII : Gross National Expenditure: Constant Prices, 1905-1970
- Lampiran IX : Foreign Trade, 1905-1970
- Lampiran X : Jumlah penduduk dan jenis lapangan kerja
- Lampiran XI : Perdagangan luar negeri Jepang dengan negara-negara di dunia, 1974-1980

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penampilan Jepang di Asia Timur menonjol setelah menang perang dengan Rusia pada tahun 1904-1905. Penampilan berikut yang juga menonjol adalah keterlibatan dalam PD II dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan Pasifik, seperti Inggris, Belanda, Cina dan Amerika Serikat (AS). Kedua penampilan ini menunjukkan keterlibatan Jepang dalam dunia internasional telah dimulai pada awal abad 20.

Akan tetapi dengan kekalahan dalam PD II, peranan Jepang mulai merosot. Jepang tidak dapat melakukan kebijakan luar negeri secara bebas, karena statusnya sebagai negara jajahan. Status ini berubah dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian (8 September 1951) di San Francisco antara Jepang dengan sebagian besar negara-negara di dunia. Perjanjian tersebut menjadikan Jepang kembali sebagai negara merdeka.

Realisasi dari perjanjian perdamaian San Francisco mendorong Jepang mengadakan perundingan-perundingan bilateral untuk membuka hubungan diplomatik dan mengakhiri keadaan peperangan dengan negara lain. Pada tanggal 28 April 1952 ditandatangani perjanjian perdamaian dengan Taiwan. Pada tanggal 19 Oktober 1956 diadakan persetujuan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet (US). Sedangkan hubungan diplomatik dengan Korea

Selatan dilakukan pada tahun 1965. Dan dengan Republik Rakyat Cina (RRC) hubungan diplomatik baru dibuka pada tanggal 29 September 1972.¹

Pada tanggal 8 September 1951 itu juga, Jepang dan AS menandatangani Perjanjian Keamanan (Security Treaty). AS memberikan perlindungan keamanan bagi teritorial Jepang. Perjanjian AS-Jepang ini mengikat Jepang ke dalam persekutuan dengan Barat, dalam hal ini AS, meskipun dalam perjanjian keamanan itu ada ketidakseimbangan beban yang harus ditanggung bila terjadi suatu agresi militer di negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Jepang tidak akan membantu AS bila AS diserang negara lain, tapi AS akan mempertahankan Jepang bila Jepang diserang negara lain.

Sementara itu dengan adanya rangkaian perjanjian baik dengan AS maupun beberapa negara di Asia Timur, Jepang mulai mengatasi persoalan-persoalan ekonomi internalnya melalui apa yang dinamakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.² Keberhasilan pembangunan ekonomi ini memberikan pilihan-pilihan yang luas bagi suatu kerja sama luar negeri yang lebih menguntungkan Jepang.

Kerja sama yang dilakukan Jepang pada dekade 1950'an, masih berorientasi pada kerja sama ekonomi. Hal ini didorong oleh

¹ Kedutaan Besar Jepang Jakarta, *Jepang Sebuah Pedoman Saku* (Jakarta: Kedutaan Besar Jepang, 1985), h. 39-40.

² *Japan in World Economy, Japan Foreign Economic Policy for the 1970's, Report of the Industrial Structure Council*, (Tokyo: MITI and Press International Ltd., 1972), h. 10.

keinginan mencapai strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu pokok penting dari strategi tersebut adalah meningkatkan ekspor Jepang ke luar negeri.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlihat dalam perkembangan Jepang pada dekade 1960-an. Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata melebihi 10% setiap tahun dalam dekade ini.³ Hal ini mulai mengubah penampilan Jepang. Peranan luar negeri Jepang semakin meningkat dari dorongan keberhasilan ekonomi itu. Akan tetapi pencapaian dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi melibatkan perkembangan ekonomi negara lain. Membanjirnya produk-produk Jepang ke negara-negara lain akan dapat mematikan produk sejenis dari negara bersangkutan. Untuk itu konsentrasi yang hanya diletakkan pada masalah ekonomi perlu dirubah, Jepang tidak dapat hanya melihat pada strategi internal saja, tetapi perlu juga melihat kepentingan negara-negara lain.

Pada dekade 1970'an pertumbuhan ekonomi Jepang tidaklah setinggi pada dekade sebelumnya. Ada penurunan kecil pada dekade ini, tetapi tetap mengalami kenaikan dari segi besarnya nilai ekspor ke luar negeri. Sedangkan dari segi ragam produk, ekspor Jepang ini semakin luas. Barang yang harus diimpor pada dekade 1960'an berubah, dengan Jepang mulai mengekspor produk tersebut dalam dekade 1970 an. Misalnya komputer beserta perangkat pendukungnya.

Dalam dekade 1970'an peranan ekonomi Jepang bukan hanya

³ Kazushi Ohkawa & Henry Rosovsky, *Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century*, (California: Stanford University Press, 1973), h. 279.

seluas Asia Timur, tapi sudah berskala dunia. Di kawasan klasik pengaruhnya --Asia Timur dan Asia Tenggara-- kedudukan Jepang tidak dapat di geser oleh negara-negara industri barat yang lain. Tetapi tekanan-tekanan internasional telah memaksa Jepang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Tekanan tersebut berupa melonjaknya harga minyak dan mulai tumbuhnya kawasan Asia Timur sebagai kekuatan ekonomi dunia. Misal dengan munculnya Korea Selatan dan Taiwan sebagai negara-negara industri baru (NICs = New Industrializing Countries). Negara-negara ini merupakan pesaing baru bagi dominasi Jepang atas sejumlah produk klasik seperti tekstil, barang-barang mainan, otomotif dan sejumlah produk lain yang menggunakan teknologi madya.⁴

Munculnya Korea Selatan dan Taiwan sebagai pesaing baru telah menambah ketegangan tambahan di kawasan Asia Timur. Kedua negara tersebut dalam membangun ekonomi menggunakan strategi industri orientasi ekspor.⁵ Strategi itu dengan menyediakan satu lokasi khusus bagi beroperasinya industri-industri yang ditujukan untuk ekspor, dengan cara mengundang pemodal asing untuk menanamkan modalnya. Strategi ini jika dilihat dari segi teknologi tidak jauh berbeda dengan negara asal penanam modal.⁶ Sedangkan komponen biaya buruh dan bahan-bahan yang diperlukan --terutama

⁴Japan external Trade Organization; *White Paper on International Trade, Japan 1982*, (Tokyo : JETRO, 1982), h. 14.

⁵Terutomo Ozawa, *Multinationalism, Japanese Style: The Political Economy of Outward Dependency* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979), h. 78.

⁶Saburo Okita, *Japan in the World Economy*, (Tokyo: The Japan Foundation, 1975), h. 78.

dari lingkungan domestik-- jauh lebih murah.⁷ Dengan demikian produk-produk yang dibuat di kedua negara ini mempunyai keuntungan komparatif lebih tinggi dari produk sejenis yang dihasilkan dari Jepang. Kuatnya daya saing sejumlah produk Taiwan dan Korea Selatan terhadap produk-produk Jepang telah menimbulkan persaingan dalam merebut pasar yang ada di Asia Timur, maupun di luar itu.

Industri-industri yang masih padat tenaga kerja akan dimenangkan Korea Selatan dan Taiwan, karena ongkos buruhnya lebih murah dibandingkan dengan Jepang.⁸ Terjadi arus produk dari Korea Selatan dan Taiwan ke Jepang, sedangkan produk Jepang kurang dapat menembus pasaran kedua negara ini. Produk-produk Jepang yang bisa masuk kedua negara tersebut hanyalah produk-produk yang menggunakan teknologi lebih tinggi dari yang ada di kedua negara itu.

Persaingan ekonomi merupakan permasalahan menonjol antara Korea Selatan dan Taiwan dengan Jepang. Masing-masing negara menggunakan strategi yang sama dalam meningkatkan kemakmuran negaranya, yaitu memperluas perdagangan internasional.

Dalam masalah-masalah ekonomi, kebijakan Jepang di kawasan tersebut merupakan duplikat kebijakan AS di Asia Timur.⁹ Hal ini terlihat dalam kasus boikot untuk tidak melakukan perdagangan dengan RRC, karena negara itu dianggap mensponsori

⁷ Terutomo Ozawa, *Op. cit.*, h. 80.

⁸ Jetro, *Op. cit.*, h. 15.

⁹ Gerald R. Ford, "The U.S. - Japanese Alliance : The Last 20 Years, The Next 20 Years", *Asian Survey*, vol. 4, no. 2, Fall - Winter 1980, h. 250-252.

terjadinya Perang Korea di tahun 1950.¹⁰

Jepang begitu patuh untuk mengikuti kebijakan AS di Asia Timur. Kepatuhan ini terluka ketika Presiden Nixon mengumumkan rencana kunjungan kenegaraan ke RRC tanpa berkonsultasi dahulu dengan Jepang pada pertengahan tahun 1971.¹¹ Pada tahun yang sama Presiden Nixon mendevaluasi dolar AS dan melepaskan ikatan dolar AS dari emas. Kedua tindakan ini membuat Jepang mengalami pukulan berat, *Pertama*, selama ini Jepang sangat loyal pada kebijakan yang diterapkan AS atas masalah Cina, sehingga dengan tidak diberitahukannya lebih dahulu keinginan AS untuk menormalisasi hubungan AS - RRC, berarti AS telah meninggalkan Jepang sebagai sekutu utama di Asia Timur.¹² *Kedua*, kebijakan AS mendevaluasi mata uangnya dan pelepasan ikatan mata uangnya dengan emas, akan dapat menguatkan nilai mata uang Yen,¹³ yang berarti dapat mengurangi keuntungan komparatif Jepang terhadap negara-negara lain.

Kedua hal ini mendorong PM Jepang Kakuei Tanaka mengadakan kunjungan kenegaraan ke Beijing untuk menormalisasikan hubungan Jepang-RRC pada bulan September 1972. Pada akhir kunjungan tersebut dikeluarkan komunike bersama bagi pengakuan

¹⁰ Donald. F. Lach and Edmund S. Wehrle, *International Politics in East Asia since World War II*, (New York: Praeger Publisher, 1975), h. 261.

¹¹ *Ibid.*, h. 285.

¹² John K. Emerson, "After Thirty Years : Japan and America", *Pacific Community, An Asian Quarterly Review*, vol. 6, no. 4, July, 1975, h. 479.

¹³ Koji Taira, "Power and Trade in U.S. - Japanese Relations", *Asian Survey*, vol. XII, no. 11, Nov. 1972, h. 980-998.

eksistensi kedua negara.¹⁴ Suatu era baru mulai dijalani Jepang dalam kaitan sebagai kekuatan ekonomi di Asia Timur.

Tekanan-tekanan eksternal dari AS ini menyebabkan Jepang memulai usaha-usaha untuk melepaskan ketergantungannya dari AS. Jepang mulai menantang AS dalam bidang ekonomi dan industri, sehingga Jepang harus meningkatkan kemampuannya agar tidak tergantung pada AS.

Setelah melalui proses perundingan yang berliku-liku, kepulauan Okinawa dikembalikan pada Jepang pada tahun 1972. Hal itu merupakan keberhasilan Jepang dalam menekan AS. Dengan demikian kepentingan AS atas pangkalan militernya di kepulauan tersebut secara bertahap dikurangi peranannya.

Bangkitnya kesadaran akan kemampuan yang besar dan keberadaannya dalam suatu kawasan yang pertumbuhan ekonominya tinggi di dunia, membuat Jepang berhati-hati dalam mendesak kepentingan-kepentingannya di kawasan Asia Timur. Jepang tidak dapat bertindak seperti dalam PD I atau PD II dengan melakukan agresi militer ke kawasan klasik pengaruhnya, tapi harus memodifikasi penerapan peran atas kemampuannya yang besar itu dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Jika tidak Jepang akan terjebak dalam tekanan internasional yang akan menyulitkan dirinya.

Keberhasilan Jepang dalam dekade 1960-an dan 1970-an tidak bisa dilepaskan dari peran AS pada masa-masa sulit antara

¹⁴ Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan, 1973-1974. Annual abstract of official reports and statistics of the Japanese Government*, h. 53-55.

tahun 1945-1949. AS melalui Jendral Mac Arthur membantu Jepang untuk melepaskan diri dari masalah kekacauan politik dan ekonomi akibat PD II. Bantuan keuangan dan bahan-bahan baku yang disertai dengan perubahan kebijakan AS dalam menangani Jepang, merupakan faktor penting dalam kemajuan ekonomi Jepang.¹⁵ Hal ini merupakan bahan dasar bagi Jepang untuk membangun negaranya dari kehancuran setelah PD II. Ditambah dengan faktor internal yang melekat pada Jepang, seperti budaya yang menekankan etos kerja keras. Tanpa dukungan masalah budaya yang sesuai dengan pembangunan ekonomi, maka bahan eksternal yang berupa dukungan negara asing saja tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan.¹⁶

Pada pertengahan tahun 1950 terjadi perang Korea yang melibatkan AS. Peperangan ini memberikan keuntungan bagi perkembangan ekonomi Jepang. Terjadi peningkatan permintaan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan perang tersebut. Keberuntungan ini dikenal dengan sebutan *Jimmu Boom*.¹⁷ Hikmah perang Korea mempersingkat pencapaian strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jepang sudah dapat memulihkan dirinya dari akibat PD II pada tahun 1956.¹⁸

¹⁵ Donald F. Lach, *Op. cit.*, h. 146-147.

¹⁶ Taketsugu Tsurutani, *The Politics of National Development: Political Leadership in Transitional Societies*, (New York: Chandler Publishing Company, 1973), h. 6.

¹⁷ Jimmu adalah nama kaisar pada masa sejarah Jepang kuno yang dianggap berhasil memakmurkan rakyatnya. Kenzo Uchida, "Japanese Politics in the 1980's", Rei Shiratori (ed.), *Japan in the 1980's. Papers from symposium on contemporary Japan*, (Tokyo: Kodansha International Ltd., 1982), h.52.

¹⁸ Saburo Okita, *Op. cit.*, h. 25.

Kejadian-kejadian internasional yang menguntungkan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan ekspor yang ada. Hal ini akan dapat meningkatkan bobot kekuatan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer.¹⁹

Sementara itu di Asia Timur ada masalah konflik intens antara Korea Selatan dengan Korea Utara, antara Taiwan dengan RRC dan antara RRC dengan US. Jepang hampir tidak mempunyai konflik intens dengan negara-negara di kawasan ini, kecuali dengan US dalam masalah pemilikan 4 pulau di kepulauan Kurile. Keempat pulau itu di klaim sebagai milik Jepang tapi diduduki US.

Konflik-konflik yang melibatkan Taiwan dan Korea Selatan dengan negara-negara Komunis (RRC, US dan Korea Utara) akan melibatkan Jepang. Hal ini disebabkan Jepang mempunyai kepentingan ekonomi yang besar di Taiwan dan Korea Selatan. Jepang mengambil jalan agar konflik yang intens tersebut tidak menjadi konflik fisik dengan jalan menempuh kebijakan menjaga jarak yang sama dengan negara-negara yang berkonflik (equidistance).²⁰ Kebijakan mengambil jarak yang sama dengan negara-negara yang berkonflik itu akan berubah bila terjadi konflik fisik dengan menggunakan kekuatan militer dalam skala penuh.

AS yang mulai merosot peranannya di kawasan Pasifik diimbangi dengan meningkatnya kekuatan US. Hal ini mendorong

¹⁹ Taketsugu Tsurutani, *Political Change in Japan: Response to Post Industrial Challenge*, (New York: David Mac Kay Company, 1977), h. 17-22.

²⁰ Joseph M. Ha and John Guinasso, "Japan's Rearmament Dilemma: The Paradox of Recovery", *Pacific Affairs*, vol 53, no. 2., 1980, h. 252.

Jepang untuk memikirkan kembali kebijakan militernya, yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk *menangkal serangan* dari negara lain. Perubahan ini terlihat dengan keikutsertaan Angkatan Bela Dirinya (Japan Self Defence Forces = JSDF) dalam latihan militer bersama.²¹ Latihan militer bersama ini dapat dianggap melanggar pasal 9 konstitusi Jepang yang melarang penggunaan kekuatan militer domestik di luar negaranya, meskipun penggunaan itu untuk maksud-maksud damai.²²

Tindakan pengamanan yang dilakukan Jepang memberi pengaruh besar bagi negara-negara yang termasuk dalam pengamanan tersebut. Hal ini menyangkut masalah kedaulatan nasional dari negara bersangkutan.

Perubahan peran yang semakin luas bagi JSDF ini kurang mendapat reaksi di dalam negeri. Hal ini akan berbeda bila dilakukan pada dekade 1950'an atau 1960'an. Pada masa tersebut masalah perluasan peran militer akan merupakan pokok bahasan yang penting baik di dalam parlemen (Diet) atau di media massa. Sedangkan dalam dekade 70-an tercatat ketidaktahuan untuk

²¹ Latihan bersama antara 8 kapal perang Inggris dengan Maritime Self Defence Forces (MSDF), salah satu unsur dari JSDF di teluk Tokyo dan lepas pantai pulau Oshima pada bulan September 1980. William T. Tow, "U.S. Alliance Policies and Asian-Pacific Security : A Trans Regional Approach", William T. Tow and William R Feeney (eds.), *U.S. Foreign Policy and Asian-Pacific Security: A Transregional Approach* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), h. 43.

²² Osamu Kaihara, "Japan Defence Structure and Capability", *Pacific Community : A Quarterly Review*, Spring, No. 12, 1981, h. 56-61.

mempersoalkan masalah militer ini secara terbuka.²³

Kekuatan Jepang minus militer karena ketidaksebandingan antara kemampuan Jepang dalam bidang ekonomi dengan jumlah pengeluaran di bidang militer. Pengeluaran Jepang dalam bidang militer hanya kurang sedikit dari 1% GNP.²⁴ Sedangkan bagi negara maju lainnya berkisar antara 4% - 6% GNP.²⁵ Jika dilihat dari sudut pengeluaran, militer Jepang tetap tidak dapat disejajarkan dengan kekuatan militer negara-negara maju lainnya.

Dengan anggaran setinggi 1% GNP, Jepang hanya mampu membeli peralatan militer konvensional, atau kalau dipaksakan untuk memiliki yang strategis berarti akan sangat mengurangi peralatan konvensional.

Untuk memiliki kekuatan strategis, misalnya senjata nuklir, Jepang tidak mengalami kesukaran dari segi pembiayaan dan pemilikan teknologi.²⁶ Akan tetapi Jepang pernah mengalami akibat bom atom. Hal ini menjadikan Jepang mempunyai hambatan kejiwaan bagi pemilikan tersebut. Apalagi hal itu diperjelas dengan

²³ Frank Langdon, "The security Debate in Japan", *Pacific Affairs*, vol. 58, no. 3, Fall, 1985, h. 397-398.

²⁴ Yukio Satoh, "The Evolution of Japanese Security Policy", *Adelphi Papers* no. 173, (London: The International Institute for Strategic Studies, 1982), h. 43.

²⁵ Stockholm International Peace Research Institute, *World Armaments and Disarmaments*, SIPRI Yearbook 1982 (London: Taylor and Francis Ltd., 1982), pp. 150-151. SIPRI Yearbook 1975, (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1975), pp. 122-123, 126-127, 132-133, Robert W. Degrasse Jr. *Military Expansion and Economic Decline: The Impact of Military Spending on U.S. Economic Performance*, (Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1983), h. 61.

²⁶ Hisao Iwashima, "Recent Defense Debates in Japan", Rei Shiratori (ed.), *Op. cit.*, h. 101. Yukio Satoh, *Op. cit.*, h. 16.

konsepsi Jepang untuk menolak pemilikan senjata atom yang terkenal dengan nama 3P. Jepang tidak mau memiliki (non possession), tidak mau menghasilkan (non production) dan tidak mau menyebarkan (non proliferation).²⁷ Dalam rangka konsep tersebut, teknologi atom dapat diterima sepanjang untuk maksud-maksud damai, seperti pemanfaatan untuk tenaga listrik, dan radiasi bagi produk-produk makanan yang sudah dikemas agar bebas dari hama.²⁸

Yang menjadi masalah adalah kenapa Jepang dengan kemampuan ekonomi besar dan berada dalam lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dirinya, tetap dapat memprioritaskan masalah ekonomi sebagai hal yang paling utama ?

KERANGKA TEORI

Pada permulaan setelah PD II politik luar negeri Jepang bersifat *Low Profile*.²⁹ Jepang menghindari konflik luar negeri dengan negara lain, dan lebih menekankan masalah ekonomi dari masalah politik. Sikap seperti ini membuat Jepang tidak ubahnya

²⁷ The Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan 1976-1977. Annual abstract of official report and statistics of the Japanese Government*, h. 23.

²⁸ P.N. Nemetz, I. Vertinsky and P. Vertinsky, "Japan's Energy Strategy at the Crossroad", *Pacific Affairs*, vol. 53, no. 4, Winter 1984-1985, h. 556.

²⁹ Hans H. Baerwald, "The Diet and Foreign Policy", Robert A. Scalapino (ed.), *The Foreign Policy of Modern Japan*, (Berkeley: University of California Press, 1977), h. 37.

seperti *negara dagang*.³⁰ Strategi ini memang menguntungkan, karena Jepang dapat melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang sedang berkonflik, seperti kerja sama Jepang dengan Taiwan tanpa mengorbankan kepentingannya dengan RRC,³¹ atau kerja sama dengan Korea Selatan tanpa mengorbankan kepentingannya dengan Korea Utara.³²

Dalam menjelaskan tingkah laku politik Jepang tersebut, perlu dikemukakan suatu kerangka teori tertentu. Teori tersebut akan dapat menjelaskan lebih jauh tingkah laku Jepang dalam hubungannya dengan AS maupun hubungannya dengan negara-negara di Asia Timur.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kemajuan ekonomi Jepang di dorong oleh suatu aliansi antara negara tersebut dengan AS. Negara adi daya itu memberikan suplai bahan baku bagi keperluan industri maupun bahan makanan bagi kebutuhan

³⁰ John Hohenberg, *New Era in the Pacific : An Adventure Public Diplomacy*, (New York : Simon and Schuster, 1972), h. 64-65. Alexander K. Young, *The Sogo Goshu: Japan Multinational Trading Company*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1979), h. 3-4.

³¹ Harrison M. Holland, "The U.S. - Japan Alliance. A Post Vietnam Assessment", *Pacific Community : An Asian Quarterly Review*, vol. 7, no. 2, January 1976, h. 208.

³² Hong N. Kim, "Japanese - Korean Relations in the 1980's", *Asian survey*, vol XXVII, no. 5, May 1987, h. 510-513.

masyarakat.³³ Disamping itu AS juga memberikan bantuan keuangan³⁴ dan membuka kesempatan yang luas bagi pemasaran produk-produk Jepang di AS. Hal penting lainnya adalah jaminan keamanan AS bagi jalur suplai barang-barang dari dan ke Jepang dan komitmen AS untuk mempertahankan Jepang dari serangan RRC atau Uni Sovyet, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dalam aliansi Jepang-AS, Jepang dapat mengamankan kepentingan indigenusnya, yaitu kepentingan akan perbaikan ekonomi nasional, sedangkan AS menjadikan Jepang sebagai benteng terdepan dalam membendung perluasan komunisme di Asia Timur dengan menopang pembangunan ekonomi Jepang sesuai model pembangunan liberal-kapitalistis.

Uraian selanjutnya difokuskan pada pengertian dan penjabaran teori yang dipergunakan yaitu teori tentang aliansi. Aliansi adalah: "... instruments of national security". ("...instrumen dari keamanan nasional".)³⁵ yang "...involve greater planned cooperation Actors bargain with one another, coordinate strategies, and seek agreement on objectives. Often alliances are formalized through treaties specifying the intended

³³ Martin E. Weinstein, "Strategic Thought and The U.S.-Japan Alliance", James William Morley (ed.), *Forecast for Japan Security in the 1970's*, (New Jersey: Princeton University Press, 1972), h. 35-36.

³⁴ Donald F. Lach and Edmund S. Wehrle, *International Politics in East Asia since World War II*, (New York: Praeger Publisher, 1975), h. 122.

³⁵ David L. Sills, (ed.), *International Encyclopedia of The Social Sciences*, vol. 1, (New York: The Macmillan Company & The Free Press, London: Collier Macmillan Publisher, 1980), h. 269.

collective behavior and the obligations of the participants. ("...melibatkan kerja sama perencanaan yang lebih besar ... Para aktor melakukan tawar-menawar satu sama lain, mengkoordinasi strategi-strategi tertentu, dan mencari persetujuan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sering aliansi diformalkan melalui perjanjian-perjanjian yang khusus dimaksudkan pada tingkah laku bersama dan kewajiban bagi para peserta.)³⁶

Dalam suatu aliansi ada sejumlah masalah tentang hal itu. Misalnya tentang jumlah aktor yang terlibat, dua atau lebih. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kohesifitas peserta aliansi, karena semakin banyak aktor yang terlibat, permasalahan aliansi akan semakin kompleks. Meskipun tidak berarti aliansi oleh dua negara permasalahannya tidak kompleks.

Atas masalah apa aliansi dibentuk? Adakah ancaman bersama yang dapat merubah nilai-nilai yang dianut selama ini? Sehingga diperlukan suatu kerja sama untuk menanggulangi ancaman tersebut? Bentuk aliansi ini bisa dilihat pada organisasi NATO atau PAKTA WARSAWA, dimana masing-masing merasa ada ancaman dari luar.

Ada juga aliansi yang dibentuk tanpa melihat ada tidaknya tujuan bersama, tetapi mereka dipertemukan karena adanya kepentingan yang sama. Biasanya aliansi ini terdiri dari dua negara. Salah satu contoh adalah aliansi antara Mesir dengan US. Mesir melihat bahwa untuk mencapai tujuannya, membebaskan wilayah

³⁶ Raymond F. Hopkins & Richard W. Mansbach, *Structure and Process in International Politics* (New York, Evanston, San Francisco, London: Harper and Row Publisher, 1973), h. 305.

yang diduduki Israel dalam perang Oktober 1967, kekuatan US dapat dimanfaatkan untuk mencapai hal itu. Sedangkan bagi US dengan dibentuknya aliansi dengan Mesir, maka perluasan pengaruh US di Timur Tengah memperoleh jalan keluarnya, karena Mesir adalah negara di Timur Tengah yang cukup berpengaruh. Model aliansi seperti ini biasanya jarang bertahan lama, karena aliansi dibentuk atas tujuan yang berbeda, meskipun ada kepentingan jangka pendek yang sama.³⁷

Dalam suatu aliansi dimana aktor yang terlibat memiliki perbedaan kemampuan, maka aktor yang lebih kuatlah yang lebih banyak mendiktekan kemauannya pada aktor yang lebih lemah, sehingga kebijakan aliansi itu lebih banyak diwarnai oleh aktor yang lebih kuat. Pada kasus ini dapat dilihat aliansi ANZUS (Australia, New Zealand and United States), dimana pengaruh AS sangat menonjol dalam aliansi tersebut dibanding Australia atau New Zealand sendiri.

Simbol aliansi yang kuat adalah aliansi antara Inggris dengan AS, karena adanya kesamaan bahasa, kultural, kepentingan dan tujuan yang sama. Sehingga satu sama lain dalam menanggapi masalah-masalah internasional yang ada, dapat memahami sudut pandang masing-masing pihak.

Ada juga aliansi semu, dimana masalah militer tidak diungkapkan secara formal, tetapi mereka diikat oleh kepentingan ekonomi. Umumnya pola aliansi ini terdapat pada negara yang ber-

³⁷ *Ibid.*, h. 304-319.

ideologi sama. Kesamaan ideologi ini kadang mewarnai sikap masing-masing dalam menanggapi tekanan dari negara-negara yang berbeda secara ideologi. Bentuk aliansi seperti ini dapat dilihat dalam kerja sama Jepang dengan Taiwan dan Korea Selatan. Antara Jepang dengan kedua negara ini terjalin hubungan ekonomi yang erat, karena besarnya volume perdagangan timbal balik, atau investasi Jepang di kedua negara ini.

Suatu aliansi dilakukan lebih banyak di dorong oleh adanya keinginan untuk memaksimalkan keuntungan domestik yang tidak dapat dilakukan sendiri, maka dengan pembentukan aliansi itu apa yang dirasakan kurang dapat dipenuhi.

Jadi dalam persoalan aliansi ini apa yang dinamakan dengan musuh bersama belum tentu mendapat kesepakatan diantara para aktor. Tergantung aktor mana yang lebih dominan dalam menentukan siapa musuh bersama itu? Dan kemampuan aktor tersebut dalam mengambil resiko atas dibentuknya suatu aliansi. Misalnya resiko atas biaya yang harus ditanggung oleh aktor yang dominan. Disamping itu ada juga bentuk aliansi terselubung dimana persoalan militer dikesampingkan, sedangkan persoalan ekonomi lebih ditonjolkan tanpa menyebutkan secara jelas persoalan militer dalam aliansi tersebut.

Jepang dalam melakukan aliansi dengan negara lain tergantung kemampuan negara tersebut. Jepang tidak akan melakukan suatu aliansi militer secara formal, bila negara tersebut tidak dapat melindungi Jepang dari serangan negara lain. Jepang lebih menginginkan bentuk-bentuk aliansi terselubung, dimana persoalan

kerja sama ekonomi lebih banyak ditonjolkan dari pada persoalan keamanan.

Untuk lebih menjelaskan tentang tingkah laku Jepang bagi perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur, teori aliansi perlu ditambah dengan teori penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain. Sehingga dengan kedua teori tersebut peran ekonomi Jepang terlihat dalam perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur.

Sudah banyak diketahui bahwa instrumen ekonomi suatu negara dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah untuk masalah apa hal itu digunakan ? Bagaimana menggunakannya ? Pada tingkatan apa ? Juga efektifitas dari penggunaan tersebut.

Dasar dari penggunaan ekonomi ini adalah adanya hubungan ekonomi diantara dua negara. Bila hubungan tersebut tidak ada, maka ekonomi sebagai alat mempengaruhi lain menjadi tidak berarti. Adanya hubungan ekonomi baik dalam bidang perdagangan, bantuan luar negeri atau investasi dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain. Tergantung kemampuan masing-masing negara dalam melakukan hal itu.

Dalam hubungan ekonomi itu ada pola ketergantungan (dependence), dimana satu negara lebih dominan dibanding negara lainnya. Suatu misal, dalam perdagangan luar negeri, salah satu negara menggantungkan pasar luar negerinya hanya pada satu negara. Sedangkan negara itu dapat membeli produk yang sama dari negara lain.

Ada juga bentuk ketergantungan lain dalam hal kebutuhan akan bantuan ekonomi dan investasi dari negara lain. Bentuk ketergantungan ini banyak dialami oleh negara-negara yang menginginkan pembangunan ekonomi negaranya secara cepat.

Disamping itu ada hubungan ekonomi yang saling tergantung, dimana secara *relatif* ada interaksi ekonomi yang seimbang, baik dalam bidang perdagangan atau investasi secara timbal balik.

Pada pola ketergantungan, suatu penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan negara lain mempunyai peluang untuk berhasil, sedangkan pada saling ketergantungan, penggunaan instrumen ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan negara lain akan kurang efektif.³⁸

Pengertian pengaruh disini mengacu pada kemampuan suatu negara, misal A, untuk mengubah kebijakan negara lain, B, seperti yang diinginkan A, atau mengubah kebijakan B, meskipun perubahan itu tidak seperti yang diinginkan A. Minimal ada perubahan yang tidak merugikan kepentingan A.³⁹

Dengan kedua teori di atas, teori aliansi dan teori ekonomi sebagai alat mempengaruhi negara lain, dapat dipakai untuk menjelaskan pengaruh ekonomi Jepang bagi negara-negara di Asia Timur.

³⁸ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1977), cet. ke-3, h. 242-271.

³⁹ *Ibid.*, 164-168.

HIPOTESA

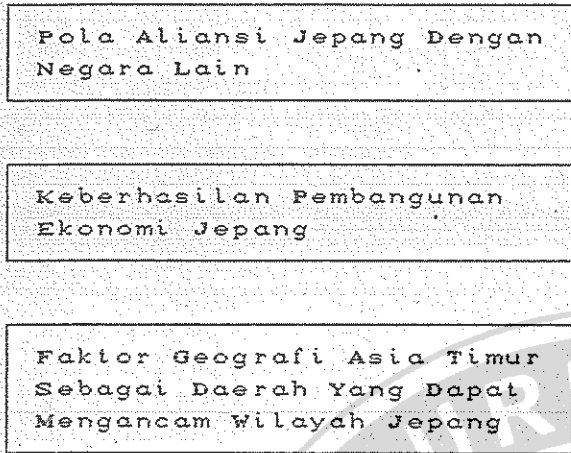
Jepang dalam melakukan hubungan dengan negara-negara di Asia Timur --Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, RRC dan US-- harus dilihat pada aliansi AS-Jepang, karena aliansi ini memberikan sejumlah batasan bagi ruang gerak hubungan Jepang dengan negara-negara Asia Timur, karena dengan aliansi itu Jepang harus mengikuti sejumlah kebijakan AS, terutama usaha AS untuk membendung komunisme.

Kerjasama ekonomi Jepang dengan negara-negara Asia Timur yang luas tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang sendiri, karena tanpa keberhasilan pembangunan itu, dorongan bagi perluasan kerjasama ekonomi dengan negara lain akan kurang berkembang.

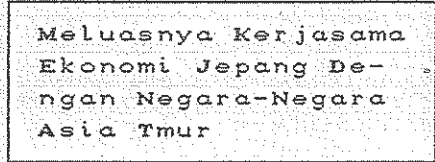
Keberhasilan pembangunan ekonomi itu lebih mendorong Jepang untuk menanamkan pengaruh yang lebih besar bagi kawasan Asia Timur, karena Asia Timur adalah kawasan yang melingkupi Jepang secara langsung. Setiap gejolak politik di Asia Timur akan mempengaruhi perkembangan keamanan Jepang sendiri.

Dengan ketiga hipotesa di atas, maka dapat dibuatkan satu bentuk gambar sebagai berikut:

Variabel Bebas

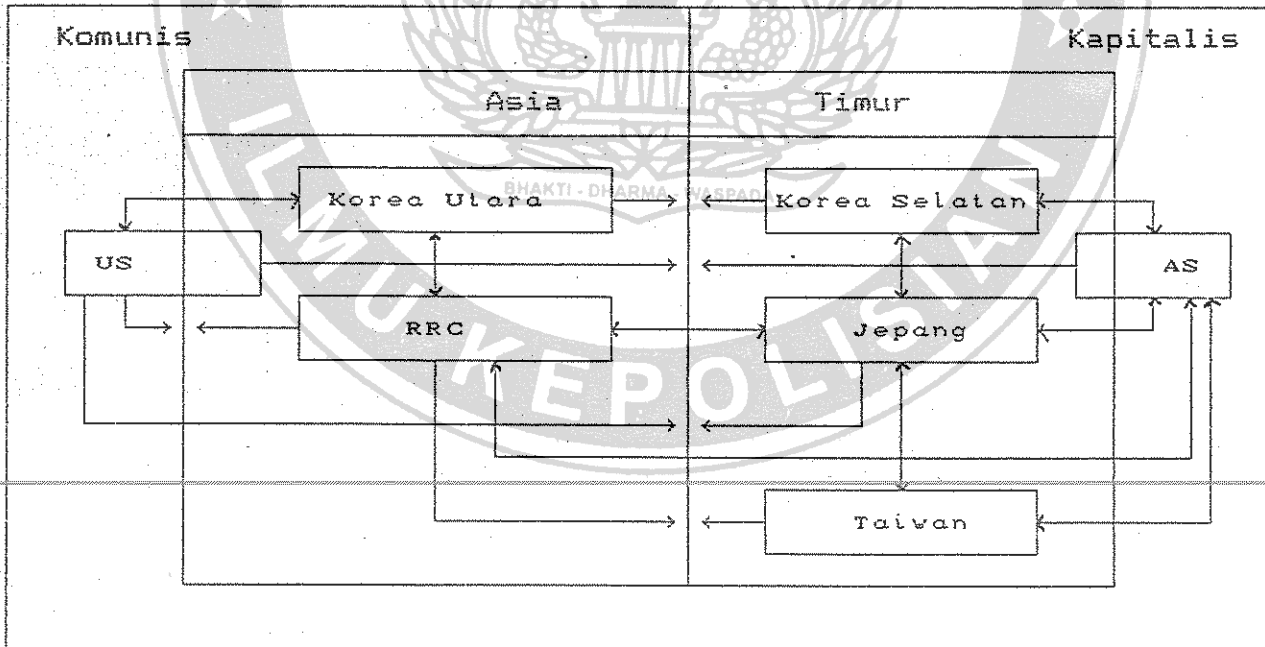


Variabel Terikat



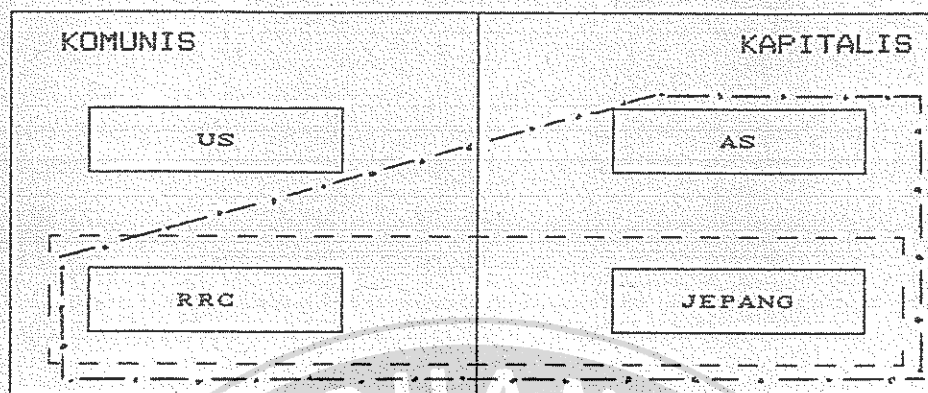
Sedangkan untuk menjelaskan pola hubungan negara-negara Asia Timur dan pola aliansi empat kekuatan besar di kawasan ini dapat dilihat dalam gambar di bawah.

Gambar I : Pola Hubungan Negara-Negara Di Asia Timur

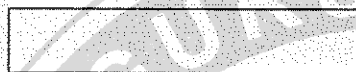


Keterangan : \longleftrightarrow : Hubungan bilateral relatif baik
 \longrightarrow : Terjadi konflik serius.

Gambar 2 : Bentuk Koalisi Empat Kekuatan Besar Di Asia Tmur



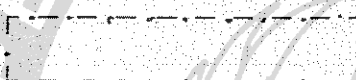
Keterangan :



: Ikatan Ideologi.



: Ikatan Kultural.



: Ikatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan di perpustakaan, berupa buku teks, dokumen-dokumen tertulis, laporan-laporan dan kliping dari surat kabar sebagai sumber pengkajian masalah. Uraian-uraian bersifat deskriptif analitis dimana pemaparan masalah dirangkaikan dalam deskripsi tertentu dan dianalisa.

PEMBABAKAN

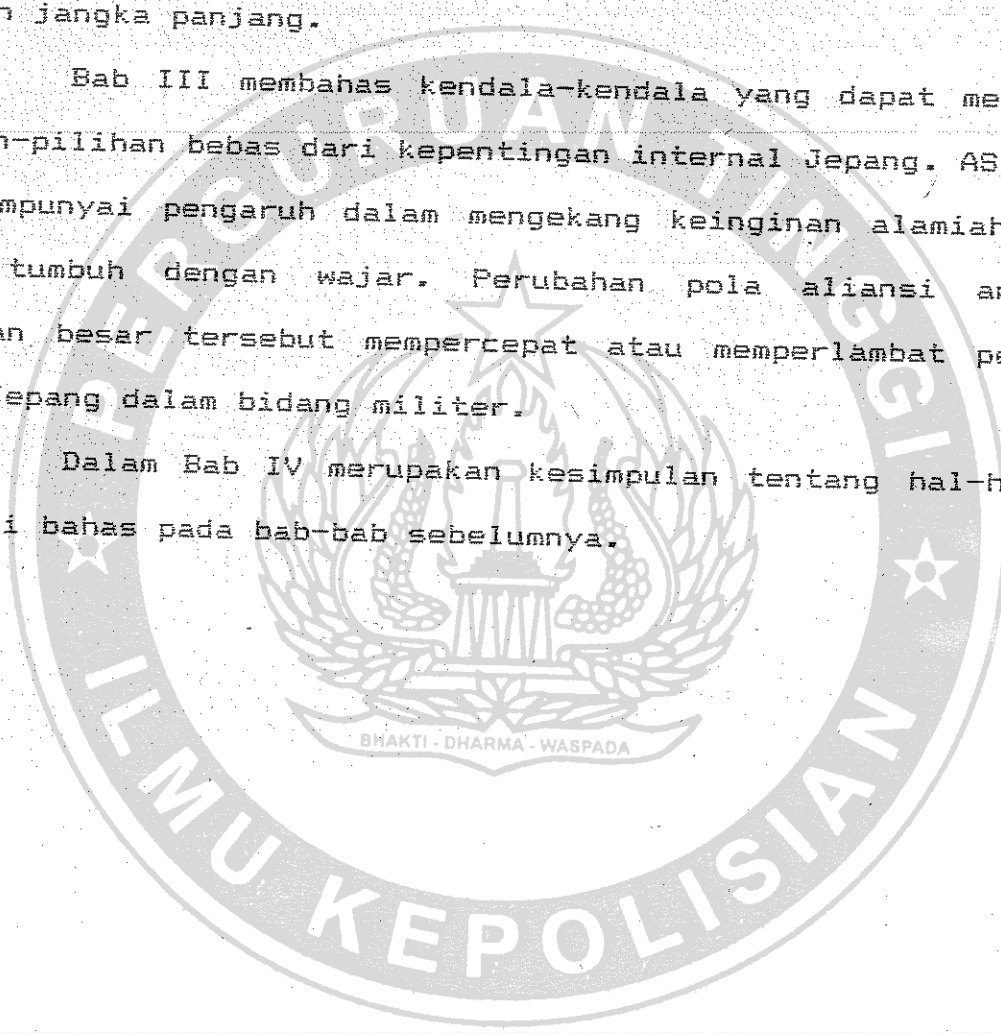
Sripsi ini terdiri atas empat bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini juga terdapat kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisa. Juga terdapat asumsi, metode

penelitian dan pembabakan.

Bab II mengulas persoalan penting yang membentuk *postur* Jepang, terutama persoalan-persoalan pada masa transisi, yaitu pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952), apa dan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan Sekutu dan bagaimana Jepang memanfaatkan keadaan tersebut bagi kepentingan jangka pendek ataupun jangka panjang.

Bab III membahas kendala-kendala yang dapat menghambat pilihan-pilihan bebas dari kepentingan internal Jepang. AS, US dan RRC mempunyai pengaruh dalam mengekang keinginan alamiah Jepang untuk tumbuh dengan wajar. Perubahan pola aliansi antara 3 kekuatan besar tersebut mempercepat atau memperlambat perubahan peran Jepang dalam bidang militer.

Dalam Bab IV merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang sudah di bahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

PERUBAHAN KEMAMPUAN EKONOMI JEPANG 1950 - 1970

PERKEMBANGAN DAN PILIHAN POLITIK PADA MASA SURVIVAL 1945 - 1951

Militer Jepang mengadakan aksi pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin sipil yang dianggap dapat menghalangi jalan bagi aksi militer di negara-negara lain pada tahun 1936.¹ Kalangan militer berpendapat bahwa ketergantungan pada bahan-bahan baku dari luar negeri dapat menjadi sarana penekan pihak asing terhadap Jepang. Hal ini akan dapat memukul ekonomi Jepang. Agar ketergantungan itu dapat dihilangkan, minimal dikurangi, Jepang perlu menguasai daerah yang menghasilkan bahan baku tersebut. Penguasaan tersebut dapat memecahkan masalah ekonomi domestik, misalnya perluasan sektor-sektor ekonomi dan hilangnya ketergantungan suplai bahan baku dari luar negeri.

Disamping itu penguasaan wilayah ini dapat meningkatkan *prestise nasional*, karena Jepang dapat mensejajarkan dirinya dengan negara-negara besar lainnya. Pada saat itu berkembang anggapan bahwa negara besar diukur dari pemilikan tanah jajahan. Semakin banyak tanah jajahan yang dimiliki, semakin besar pengaruh negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain.

Dengan berhasilnya aksi militer di atas, Jepang semakin beringas dalam mencari daerah-daerah jajahan baru. Tidak hanya puas dengan Semenanjung Korea dan sebagian daratan Cina,

¹ *Encyclopedia Britannica, Macropedia, vol. 10, 1980, h. 83.*

tetapi diluaskan juga hingga keAsia Tenggara dan sebagian kawasan Pasifik. Tindakan ini telah merubah perimbangan kekuatan di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Kekuatan tandingan yang berarti dari negara Barat adalah dari AS. Sedangkan Australia dan Cina praktis tidak mampu melakukan serangan di luar negara bersangkutan. Kekuatan penanding lainnya, Inggris, Perancis dan Belanda, lebih memusatkan perhatian dalam berperang dengan Jerman di Eropa.

Meskipun agak lambat akhirnya AS dapat juga menundukkan Jepang sampai ke ibukotanya --Tokyo-- dan melakukan perubahan-perubahan berarti tanpa bantuan pihak lain. Jepang merupakan medan yang ditangani AS dengan Jendral Mac Arthur sebagai Panglima Tertinggi Supreme Commander for The Allied Powers (SCAP).²

Persoalan yang kemudian timbul adalah tentang bagaimana SCAP akan melaksanakan kekuasaannya setelah Jepang menyerah ? Dan negara-negara mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut. Uni Sovyet (US) yang menyatakan perang dengan Jepang pada tanggal 8 Agustus 1945, 6 hari sebelum pernyataan penyerahan Jepang pada Sekutu, menghendaki perubahan susunan dalam SCAP. US mengusulkan Marsekal Vasilevski sebagai salah satu penguasa tertinggi SCAP disamping Jendral Mac Arthur.³ Inggris juga mengusulkan agar negara-negara utama yang terlibat perang dengan Jepang yaitu Cina,

²Edwin M. Martin, *The Allied Occupation of Japan*, (New York: American Institute of Pacific Relation, 1948), h. 9-10.

³Donald F. Lach and Edmund S. Wehrle, *International Politics in East Asia since World War II*, (New York: Praeger Publisher, 1975), h. 122.

US, Inggris dan Australia,terlibat dengan pelaksanaan tersebut.⁴ Tetapi semua itu dapat diselesaikan dengan dibentuknya Far Eastern Commission (FEC) yang beranggotakan 11 negara yaitu: US, AS, Inggris, Cina, Perancis, Belanda, Canada, Australia, Selandia Baru, India dan Filipina dengan tugas:

"..."to formulate the policies, principles and standards" for the application of the terms of surrender imposed upon Japan; and it might review the policy decisions of SCAP". (" "untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip dan standar-standar tertentu" bagi penerapan syarat-syarat penyerahan yang dikenakan terhadap Jepang; dan dia (FEC) dapat menilai kebijakan dari SCAP".)

Perundingan-perundingan antara SCAP dengan pihak Jepang pada mulanya agak kaku, terutama pada saat SCAP meminta pangeran Fumimaro Konoye memperbaiki konstitusi Meiji supaya lebih demokratis. Hasil perbaikan itu tidak memuaskan SCAP. Setelah SCAP memaksakan perubahan mendasar tertentu terbentuklah konstitusi yang demokratis itu.⁶

Perubahan mendasar yang terdapat dalam konstitusi baru tersebut sangat berbeda dengan konstitusi Meiji sebelumnya. Menurut Akira Matsui, seorang bekas diplomat kawakan, ada 3 hal dasar yang membedakannya:

1. That the sovereign power resides with the people; (Bahwa kedaulatan tertinggi terletak pada rakyat).

⁴ Ibid, h. 124.

⁵ Ibid, h. 128.

⁶ Bradley M. Richardson, Scott C. Flanagan, *Politics in Japan*, (USA : Little, Brown and Company, 1984), 33-35.

2. That the Emperor is the symbol of the State and the Unity of the People but not the ruler as he was under the former Meiji Constitution; (Bahwa Kaisar hanya sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat, tetapi bukan sebagai penguasa seperti pada jaman Meiji).
3. That the Constitution explicitly renounces war and the maintenance of land, sea and air forces as well as other war potential. (Bahwa konstitusi itu secara tegas menghindari perang dan pemeliharaan angkatan darat, laut dan udara,⁷ termasuk juga kemampuan-kemampuan perang lainnya).

Dengan dijiwai semangat demokrasi, SCAP membuat konstitusi Jepang agak lebih liberal dari konstitusi AS sendiri. Dalam konstitusi tersebut dimasukkan hak-hak asasi manusia secara rinci, seperti perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, pengejaran kebahagiaan, juga hak untuk memelihara standar menyeluruh dari kehidupan berbudaya.⁸

Semangat anti-monopoli, sebagai manifestasi dari demokratisasi di bidang ekonomi, juga diterapkan oleh SCAP dengan jalan menghancurkan Zaibatsu (perusahaan besar Jepang yang bergerak bukan hanya dalam bidang perdagangan, tapi juga industri, jasa dan keuangan). Zaibatsu dianggap ikut bertanggung jawab dalam melicinkan jalan bagi militerisme Jepang.⁹ SCAP juga membuat Undang-Undang (UU) Anti-Monopoli (The Anti-Monopoly Law) yang

⁷ Akira Matsui, "Dyason Memorial Lecture, Domestic Policy Versus Foreign Policy in Japan", *Australian Outlook*, vol.30, no.3, Dec., 1976, h. 344.

⁸ Bradley, *Op. cit.*, h.35.

⁹ Kazushi Ohkawa and Henry Rosovsky, *Japanese Economic Growth, Trend Acceleration in the Twentieth Century*, (California: Stanford University Press, 1977), h. 221.

mulai berlaku efektif pada tanggal 20 Juli 1947 dengan tujuan:

"... prohibited private monopoly, mergers, holding companies, and trusts, as well as unreasonable restraint of trade through the formation of domestic and international cartels or syndicates". ("... melarang swasta melakukan monopoli, merger, holding company atau trust, termasuk juga pengekangan perdagangan yang tidak masuk akal melalui penyusunan kartel-kartel atau sindikat-sindiket domestik maupun internasional".)

supaya hal itu dapat:

"... provide the necessary basis for democratization of the economy by preventing excessive concentration of economic power, while supporting the healthy growth of the labor movement, which in turn would lead to the development and maintenance of peaceful, democratic system of government". (... memberikan dasar yang diperlukan bagi demokratisasi ekonomi dengan mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebih-lebihan, dengan mendukung pertumbuhan gerakan kaum buruh yang sehat, yang dapat mengarah pada pembangunan dan pemeliharaan perdamaian dan sistim pemerintahan yang demokratis".)¹⁰

Secara formal, dengan hanya melihat pada konstitusinya, Jepang telah berubah dari negara yang otoriter menjadi negara yang demokratis. Tetapi kalau dilihat lebih jauh ternyata Jepang masih kurang demokratis. Tingkah laku yang bersifat paternalistik masih demikian kuat merasuk dalam kehidupan sosialnya. Hal ini bertolak belakang dengan sifat demokrasi, dimana unsur kesederajatan adalah tiang utama bagi tegaknya demokrasi.¹¹

Kota-kota di Jepang banyak hancur sebagai akibat dari serangan udara Sekutu dan yang paling tragis adalah dengan dija-

¹⁰

Saisei no Nihon p.522, dalam Chitoshi Yanaga, *Big Business in Japanese Politics*, (USA : Yale University Press, 1971), h.153, Sedangkan mengenai pengertian merger, holding company, trust, kartel dan syndicate dapat dilihat dalam Drs. M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980); h. 99-144.

¹¹

Ibid, h.6.

pindah ke daerah-daerah pertanian. Sekedar untuk dapat bertahan hidup saja, daerah pedesaan dapat menghasilkan kebutuhan bahan makanan sehari-hari.

Keadaan di atas dapat dilihat dalam Tabel I, dimana setelah PD II terjadi pelonjakan tenaga kerja di sektor pertanian dan jasa, sedangkan di sektor industri terjadi penurunan yang cukup mencolok. Padahal pada saat perang berlangsung terjadi kenaikan tenaga kerja di sektor perindustrian.

Tabel II*)

Net Domestic Product (NDP) Sesuai Sektor Usaha
Menurut Harga Yang Berlaku Pada Saat Itu

Tahun 1940 - 1944 dalam jutaan Yen.

Tahun 1946 - 1949 dalam milyar Yen.

Tahun	Sektor Usaha	Pertanian	Industri	Jasa
1940		5.858	17.054	14.114
1941		7.092	15.578	12.905
1942		8.233	18.632	14.912
1943		8.315	22.256	17.529
1944		10.104	25.874	20.794
1945		tad.	tad.	tad.
1946		140	86	135
1947		343	265	360
1948		625	626	712
1949		751	980	1.007

tad = tidak ada data.

*) Data diolah dari Basic Statistical Table 3 terdapat dalam Kazushi Ohkawa, *Op. cit.*, h. 282-283.

Antara tahun 1940 - 1944 terjadi penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian dan jasa yang rata-rata setiap tahun

sebesar 4,2% dan 8,2%, sedangkan bagi sektor industri, terjadi kenaikan sebesar 5,73%. Antara tahun 1946-1949 tenaga kerja di sektor pertanian jumlahnya relatif stabil bahkan cenderung menurun, sedangkan di sektor industri dan jasa terjadi kenaikan.

Sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap Net Domestic Product (NDP) terlihat dalam Tabel II. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa setelah PD II sampai tahun 1949 terjadi kenaikan jumlah sumbangan sektor pertanian terhadap NDP, meskipun total sumbangan NDP semakin berkurang. Antara tahun 1944 - 1946, dalam nilai yen terdapat kenaikan sebesar hampir 14 kali lipat. Padahal pada tahun 1946 itu, Jepang mengalami kehancuran berat akibat perang sehingga tidak logis kalau terjadi kenaikan sumbangan terhadap NDP dan yang logis adalah terjadinya penurunan sumbangan terhadap NDP.

Tafsiran yang paling akurat adalah terjadinya inflasi pada masa itu, sehingga nilai kenaikan itu sesungguhnya tidak dapat dibandingkan dengan nilai yang terjadi sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dari tiadanya data yang menerangkan tentang seberapa besar sumbangan masing-masing sektor itu terhadap NDP kalau dipergunakan ukuran menurut harga yang berlaku tetap (at constant prices).

Tabel III *)

NDP Sesuai Sektor Usaha Menurut Harga Yang Berlaku Tetap

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Total
1940*	3.000	-10.895	10.709	24.604
.....
.....
.....**
1953**	1.239	2.604	3.229	7.072
1954**	1.396	2.851	3.718	5.837
1955**	1.772	3.063	3.792	8.577

* Menggunakan harga tetap pada tahun 1936 dalam jutaan yen.
 ** Menggunakan harga tetap pada tahun 1960 dalam milyar yen.

*) Data diolah dari basic statistical table 4 terdapat dalam Kazushi Ohkawa, *Ibid.*, h. 284-285.

Tidak tersedianya data dalam Tabel III antara tahun 1941-1952 sangat berkaitan dengan besarnya inflasi yang terjadi pada saat itu. Untuk masa sebelum perang juga terjadi inflasi yang besar, karena adanya pengeluaran pemerintah untuk anggaran militer yang besar. Sedangkan setelah perang didorong oleh tidak tersedianya bahan baku untuk industri maupun bahan-bahan makanan untuk konsumsi sehari-hari.

Dengan melihat pada keadaan internalnya, maka Jepang memilih mengikatkan diri dengan AS didasarkan pada pertimbangan:

1. Kekuatan ekonomi dan militer AS belum dapat ditandangi oleh US.¹³ Dengan kekuatan ekonomi AS yang besar itu, Jepang berharap dapat memperoleh bantuan sehingga dapat bangkit dari pu-

¹³ Hugh Patrick, "U.S. National Interest in East Asia", lihat *The National Interest of the United State in Foreign Policy, Seven Discussion at Wilson Center, December 1980-February 1981*, Frances Gifford (ed), (USA : University Press of America, 1981), h. 29.

ing-puing kehancurannya. Sedangkan dengan kekuatan militer AS yang besar diharapkan --minimal-- penyerahan Jepang adalah masalah AS sendiri (American Affairs). Dengan kekuatan ekonomi-militer AS yang besar tersebut, diperkirakan AS dapat menyekat kekuatan-kekuatan lainnya untuk campur tangan dalam masalah Jepang, baik yang berasal dari US, Inggris, Cina maupun Australia.

2. Para pengambil keputusan di Jepang didominasi oleh kekuatan-kekuatan konservatif kanan, karena selama berlangsungnya perang PD II banyak tokoh golongan kiri ditangkapi untuk dipenjarakan dan sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri.¹⁴

3. Pilihan terhadap US akan menghadapkan Jepang dengan masalah-masalah yang jauh lebih rumit, bila dibandingkan dengan pilihannya pada AS. AS telah menguasai seluruh kepulauan Jepang, sedangkan US hanya menguasai Manchuria dan kepulauan Kurile di utara Jepang.

Mengenai kepulauan Kurile ini, Jepang mengklaim bahwa ada 4 pulau dalam kepulauan Kurile yang dianggap sebagai miliknya yaitu pulau Shikotan, Habomai, Kunashiri dan Etorofu. Sedangkan pihak US menunjuk pada pasal 8 deklarasi Postdam yang menyatakan:

"The term of Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine". (Syarat Deklarasi Kairo harus dilaksanakan dan kedaulatan Jepang akan dibatasi pada pulau-pulau Honshu, Hokaido, Kyushu, Shikoku, dan pulau-pulau kecil lainnya, seperti yang kita tentukan).¹⁵

¹⁴ Bradley, *Op.cit.*, h. 70-74.

¹⁵ Lihat Dokumen *The Postdam Declaration*, July 26, 1945.

4. Mengikatkan diri dengan US akan memperluas gerakan kaum kiri yang berarti akan menghadapkan Jepang pada tekanan fisik AS secara langsung tanpa dapat dibendung US.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Jendral Mac Arthur, Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshida Shigeru meminta agar Jepang diperbolehkan mengimpor sejumlah bahan baku untuk keperluan industrinya, seperti batu bara, besi dan minyak berat (heavy oil) untuk mematahkan lingkaran setan (vicious circle) kemacetan industri. Padahal waktu itu Sekutu lebih menekankan pada penanganan masalah kekurangan bahan makanan, kelaparan dan penyediaan rumah tinggal, tapi permintaan itu dikabulkan juga oleh Jendral Mac Arthur.¹⁶ Dalam suratnya pada pemerintah di Washington, Jendral Mac Arthur menyarankan:

"... He could not guarantee a responsible, peace loving, democratic Japan unless the Japanese were given a chance to regain their self-respect and provide themselves with adequate food, clothing and shelter ... He favored minimal reparations and economic restrictions. He believed that with the restriction of their sovereignty and self-respect their access to raw materials and markets, and their incentive to work, the Japanese would quickly get back on their feet economically". ("... Dia tidak dapat menjamin suatu tanggung jawab bagi Jepang yang demokratis dan cinta perdamaian, kecuali kalau Jepang diberi kesempatan untuk memperoleh kembali kehormatan dirinya dan memberi mereka makanan, pakaian dan perumahan yang cukup ... Dia menginginkan perbaikan dan pengekangan ekonomi minimal. Dia percaya bahwa dengan pengekangan kedaulatan dan kebanggaan diri mereka bagi jalan masuk untuk bahan-bahan baku dan pasarannya sekaligus, dan rangsangan mereka untuk bekerja, Jepang akan dengan ce-

¹⁶ Saburo Okita, *Op. cit.*, h.3-4.

pat memperoleh pondasi kekuatan ekonominya).¹⁷

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang buruk akibat inflasi yang luar biasa besarnya (rampant inflation) itu, pemerintah AS mengirimkan seorang bankir terkenal dari Detroit, Joseph R. Dodge untuk mengatasi krisis tersebut. Dodge membuat langkah-langkah pencegahan yaitu dengan melakukan anggaran berimbang dan menekan pengeluaran pemerintah yang tidak perlu.¹⁸ Juga dengan saran Dodge ini ditetapkan nilai tukar mata uang yen, untuk 1 dolar AS sama dengan 360 yen.¹⁹

Dengan perombakan ekonomi yang dilakukan itu, Jepang mulai dapat meningkatkan kemampuan ekonominya. Jepang sedikit demi sedikit mulai dapat melepaskan ketergantungannya atas subsidi bahan-bahan primer yang diberikan AS.

Dari Tabel IV dapat diketahui bahwa bantuan AS terhadap Jepang sampai tahun 1952 cukup besar. Jumlah itu diperbesar lagi dalam bentuk bantuan khusus, termasuk untuk pengeluaran proyek-proyek militer AS di Jepang.

Sementara itu diluar Jepang terjadi perubahan

¹⁷ Martin E. Weinstein, "Strategic Thought and The U.S.-Japan Alliance", James William Morley (ed.), *Forecast for Japan Security in the 1970's*, (New Jersey: Princeton University Press, 1972), h. 35-36.

¹⁸ Donald F. Lach, *Op. cit.*, h. 140.

¹⁹ Saburo Okita, *Japan in the World Economy*, (Tokyo: The Japan Foundation, 1975), h. 5.

TABEL IV*)
BANTUAN AS TERHADAP JEPANG SETELAH PD II

Dalam Juta Dolar

Tahun	Bantuan	Pengeluaran Khusus	Nilai Impor
Sept. 1945			
Des. 1946	193	-	306
1947	404	-	526
1948	461	-	684
1949	535	-	905
1950	361	149	974
1951	164	592	1.995
1952	-	824	2.028

Sumber : Ministry of Finance and Economic Planning Board Diambil dari G.C. Allen, *Japan's Economic Recovery* (London, New York and Toronto: Oxford University Press, 1958), h. 203. Chae-Jin Lee and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan and Korea: A Changing Influence Relationship* (New York: Praeger Publisher, 1982), h. 5.

perimbangan kekuatan di Asia Timur dengan munculnya Republik Rakyat Cina (RRC) yang berhaluan komunis. Hal ini mempengaruhi strategi AS di Asia Timur. Jepang mulai ditekan AS untuk meningkatkan anggaran pertahanan melalui pembicaraan antara PM Yoshida Shigeru dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Foster Dulles. Menlu AS minta agar Jepang bersedia membentuk pasukan untuk menangkal kekuatan komunis ini. Tekanan ini kurang disetujui Yoshida, karena rencana tersebut baik secara ekonomi maupun psikologis tidak mampu dilakukan Jepang.²⁰

Tingkat kekuatiran antara apa yang dirasakan oleh AS dengan Jepang dalam masalah komunis ini berbeda. AS berangkat dari

²⁰ Donald F. Lach, *Op.cit.*, h.141.

pengalaman waktu menyelamatkan Berlin Barat dari isolasi total US yang menguasai Jerman Timur. Sedangkan Jepang beranggapan meskipun daratan Cina telah dikuasai komunis, tetapi tidak melihat kemampuan RRC untuk menyerangnya. Hal yang sama juga dengan US, dimana ancaman US tidaklah besar, karena US masih megkonsentrasikan pada masalah Eropa dari pada Asia, sehingga tekanan terhadap Jepang tidak terlampau besar. Jadi dengan kemampuan RRC yang masih terbatas dan terpusatnya perhatian US ke Eropah masalah perkembangan komunis masih dapat diatasi oleh kekuatan AS di Pasifik Barat.²¹

Meskipun Jepang dapat meyakinkan AS akan kekurangberartian ancaman US dan RRC, tetapi Jepang mulai memikirkan masalah pertahanan dirinya, terutama yang disebabkan oleh gejolak politik internal, misalnya dengan melihat pengalaman demonstrasi atau pemogokan berskala nasional (1947) yang dimotori golongan kiri.²²

Perlindungan dari serangan kekuatan-kekuatan lawan relatif dapat diatasi dengan menyandarkan pada kekuatan AS, tapi masalah-masalah keamanan internal terasa rapuh. Timbul pemikiran untuk mengatasi hal itu, tapi masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh konstitusi. Hal ini menjadi masalah besar karena: pertama, adanya kaitan antara besarnya pengeluaran militer

²¹ Martin E. Weinstein, *Op. cit.*, h. 35-45.

²² Donald F. Lach, *Op. cit.*, h. 124.

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.²³ Jepang akan selalu menghindari pengeluaran militer yang besar, karena hal itu dapat mengorbankan strategi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, kondisi psikologis, baik internal maupun eksternal masih belum dapat menerima kehadiran militer Jepang yang kuat. Hal ini berkaitan dengan tingkah laku militer Jepang sebelumnya.²⁴ Ketiga, dengan mengandalkan kerja sama militer AS - Jepang, maka sebagian beban pertahanan yang seharusnya dipikul oleh Jepang dapat dialokasikan ke sektor lain yang lebih produktif dan lebih menguntungkan bagi strategi pertumbuhan ekonominya.²⁵

KEBANGKITAN KEMBALI EKONOMI JEPANG (1952 - 1960).

Strukturisasi ekonomi yang dilakukan Jepang untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi nasional dari kehancuran akibat PD II mendapat dorongan dengan berlangsungnya Perang Korea. Dalam perang ini, Jepang dapat memasok bahan-bahan yang diperlukan AS dalam perang tersebut. Hal ini mempercepat pencapaian strategi yang ditetapkan semula yaitu strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Strategi ini dirumuskan dengan tujuh hal yaitu, the

²³ Steve Chan, "The Impact of Defence Spending on Economic Performance : A Survey of Evidence and Problems" terdapat dalam *Orbis, A Journal of World Affairs*, Summer 1985, h. 405-415, Robert W. DeGrasse Jr., *Op. cit.*, n. 41-53.

²⁴ Mengenai ketakutan akan bangkitnya kembali militerisme Jepang dari negara-negara sekitar Jepang, lihat John Hohenberg, *Op.cit.*, h. 59-61.

²⁵ James W. Morley, *Op. cit.*, h. 9-34.

"Economy First" principle, production oriented policies, expansion of heavy industry, export promotion, use of price mechanism and planning, high rate of savings dan financial mechanism.²⁶

Hal ini menimbulkan konsekwensi bagi pengimporan bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan tersebut. Jepang memerlukan mata uang asing. Kebutuhan akan mata uang asing membuat Jepang harus dapat mengekspor produk-produknya ke pasar internasional. Tanpa tindakan pengeksporan ini Jepang akan dihadapkan pada persoalan internal akan kekurangan bahan-bahan baku bagi industri maupun bahan-bahan makanan.²⁷ Apalagi pandangan Jepang yang melihat bahwa perdagangan internasional ini sebagai tiang utama bagi pertumbuhan ekonominya.²⁸ Agar dapat melakukan perdagangan yang maksimal diperlukan hubungan bilateral yang baik antara Jepang dengan negara lain.

Realisasi Perjanjian Perdamaian di San Fransisco (8 September 1951) memberikan kedaulatan kepada Jepang. Sejak itu Jepang mulai melakukan perjanjian perdamaian bilateral dengan negara-negara di Asia Timur. Perjanjian Jepang-Taiwan (28 April 1952) mengakhiri keadaan perang negara tersebut. Perjanjian perdamaian dengan Birma ditandatangani pada tanggal 5 November 1954. Jepang juga menandatangani masalah pampasan perang dengan

²⁶ Saburo Okita, *Op. cit.*, h. 45.

²⁷ Ministry of International Trade and Industry (MITI), *White Paper of International Trade 1979*, (Tokyo : MITI, 1979), H. 103.

²⁸ Yoshihara Kunio, *Perkembangan Ekonomi Jepang : Sebuah Pengantar*, (terj.) (Jakarta : Penerbit PT Gramedia dan Yayasan Obor Indonesia, 1983), h. 63-64.

Filipina pada 9 Mei 1956, sementara pembukaan hubungan diplomatik dengan US dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1956.²⁹

Dalam pada itu ditanda tangani suatu perjanjian keamanan AS - Jepang pada 16 Januari 1960. Perjanjian ini memberikan sebagian beban AS atas masalah pertahanan regional Asia Timur pada Jepang. Terlihat dalam artikel VI perjanjian tersebut.³⁰

For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan.

The Use of these facilities and areas as well as the status of armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative agreement under Article III of the Security Treaty between the United States of America and Japan, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon.

(Bagi maksud sumbangan keamanan Jepang dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional di Timur Jauh, Amerika Serikat diperbolehkan menggunakan pangkalan angkatan Darat, Laut dan Udara dalam wilayah Jepang).

Penggunaan fasilitas-fasilitas militer dan wilayah Jepang termasuk Angkatan Bersenjataanya (AB)-nya diatur dengan persetujuan terpisah yang menggantikan persetujuan dalam Artikel III Perjanjian Keamanan ditanda tangani di Tokyo, 28 Februari 1952 antara Amerika Serikat dengan Jepang dan pengaturan-pengaturan lainnya yang disetujui kemudian).

Dengan belum dibukanya hubungan diplomatik antara Jepang dengan RRC, maka kebutuhan akan bahan baku bagi industri ditujukan

²⁹ Kedutaan Besar Jepang Jakarta, *Jepang sebuah pedoman saku*, (Jakarta : Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, 1985), h. 39.

³⁰ Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United states of America and Japan (1960).

industri lanjutan, seperti industri elektronika dan industri yang berhubungan dengan masalah transportasi.

Sementara itu timbul persoalan politik domestik yang menonjol dalam wujud demonstrasi besar-besaran di jalan-jalan dan perdebatan di parlemen sehubungan dengan dirundingkannya kembali Perjanjian Keamanan Jepang - AS yang mengatur hubungan Jepang - AS secara khusus. PM Nobusuke Kishi menghendaki peran Jepang --terutama dalam masalah pertahanan-- diperluas dan hal ini sesuai dengan tuntutan AS yang menghendaki perluasan peran Jepang dalam masalah itu.

Ada usaha kuat dari masyarakat Jepang untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan AS dalam masalah pertahanan ini. Suatu keinginan agar Jepang menjalankan peran yang lebih luas tanpa dibarengi dengan peningkatan masalah militer. Juga masyarakat Jepang mendesak pemerintah Jepang agar secepatnya pemerintah Jepang mengambil kembali kepulauan Okinawa dari administrasi AS.

Persoalan-persoalan ini membesar karena PM Kishi tetap memegang pandangannya, bahwa peran Jepang perlu diperluas termasuk dalam masalah militernya. Pada akhirnya masalah ini diputuskan oleh parlemen tanpa kehadiran dari anggota-anggota oposisi. Bahkan Presiden Eisenhower yang direncanakan akan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang terpaksa digagalkan mengingat situasi yang panas di Jepang.³⁴

Sikap yang diambil PM Kishi ini sangat mempengaruhi

³⁴ Martin E. Weinstein, *Op. cit.*, h. 40.

penggantinya, yaitu PM Ikeda Hayato. PM yang baru lebih memusatkan perhatiannya pada masalah ekonomi dari pada masalah politik dengan strategi meningkatkan pendapatan nasional dua kali lipat. Strategi ini dimaksudkan untuk meredam amosi masyarakat pada saat terjadinya krisis nasional tentang perundingan kembali Perjanjian Keamanan Jepang - AS.³⁵

DASAWARSA PERTUMBUHAN EKONOMI TERTINGGI (1961 - 1970)

Strategi Hayato ini berhasil membuat Jepang mencapai

TABEL V*)
GNP Jepang 1960 - 1970
dalam milyar yen

Tahun	GNP menurut harga pasar
1960	15.499
1961	19.126
1962	21.200
1963	24.464
1964	28.839
1965	31.787
1966	36.794
1967	43.543
1968	51.707
1969	60.240
1970	70.982

Sumber: Basic Statistical Table 1. Kazushi Ohkawa & Henry Rosovsky, *Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century*, (California: Stanford University Press, 1973), h. 279.

pertumbuhan ekonomisebesar 10% lebih. Dengan pertumbuhan sebesar

³⁵ Tetsuya Kataoka, *Waiting For A "Pearl Harbor", Japan Debates Defense* (Stanford University, Stanford, California: Hoover Institution Press, 1980), h. 20.

itu sesungguhnya Jepang sudah dapat mencapai strateginya hanya dalam waktu 7 tahun saja. Hal ni dapat dilihat dalam Tabel V di atas.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat itu memerlukan perluasan pasar yang ada, baik domestik maupun internasional. Jepang tidak menysia-nyiakan setiap kesempatan ekonomi yang ada.

Pada bulan April 1960 terjadi perubahan politik di Korea Selatan, dimana terjadi pergantian kekuasaan dari Syngman Rhee ke Chang Myon yang kemudian dikudeta Jendral Park Chung Hee pada tahun 1961. Park Chung Hee mau bekerja sama dengan Jepang. Hal mana berbeda dengan Syngman Rhee.³⁶

Atas prakarsa sekaligus tekanan AS, Jepang diminta untuk mengambil bagian dalam pembangunan Korea Selatan.³⁷ Perundingan-perundingan dilakukan dengan intensif untuk membuka hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Jepang yang selanjutnya mengarah pada keterlibatan Jepang dalam pembangunan Korea Selatan.

Masalah pampasan perang, pengakuan eksistensi Korea Selatan sebagai satu-satunya negara yang sah dan sejumlah klaim kepulauan yang dipersengketakan, yaitu kepulauan Takeshima menurut pihak Jepang atau kepulauan Dokto menurut pihak Korea Selatan, dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah-masalah berarti. Pada tanggal 22 Juni 1965 ditandatangani perjanjian kerja sama Korea

³⁶ Chae Jin Lee and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan and Korea ; A Changing Influence Relationship*, (New York : Praeger Special Studies, 1982), h. 28-29.

³⁷ Terutomo Ozawa, *Op. cit.*, h. 88-90.

Selatan - Jepang.

Dalam masalah Semenanjung Korea, Jepang dengan tegas mengakui Korea Selatan sebagai satu-satunya negara yang sah di semenanjung Korea. Hal ini berbeda dengan sikapnya terhadap RRC dan US. Dalam menghadapi kedua negara komunis tersebut, Jepang mengambil kebijakan untuk mengambil jarak yang sama dalam menjalankan diplomasinya (equidistance).

Dengan pergantian kekuasaan dari rejim sipil ke rejim militer, Korea Selatan mengambil strategi pembangunan ekonomi dengan tekanan pada masalah pertumbuhan. Salah satu penerapan dari strategi ini adalah dengan dibukanya kawasan Mazan sebagai suatu kawasan berikat (MAFEZ = Mazan Free Exporting Zone). Modal Jepang banyak mengalir masuk ke kawasan ini.

Perluasan pasar bagi pelepasan produk-produk Jepang semakin luas. Taiwan, Korea Selatan, Asia Tenggara dan negara-negara barat mulai dibanjiri produk-produk Jepang. AS sebagai suatu negara yang merancang bangun ekonomi - politik Jepang mulai menghadapi tantangan serius atas membanjirnya produk-produk Jepang ini.³⁸

Pada tahun 1969 ekspor tekstil Jepang ke AS mulai menjadi masalah, karena ekspor tekstil Jepang ini dianggap menghancurkan industri tekstil AS sendiri, maka tekanan-tekanan AS atas masalah tekstil ini membesar. Jepang di harapkan bersedia membatasi sendiri (self-restraint) ekspor tekstilnya ke AS.

³⁸ *Pacific Affairs*, "Japan and World Politics in the 1970s: Review Article", h. 291.

Masalah tekanan ekspor tekstil ke AS ini adalah masalah ekonomi internasional pertama yang dihadapinya semenjak PD II. Sebelumnya Jepang tidak pernah mengaitkan tingginya ekspor produk-produknya akan mempengaruhi industri sejenis dari negara lain dan hal ini akan merumitkan masalah-masalah perdagangan internasional.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini mulai mengangkat Jepang dari perasaan inferior atas kekalahannya dalam PD II. Pada tahun 1964, Jepang masuk menjadi anggota dana moneter internasional (IMF = International Monetary Fund) dan Organisasi bagi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD = Organization for Economic Co-operation and Development). Masuknya Jepang pada kedua organisasi ini, meningkatkan peran Jepang dalam masalah ekonomi. Pada tahun 1968, GNP Jepang sudah melampaui Jerman Barat, sehingga GNP Jepang menjadi nomor 2 diantara negara-negara industri Barat.

Dengan kemampuan ekonomi yang semakin meningkat, Jepang mulai memberikan bantuan-bantuan ekonomi khusus kepada negara-negara disekitarnya dalam bentuk hibah. Bantuan ini diatur dalam Official Development Assistance (ODA) dan dimaksudkan untuk meredakan rasa tidak puas dari negara-negara yang menjadi mitra ekonomi Jepang atas tingkah laku ekonomi Jepang masa lalu.

BAB III

PERANAN JEPANG DI ASIA TIMUR DALAM DEKADE 1970-AN

TEKANAN INTERNASIONAL TERHADAP JEPANG

Pada dekade 1950-an dan 1960-an Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini meningkatkan kebutuhan bahan baku bagi keperluan industri. Minyak bumi, batu bara dan biji besi lebih dari 80% didatangkan dari luar negeri, sehingga ketergantungan Jepang akan bahan-bahan baku membutuhkan mata uang asing yang besar.¹

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi salah satunya di dukung dengan pertumbuhan ekspor tiap tahun lebih dari 10%. Dari ekspor inilah Jepang dapat mengimpor bahan baku bagi industrinya sekaligus mesin-mesin bagi perkembangan industrinya.

Dalam tahun 1969, ekspor tekstil Jepang untuk pertama kalinya --semenjak PD II--, di gugat AS. Negara adi daya itu menuntut untuk membatasi sendiri (self-restraint) ekspor tekstil Jepang ke AS. Ekspor tekstil tersebut dianggap sebagai penyebab kehancuran industri tekstil AS. Hal itu dapat menyebabkan persoalan lebih jauh, berupa pengangguran, hilangnya kesempatan ekonomi pada satu sektor --industri tekstil-- dan tekanan-tekanan politik terhadap pemerintah atas kehancuran di sektor tersebut.

Dalam menghadapi masalah tersebut, AS menerapkan

¹Ministry of International Trade and Industry (MITI), *White Paper of International Trade 1979*, (Tokyo : MITI, 1979), h. 103.

kebijakan yang sama terhadap Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong yang ekspor tekstilnya ke AS besar juga. Atas tekanan ini AS melakukan negosiasi dengan negara-negara tersebut. Korea Selatan tidak akan melakukan pengekangan ekspor tekstil secara sukarela bila Jepang, sebagai eksportir tekstil terbesar ke AS, tidak mau melakukan hal yang sama. Dengan tuntutan Korea Selatan tersebut AS melakukan tindakan keras terhadap Jepang agar mau menerima usulan AS. Bila Jepang menolak, maka AS akan mengenakan *Trading with the Enemy Act* yang dikenakan secara sepihak terhadap Jepang dalam wujud kuota atas ekspor tekstil Jepang.² Masalah ini sempat mengguncang Jepang, karena AS dianggap mulai melanggar prinsip perdagangan bebas.

Dalam perkembangan selanjutnya AS menjalankan New Economic Policy (NEP) dengan mendevalusi mata uangnya dan melepaskan ikatan dengan sistem Bretton Woods yang mengatur ikatan dolar AS dengan emas. Dalam New Economic Policy ini AS melakukan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) sebagai pengganti sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Disamping itu mengenakan bea masuk sebesar 10% atas barang-barang impor.³

Kebijakan NEP ini akibat dari memburuknya neraca perdagangan (*balance of trade*) AS dengan negara-negara lain,

²Chae Jin Lee and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan and Korea : A Changing Influence Relationship*, (New York : Praeger Publisher, 1962), h. 164 - 168.

³Koji Taira, "Power and Trade in U.S. - Japanese Relations", dalam *Asian Survey* vol. XII, no. 11, h. 980.

terutama Jepang sebagai mitra dagang terbesar. Jepang merasa kebijakan ekonomi AS ini ditujukan pada dirinya.

TABEL VI*)
EKSPOR-IMPOR JEPANG-AS DAN JEPANG KOREA SELATAN

Dalam Jutaan dolar AS

Tahun	Ekspor Jepang ke Korsel	Impor Jepang dari Korsel	Ekspor AS ke Jepang	Impor AS dari Jepang
1961	69	19	1.837	1.055
1962	109	24	1.574	1.358
1963	159	25	1.844	1.498
1964	110	38	2.009	1.768
1965	167	44	2.080	2.414
1966	294	66	2.364	2.963
1967	443	85	2.695	2.999
1968	624	100	2.954	4.054
1969	754	133	3.990	4.888
1970	809	234	4.652	5.875
1971	954	262	4.055	7.209
1972	1.031	408	4.965	9.065
1973	1.727	1.242	8.313	9.676
1974	2.621	1.380	10.679	12.456
1975	2.434	1.293	9.563	11.425
1976	3.099	1.802	10.144	15.504
1977	3.927	2.148	10.414	18.547
1978	5.982	2.627	12.885	24.458
1979	6.657	3.353	17.579	26.243
1980	5.858	3.039	20.575	30.701
Jumlah	37.828	18.322	135.171	199.096
Neraca Perdgan	Jepang Surplus 19.506 Korsel defisit 19.506		Jepang surplus 63.925 AS defisit 63.925	

* Sumber : U.S. Department of Commerce; South Korean Agency of Customs Administration; and Korea Herald. Dalam Chae Jin Lee and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan and Korea : A Changing Influence Relationship*, (New York : Praeger Publisher, 1982), h. 160.

Dengan melihat posisi perdagangan AS-Jepang yang terdapat dalam Tabel VI di atas, baru tahun 1965 Jepang mengalami surplus dari AS. Hal ini bertahan terus sampai tahun 1980. Kalau

neraca perdagangan dihitung sejak tahun 1961, maka surplus Jepang dari AS sebesar 63.925 juta dolar AS. Ketimpangan neraca perdagangan AS-Jepang ini dapat merembet ke masalah-masalah lain, seperti masalah beban pertahanan yang harus ditanggung bagi kawasan regional Asia Timur.

Setelah kebijakan ekonomi yang berpengaruh itu, AS mengumumkan bahwa Presiden Nixon akan melakukan kunjungan ke Beijing pada bulan Februari 1972. Langkah diplomatik AS ini semakin menekan Jepang. Apalagi kunjungan tersebut tidak diberitahukan lebih dahulu pada Jepang, padahal antara Jepang dan AS ada kesepakatan untuk berkonsultasi dahulu satu sama lain dalam menangani masalah RRC ini.

Jepang melihat kunjungan Presiden Nixon ini tidak semata-mata bersifat politik, tetapi juga membawa misi ekonomi. Untuk itu Jepang tidak mau ketinggalan dengan langkah-langkah Presiden Nixon. Pada bulan September 1972, PM Jepang Kakuei Tanaka mengadakan pembukaan hubungan diplomatik dengan RRC dengan mengadakan pernyataan bersama:

China and Japan are neighboring countries separated only by a strip of water, and there was a long history of traditional friendship between them. The two peoples ardently wish to end the abnormal state of affairs that has hitherto existed between the two countries. The termination of the state of war and normalization of relations between China and Japan -the realization of such wishes of the two peoples will open a new page in the annals of relations between the two countries (Cina dan Jepang, dua negara yang bertetangga hanya dipisahkan sebuah selat dan ada sejarah yang lama dan persahabatan tradisonal diantara mereka. Dua bangsa ingin sekali mengakhiri keadaan tidak normal yang masih ada diantara kedua negara. Pengakhiran keadaan peperangan dan normalisasi hubungan diantara Cina dan Jepang -realisasi keinginan-keinginan dua bangsa seperti itu

akan membuka lembaran baru dalam sejarah hubungan diantara dua negara.⁴

dan menyelesaikan masalah-masalah Jepang - RRC dalam hal Taiwan. Jepang menegaskan bahwa RRC adalah satu-satunya pemerintah yang sah di Cina dan menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari RRC.⁵ Secara otomatis Jepang menghapuskan perjanjian perdamaian dengan Taiwan yang dilakukan pada bulan April 1952.⁶

Penegasan Jepang dalam melihat masalah Cina - Taiwan

TABEL VII*)
EKSPOR - IMPOR JEPANG-TAIWAN DAN JEPANG-RRC

Dalam Juta Yen

Tahun	Ekspor Jepang ke RRC	Impor Jepang dari RRC	Ekspor Jpg ke Taiwan	Impor Jpg dari Taiwan
1974	580.522	380.573	583.833	277.389
1975	669.806	454.912	541.269	240.976
1976	496.599	406.549	676.514	353.094
1977	521.608	415.710	686.201	347.479
1978	633.035	425.240	750.440	364.990
1979	803.877	647.743	953.130	539.144
1980	1.140.787	977.794	1.168.681	522.144
Jumlah	4.856.234	3.708.621	5.360.068	2.645.214
Neraca Perdgan	Jepang surplus 1.147.613 RRC defisit 1.147.613		Jepang surplus 2.714.854 Taiwan defisit 2.714.854	

*) Sumber: The Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan 1979 - 1980. An annual abstract of official reports and statistics of Japanese Government*, h. 208.

⁴ *Peking Review*, Oct. 6, 1972, pp. 12-13. Chae Jin Lee and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan And Korea: A Changing Influence Relationship*, (New York: Praeger Publisher, 1982), h. 63.

⁵ Joachim Glaubitz, "Balancing Between Adversaries: Sino-Japanese Relations and Soviet Interference", *Pacific Community*, Oct. 1977, vol. 9, no. 1, h. 31.

⁶ Chae Jin Lee, *Op. cit.*, h. 64.

menempatkan Taiwan pada tingkat yang lebih rendah dibanding dengan Cina. Bagi Taiwan sikap Jepang itu tidak mempengaruhi hubungan ekonomi yang ada diantara kedua negara. Nilai impor Taiwan dari Jepang masih lebih besar dari nilai impor RRC dari Jepang. Tapi ekspor RRC ke Jepang jauh lebih besar dari ekspor Taiwan ke negara yang sama. Taiwan lebih menekankan masalah ekonomi daripada masalah prestise dalam kaitannya dengan pembukaan hubungan diplomatik Jepang - RRC. Hal ini menguntungkan Jepang dan sesuai dengan kebijakan dasar Jepang bagi perluasan ekonomi domestiknya. Untuk jelasnya dapat di lihat dalam Tabel VII di atas, dimana nilai ekspor Jepang ke Taiwan, 1974-1980, masih lebih besar dari nilai ekspor Jepang ke RRC untuk tahun yang sama. Sedangkan impor Jepang dari RRC mengalami peningkatan berarti sejak tahun 1979. Hal ini mengalahkan impor Jepang dari Taiwan.

Dalam pembukaan hubungan diplomatik Jepang-RRC, RRC menekan agar Jepang ikut mengutuk hegemonisme US yang dianggap musuh paling penting dalam pertikaiannya dengan sesama negara sosialis. Jepang menunda persoalan itu sampai ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian diantara kedua negara.

Ikatan politik ini menghadapkan Jepang pada tekanan-tekanan militer US. US menutup pintu dialog mengenai pengembalian pulau-pulau yang dituntut Jepang, seperti Shikotan, Habomai, Etorofu dan Kunashiri. US juga meningkatkan kehadiran militernya di pulau-pulau yang dituntut Jepang tersebut dengan menghadirkan 2 divisi pasukan dengan perlengkapannya, seperti tank, meriam dsb., bahkan US juga menempatkan senjata nuklirnya di kepulauan ini.

Tekanan US ini dapat diredakan dengan kerja sama ekonomi Jepang-US dalam pembangunan kawasan Siberia. Tawaran ekonomi US terhadap Jepang membuat RRC memberikan rangsangan kepada Jepang agar mau menanamkan modalnya bagi usaha-usaha penggalian minyak di lepas pantai Pohai. Tarikan-tarikan terhadap Jepang ini membuat Jepang lebih berpeluang untuk memperluas strategi perolehan suplai bahan baku agar kebutuhan dasar Jepang atas hal ini terlindungi.

Pertentangan RRC - US menyeret Jepang untuk ikut terlibat didalamnya. Pengaruh pertentangan itu dapat dilihat dalam persetujuan pembangunan lapangan minyak US di Tyumen, Siberia pada tahun 1975.⁷ US mengusulkan agar sistem pengangkutan minyak tersebut menggunakan jalan kereta api. Padahal jalan kereta api tersebut belum dibangun. Untuk itu diperlukan pembangunan jalan kereta api lebih dahulu. Jalan tersebut akan menyusuri perbatasan RRC - US sepanjang 3000 km. Usulan US ini ditanggapi RRC sebagai bentuk provokasi, karena sistem itu dapat digunakan untuk memindahkan peralatan militer US yang berada di wilayah Eropah ke wilayah Siberia.⁸ Sedangkan bagi Jepang akan lebih menguntungkan kalau menggunakan saluran pipa daripada kereta api. Silang pendapat pada masing-masing pihak menyebabkan perundingan masalah eksplorasi dan eksploitasi lapangan minyak Tyumen mengalami

⁷ Gerald L. Curtis, "The Tyumen Oil Development Project and Japanese Foreign Policy Decision Making", Robert A. Scalapino (ed.), *The Foreign Policy of Modern Japan*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1977), h. 147.

⁸ *Ibid.*, h. 158.

hambatan.⁹

Sementara itu pada awal tahun 1974 terjadi lonjakan harga minyak dari 2 dolar menjadi 14 dolar AS per barel. Krisis harga ini diikuti oleh kenaikan harga-harga komoditi primer lainnya. Masalah ini menyadarkan Jepang akan vitalnya persoalan suplai minyak. Jepang mengambil langkah-langkah tertentu dalam mengatasi krisis minyak bagi industrinya. Utusan-utusan tingkat tinggi disebarkan ke negara-negara penghasil minyak untuk dapat mengamankan kebutuhan dalam negeri. Delegasi tersebut pergi ke negara-negara Arab di Timur Tengah, sambil membuat perjanjian bagi pengembangan proyek-proyek domestik, seperti pendirian pabrik-pabrik penyulingan minyak, semen, pengecoran baja dan petrokimia.¹⁰ Kerja sama ini lebih memperbesar suplai bahan baku yang diperlukan Jepang.

Krisis minyak tersebut memaksa Jepang untuk meninggalkan posisi netralnya dalam pertikaian Arab-Israel dengan cara mendukung perjuangan negara-negara Arab atas wilayah yang diduduki Israel.¹¹ Langkah Jepang ini mendapat kecaman negara-negara industri Barat yang banyak mendukung kedudukan Israel dalam pertikaiannya dengan negara-negara Arab. Jepang mendapat sanksi berupa embargo sebagian alokasi minyak oleh The Seven Sisters (perusahaan minyak multinational yang menguasai hampir pangsa

⁹ *Ibid.*, h. 172-173.

¹⁰ Terutomo Ozawa, *Op. cit.*, h. 150.

¹¹ Susan Hattis Rolef, "The Changing Circumstances of Japan's Foreign Policy", *Asian Survey*, Nov. 1976, vol. XVI, h. 1041.

pasar yang ada).

Dalam waktu relatif singkat, Jepang mendapatkan komitmen negara-negara penghasil minyak bagi kebutuhan dalam negeri. Pada saat negara-negara maju masih bergelut dengan benar tidaknya kebijakan negara-negara eksportir minyak dalam menaikkan harga tersebut, Jepang sudah mendapatkan komitmen suplai minyak bagi kebutuhan domestik.

Setelah terjadi gejolak harga minyak yang tajam, neraca perdagangan Jepang pada tahun 1974-1975 mengalami defisit. Tetapi pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1978 surplus kembali. Kemudian tahun 1979-1980 mengalami defisit kembali, karena terjadi lagi lonjakan harga minyak ke dua yang harganya sampai 35 dolar AS per barel.

Krisis minyak kedua ini memaksa Jepang untuk mendapatkan minyak dengan menyebar delegasi tingkat tinggi ke berbagai negara. Delegasi tersebut pergi ke Mexico, Brazilia, beberapa negara Amerika Latin, negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Mereka mengadakan perundingan dalam kerja sama ekonomi bagi pembangunan domestik. Jepang memberikan pinjaman 125 juta dolar AS pada Mexico, sebulan kemudian PEMEX (Petroleum of Mexico, Perusahaan minyak Mexico yang dikuasai negara) menyuplai kebutuhan minyak Jepang 100.000 barel per harinya.¹²

Goncangan harga tersebut ternyata tidak melumpuhkan industri Jepang dalam waktu lama, karena dalam menjalankan

¹² Donald W. Klein, "Japan 1979 : The Second Oil Crisis, *Asian Survey*, Jan. 1980, vol. XVI, h. 43.

usahanya, industri-industri tersebut tidak mengalami kekurangan bahan baku yang diperlukan.

TABEL VIII*)
GNE JEPANG 1974 - 1980

dalam 100 juta Yen

TAHUN	J E P A N G		
	EKSPOR	IMPOR	G N E [*]
1974	162.079	180.764	1.339.217
1975	165.453	171.700	1.478.738
1976	199.346	192.292	1.656.947
1977	216.481	191.318	1.843.682
1978	205.558	167.276	2.027.080
1979	225.315	242.454	2.193.356
1980	293.825	319.953	2.357.339

GNE = Gross National Expenditure.

*) Sumber: The Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan 1979 - 1980. An annual abstract of official reports and statistics of Japanese Government*, h. 208.

Neraca perdagangan Jepang tersebut dapat dilihat dalam Tabel VIII di atas, dimana pengaruh harga komoditi bahan baku akan mempengaruhi nilai impor Jepang. Pada saat harga minyak naik dengan tajam, neraca perdagangan menjadi defisit, tetapi bila harga minyak tidak naik, maka neraca perdagangan Jepang mengalami surplus.

Pada bulan Juni 1975, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis. Timbul krisis kepercayaan terhadap AS dari negara-negara Asia Timur.¹³ Korea Selatan dan Taiwan merupakan dua negara yang

¹³ Susan Hattis Rolef, *Op. cit.*, h. 1036.

paling cemas dengan kejatuhan Vietnam Selatan tersebut.¹⁴ Mereka melihat jatuhnya Vietnam Selatan dapat melecut konflik ideologi yang ada di Asia Timur. Korea Selatan akan diserbu Korea Utara dan Taiwan akan dihadapkan dengan agresi RRC. Kedua negara ini meminta AS untuk tetap mendukung kepentingan-kepentingan mereka.

Beberapa bulan sebelum penarikan mundur pasukan AS dari Vietnam Selatan, Presiden Korea Utara Kim Il Sung melakukan kunjungan ke Beijing untuk membahas situasi yang ada di Vietnam. Kim ingin mempersatukan semenanjung Korea. RRC mengingatkan Kim agar tidak melaksanakan keinginan tersebut, sebab permasalahan semenanjung Korea pada masa itu berbeda dengan permasalahan pada masa Perang Korea 1950. Dimana ada perbedaan kemampuan ekonomi dan jumlah personil militer yang cukup mencolok. Korea Selatan dengan kemampuan industri yang melebihi Korea Utara, sedangkan dari segi militer, Korea Selatan memiliki personil sebanyak 600.000 orang, dibanding Korea Utara yang hanya memiliki kekuatan 520.000 personil saja.¹⁵

Komitmen AS untuk mendukung Korea Selatan dan Taiwan tetap diberikan dalam rangka menjaga status quo yang ada. Meskipun pada tahun 1969, Presiden Nixon mengumumkan doktrin Guam yang berisi rencana penarikan kekuatan militer AS dari Asia.¹⁶ Tetapi

¹⁴ William J. Barnds, "The United States, Japan and The Korean Peninsula, *Pacific Community*, vol. 8, no. 1, 1977, h. 67.

¹⁵ Chae Jin Lee, *Op. cit.*, h. 113.

¹⁶ Herbert Passin, Shimoda -The View from 1967. Herbert Passin and Akira Iriye (eds.), *Encounter at Shimoda: Search for a New Pacific Partnership*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1979), h. 8.

untuk menjaga keadaan status quo yang relatif sudah mapan seperti di Asia Timur ini, AS tetap memberikan dukungannya pada Korea Selatan dan Taiwan.¹⁷

Sementara itu Jepang meminta perlindungan AS dari serangan nuklir, baik dari RRC maupun US dan meminta AS untuk tetap mempertahankan Korea Selatan apabila ada serangan dari Korea Utara. Permintaan Jepang ini ditanggapi AS dengan menekan Jepang untuk meningkatkan beban pertahanan.¹⁸ Usulan AS ini ditolak, karena hal itu dianggap melanggar pasal 9 konstitusi yang ada. Sebagai kompensasi atas penolakan usulan AS tersebut, Jepang meningkatkan bantuan ekonomi bagi Korea Selatan.¹⁹ Bantuan tersebut mengalir deras berupa investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang di Korea Selatan setelah Jendral Park Chung Hee berkuasa.²⁰ Hal ini didasarkan pandangan, bila pembangunan ekonomi Korea Selatan berhasil akan mengurangi tekanan-tekanan fisik yang dilakukan Korea Utara. Dengan demikian akan dapat mengurangi tingkat ketegangan yang ada di semenanjung Korea dan dapat menciptakan stabilitas kawasan, karena semenanjung Korea ini adalah wilayah

¹⁷William J. Barnds, *Op. cit.*, h. 68. Chae Jin Lee, *Op. cit.*, h. 110.

¹⁸Franklin B. Weinstein, "United States-Japan Relations and The Fallacies of Burden Sharing", *Pacific Community*, Oct. 1977, vol. 9, no. 1, h. 2.

¹⁹Chae Jin Lee, *Op. cit.*, h. 29.

²⁰Terutomo Ozawa, *Op. cit.*, h. 32-33.

terdepan bagi keamanan Jepang.²¹

Cara pandang Jepang yang melihat stabilitas di Korea sebagai sesuatu yang vital lebih banyak karena kedekatan geografis. Hal ini terlihat dalam komunique Sato-Nixon, 1969, Jepang melihat keamanan Korea Selatan adalah "esensial bagi wilayah Jepang sendiri".²² Sedangkan masalah kepentingan ekonomi menjadi menonjol setelah Jepang menginvestasikan sebagian modalnya ke Korea Selatan. Dengan kedua kepentingan ini, setiap ada gejolak politik, baik internal atau agresi Korea Utara, Jepang tidak dapat menangani secara militer, karena kekuatan militer Jepang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk itu Jepang meminta AS agar AS tidak menarik diri dari Korea Selatan.

Tekanan-tekanan fisik Korea Utara atas Korea Selatan sebagai upaya penyatuan ke dua Korea sering menimbulkan masalah bagi Jepang, karena ada sekitar 600.000 orang keturunan Korea yang tinggal di Jepang. Afiliasi orang-orang Korea ini terpecah dua, sebagian untuk Korea Utara dan sebagian lagi untuk Korea Selatan.²³

Membaiknya hubungan AS-Cina dan Jepang-Cina menyebabkan Korea Utara kehilangan satu negara pendukungnya dalam menyatukan semenanjung Korea dengan segala macam cara.²⁴ Korea Utara hanya mengandalkan pada bantuan US untuk memenangkan persaingannya

²¹ Sheldon W. Simon, "Japan's Foreign Policy: Adjustments to A Changing Environment", *Asian survey*, July 1978, vol. XVIII, h. 673-674.

²² Joachim Glaubitz, *Op. cit.*, h. 38.

²³ William J. Barnds, *Op. cit.*, h. 77.

²⁴ Sheldon W. Simon, h. 673- 674.

dengan Korea Selatan, karena RRC sudah berbaikan dengan AS dan Jepang. Ke dua negara terakhir ini merupakan sekutu utama Korea Selatan, baik sebagai penyuplai persenjataan dan ekonomi.

Dalam pada itu hubungan Jepang dengan Korea Selatan diwarnai oleh beberapa peristiwa. Pada tahun 1973 ada insiden penculikan tokoh oposisi Korea Selatan Kim Dae Jung yang mengasingkan diri di Tokyo. Penculikan ini dilakukan agen-agen Korea Selatan (KCIA = Korea Central Intelligence Agency) dengan bantuan staf diplomatik Korea Selatan di Tokyo.²⁵

Insiden ini melecut krisis hubungan Jepang-Korea Selatan, karena hal itu dianggap melanggar etika diplomatik. Jepang mengurangi paket bantuan ekonomi ke Korea Selatan. Jepang menuntut pembebasan Kim Dae Jung dan permintaan maaf secara resmi Korea Selatan atas insiden tersebut. Untuk itu Jepang meminta PM Korea Selatan waktu itu, Kim Jong Pil menjelaskan masalah tersebut ke Jepang. Tekanan Jepang ini memberikan hasil dengan tidak dilaksanakannya eksekusi hukuman mati Kim Dae Jung, diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.²⁶

Pada tahun 1974 terjadi insiden percobaan pembunuhan Presiden Park Chung Hee, tetapi yang jadi korban adalah istrinya. Pembunuhan ini dilakukan agen Korea Utara yang dilatih di Jepang. Jepang dituduh ikut mendalangi peristiwa tersebut, tapi hal itu ditolak, karena percobaan pembunuhan itu adalah urusan dalam negeri Korea Selatan sendiri.

²⁵ William J. Barnds, *Op. cit.*, h. 72.

²⁶ Chae Jin Lee, *Op. cit.*, h. 94.

Dalam kunjungan untuk menyatakan bela sungkawa atas insiden tersebut, menlu Masayoshi Ohira menegaskan kembali bahwa Jepang tidak terlibat dengan masalah tersebut dan akan mengusut sampai tuntas masalah itu. Kemudian Jepang juga menjanjikan akan memberikan bantuan ekonomi yang lebih besar. Tetapi Korea Selatan tidak mau menerima begitu saja dan tetap menuntut Jepang supaya memberikan penjelasan lebih lanjut.

Kajadian ini melecut lagi krisis diplomatik kedua negara, tetapi akhirnya mereda setelah Jepang menawarkan sejumlah

TABEL IX*)
ANGGARAN PERTAHANAN JEPANG 1970-1980

Dalam milyar yen.

Tahun Anggaran.	Produk Nasional Kotor (GNP)	Anggaran Pertahanan	Rasio Angg. Pertahanan dgn. GNP	Pertumbuhan Angg. Pertahanan dari tahun sebelumnya.
1970	72.440,0	569,5	0,79	17,7
1971	84.320,0	670,9	0,80	17,8
1972	90.550,0	800,2	0,88	19,3
1973	109.800,0	935,5	0,85	16,9
1974	131.500,0	1.093,0	0,83	16,8
1975	158.500,0	1.327,3	0,84	21,4
1976	168.100,0	1.512,4	0,90	13,9
1977	192.850,0	1.690,6	0,88	11,8
1978	210.600,0	1.901,0	0,90	12,4
1979	232.000,0	2.094,5	0,90	10,2
1980	247.800,0	2.230,2	0,90	6,5

*) Sumber : *Defence of Japan 1981*. Dalam Yukio Satoh, "The Evolution of Japanese Security Policy", *The International Institute for Strategic Studies, Adelphi Papers*, no. 178, h.43.

paket bantuan ekonomi lebih besar pada Korea Selatan. Disini terlihat bahwa Jepang dapat mempengaruhi kebijakan negara lain

dengan menggunakan instrumen ekonomi sebagai alat penyelesaian masalah.

Meskipun mendapat tekanan AS atas biaya pertahanan, Tingkat pertumbuhan anggaran pertahanan setiap tahunnya cenderung menurun, walaupun dalam nilai totalnya, besar anggaran pertahanan Jepang mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel IX yang memperlihatkan pengeluaran anggaran pertahanan Jepang setiap tahun, mulai tahun 1970 sampai tahun 1980.

Dengan melihat pada Tabel IX di atas, nampak bahwa anggaran pertahanan Jepang 1970 - 1972 terjadi perubahan yang menaik, kemudian turun lagi pada tahun 1973-1974. Pada tahun 1975 terjadi pertumbuhan tertinggi sebesar 21,4%. Padahal pada tahun 1975 ini keadaan ekonomi Jepang mengalami pukulan, terutama akibat melonjaknya harga minyak pada awal tahun 1974. Setelah tahun 1975 hingga tahun 1980, pertumbuhan anggaran pertahanan Jepang mengalami penurunan dan mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 1980 yaitu sebesar 6,5%. Anggaran pertahanan tahun 1980 ini kurang mencerminkan kecemasan Jepang atas permasalahan internasional yang melingkupinya.

Tabel IX tersebut mencerminkan gambaran akan keteguhan Jepang untuk tetap mempertahankan anggaran pertahanan tidak lebih dari 1% GNP.

Pada tahun 1978 atas persetujuan US, Vietnam melakukan serangan ke Kamboja untuk menjatuhkan rejim Khmer Merah dukungan RRC. Sedangkan pada bulan Januari 1979, pemimpin Cina Deng Xiaoping sewaktu singgah di Tokyo, sehabis lawatannya ke AS dan

negara-negara Eropah Barat, menyatakan bahwa Cina akan memberi pelajaran Vietnam atas serbuannya ke Kamboja tersebut.

Tidak lama setelah balik kenegerinya, terjadi serangan Cina pada Vietnam seperti yang dinyatakan Deng di Tokyo. Konflik ini menimbulkan kecemasan bagi negara-negara di Asia Timur. Langkah Cina ini diikuti dengan peningkatan kekuatan militer US di perbatasan dengan RRC. US menekan agar Cina cepat menghentikan langkah itu kalau tidak mau terlibat konflik yang lebih serius antara kedua negara.²⁷

Masalah ini menimbulkan kecemasan Jepang karena persepsi US yang melihat Jepang sebagai salah satu sekutu Cina dalam menghadapi US, seperti penandatanganan klausul anti hegemoni yang dimotori RRC.

Pada akhir tahun 1979 US melakukan serbuan ke Afghanistan untuk mempertahankan rejim yang didukungnya. Langkah ini mendapat kecaman keras dari negara-negara industri. Jepang sebagai salah satu anggotanya ikut mengecam dengan keras. Langkah US ini dikuatirkan akan diikuti dengan langkah selanjutnya terhadap negara-negara tetangganya.

Langkah US di Afghanistan, serbuan Vietnam ke Kamboja dengan dukungan US, dan peningkatan kekuatan militer US di Asia Timur semakin mencemaskan Jepang, karena sebagai negara paling kecil jumlah personil militernya, Jepang akan mudah ditaklukkan US. Kecemasan itu berkurang selama komitmen AS terhadap Jepang

²⁷ Richard Holbroke, East Asia: The Next Challenge, *Foreign Affairs*, Spring 1986, h. 734-735.

tetap tidak berubah.

MENENANGKAN KECEMASAN POLITIK INTERNAL

Politik internasional mengalami perubahan sejak tahun 1970. Perubahan kebijakan politik AS terhadap RRC, kebijakan ekonomi AS yang mulai memperlihatkan gejala proteksionistis, melonjaknya harga minyak di pasaran dunia dan perubahan-perubahan koalisi di Asia Timur sebagai akibat membaiknya hubungan AS-RRC.

Perbaikan hubungan antara 3 kekuatan (AS, RRC dan Jepang), menyebabkan berubahnya sikap US atas bentuk koalisi tersebut. Perubahan ini dapat dilihat dengan ditingkatkannya kekuatan militer US di kawasan Asia Timur ini. Semakin bertambahnya armada Pasifik US yang berpangkalan di Vladivostok, sehingga dilihat dari jumlah tonasenya sudah melebihi armada Pasifik AS.²⁸ Sedangkan di darat ada penambahan pasukan di perbatasan utara Jepang yang berkekuatan 2 divisi.²⁹ Kesemuanya ini mempengaruhi secara mendalam persepsi masyarakat Jepang atas masalah-masalah internasional. DHARMA, WASPADA

Meskipun untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara berarti pemerintah Jepang mendapat dukungan internal, baik dari kalangan elit Partai Liberal Demokrat, Partai Sosialis Jepang, Partai Kejujuran (Komeito) dan partai-partai lainnya, kecuali

²⁸ Admiral Elmo Zumwalt and Worth H. Bagley, "Strategic Deterioration in The Pacific: The Dilemma for The U.S. and Japan," *Pacific Community*, Jan. 1978, vol. 9, no. 2, h. 117.

²⁹ The Institute for The Study of Conflict, "Japan's Triangular Diplomacy", *Conflict Studies*, no. 129, April 1981, h. 16.

Partai Komunis Jepang,³⁰ tetap saja Jepang memepertahankan batas anggaran tidak lebih dari 1% GNP. Dalam masalah dukungan, hanya Partai Liberal Demokrat yang merinci apa yang akan dilakukan dengan anggaran pertahanan yang meningkat itu. Partai-partai lainnya masih belum sejauh itu, tapi secara moral sudah menyatakan dukungannya. Hal ini berbeda dengan sikap yang diambil sebelumnya yaitu menolak peningkatan anggaran pertahanan.

Jepang juga mendapat dukungan dari RRC dan AS untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Bagi RRC, dengan militer Jepang yang kuat diharapkan dapat menandingi hegemonisme US di Asia Timur. Sedangkan bagi AS, hal itu berkaitan dengan masalah beban pertahanan yang tidak seimbang diantara kedua negara.³¹ Dengan Jepang yang kuat secara militer, AS dapat melepaskan sebagian beban pertahanan regional dari Asia Timur.³²

Tapi dalam kenyataannya sampai tahun 1980 anggaran pertahanan Jepang tidak pernah melebihi 1% GNP-nya. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama : Pertama, Keterlibatan AS di banyak kawasan dunia atas masalah-masalah yang dihadapi sekutu-sekutunya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus blokade Berlin barat yang terletak di Jerman Timur oleh US. Kasus perang Korea dan perang Vietnam adalah gambaran dari keterlibatan AS dalam masalah yang sama. Betapa seriusnya AS mempertahankan status quo wilayah-

³⁰ Takahashi Susumu, "Japan's Security and Public Opinion", *Japan Quarterly*, vol. 1, No. 1, January - March 1961, h. 57.

³¹ Franklin B. Weinstein, *Op. cit.*, h. 8.10.

³² *Ibid.*, h. 11.

wilayah tersebut. Jepang yang dilihat AS sebagai sekutu utama di Asia tentu tidak dibedakan dengan sekutu-sekutu AS lainnya.

Keterlibatan AS dalam suatu peperangan untuk membantu sekutunya membuat Jepang sadar akan konsistensi AS dalam memegang komitmen terhadap sekutu-sekutunya. Dengan alasan ini adalah rasional bila tidak terlalu melebih-lebihkan kekuatan US yang mengancam teritorial Jepang, karena setiap serangan US pasti akan dihadapi AS.

Setiap serangan US atas Jepang tidak akan efektif bila menggunakan kekuatan militer konvensional. Hal itu akan membuat perang menjadi berlarut-larut, sehingga memberi Jepang kesempatan untuk mentransformasikan industrinya menjadi industri militer. Kemungkinan paling rasional bila US ingin memenangkan perang dengan Jepang adalah dengan menggunakan senjata nuklir. Tetapi yang menjadi persoalan adalah atas masalah gawat apakah sampai senjata itu dipergunakan terhadap Jepang ? Padahal dalam menghadapi US, Jepang lebih banyak mendasarkan pada sarana dialog dalam memecahkan masalah yang ada.

Setiap penggunaan senjata nuklir akan merumitkan permasalahan yang ada. Penggunaan tersebut akan mencemaskan negara lain, karena akibat dari penggunaan senjata tersebut sangat mengerikan bagi umat manusia. Dalam masalah Jepang, AS tidak akan tinggal diam dengan timbulnya krisis tersebut. Jepang sebagai sekutu utama di Asia akan dibantu dalam menghadapi serangan nuklir US.

Kedua, dengan meningkatnya anggaran pertahanan bukan

tidak ada konsekwensinya. Setiap anggaran pertahanan yang naik secara menyolok akan menaikkan pula masalah-masalah yang melekat dengan peningkatan itu. Hal ini akan meningkatkan pula jumlah personil dan peralatannya, sehingga semakin memperbesar pengaruh militer atas masalah-masalah politik yang ada.

Dengan meningkatnya peran militer, maka ada perubahan persepsi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Jepang. Penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi masalah internasional akan melicinkan jalan bagi dominasi militer di pentas politik Jepang.

Juga tidak ada hubungan positif antara peningkatan kekuatan pertahanan dengan meningkatnya keamanan suatu negara. Suatu peningkatan pertahanan menyolok akan meningkatkan pula kekuatan pertahanan negara lain, sehingga hal ini akan meningkatkan perlombaan senjata. Seperti yang dikatakan Miki Takeo, pengganti PM Tanaka:

However, for Japan to acquire such vast nuclear weapons would lead to its destruction. Their acquisition would be not only economic waste, but would arouse great suspicion and distrust throughout the world and would heighten international tensions. I do not contention that Japan needs nuclear weapons to make its voice heard internationally. The strength of a nation's voice does not depend upon the backing nuclear armaments but on whether that voice is rationally persuasive. (Bagaimanapun juga, bagi Jepang untuk memperoleh senjata nuklir yang besar akan mengarahkan dirinya kearah kehancuran. Perolehan senjata nuklir ini, tidak hanya secara ekonomi percuma saja, tapi akan membangkitkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari seluruh dunia dan akan meninggikan ketegangan internasional. Saya tidak dapat menerima anggapan bahwa Jepang perlu senjata nuklir untuk membuat suaranya di dengar di dunia internasional. Kekuatan pengaruh suatu bangsa tidak tergantung pada dukungan persenjataan nuklir

tapi pada kemampuan membujuk negara lain).³³

68

Hal Ketiga, berkaitan dengan kemampuan ekonomi Jepang. Kemampuan ekonomi itu dapat menetralsisir potensi konflik terbuka, dengan carakerja sama ekonomi. Negara penerima bantuan ekonomi akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya, sedangkan Jepang tetap dapat mempertahankan kebutuhan dasarnya akan bahan baku dan perluasan pasar.

Dengan menggunakan strategi Develop and Import (DI), Jepang mengadakan kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang kaya akan sumber-sumber alam. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun pabrik-pabrik bagi eksploitasi sumber-sumber tersebut yang kemudian diekspor ke Jepang untuk diproses lebih lanjut.

Dengan ke tiga alasan dasar itu, Jepang tetap mengkonsentrasikan dirinya pada persoalan-persoalan ekonomi yang ada. Tekanan-tekanan yang menginginkan untuk meningkatkan anggaran pertahanan selalu diabaikan. Hal itu dapat dilihat dalam pengeluaran anggaran pertahanan yang selalu lebih kecil dari 1% GNP.

Pertumbuhan dan produktifitas yang meningkat, perluasan ekspor dan kerja sama ekonomi adalah kata-kata kunci dalam melihat keberhasilan Jepang. Perubahan kemampuan ekonomi itu menghasilkan dilema, disatu pihak mendapat kecaman keras, seperti dari AS dan negara-negara Eropah Barat, tapi bagi negara lain bantuan Jepang sangat dibutuhkan. Korea Selatan dan Taiwan tetap membutuhkan

³³ Miki Takedo, "Future Japanese Diplomacy", *Japan Quarterly*, vol. XX, No. 1, January-March, 1973, h. 23.

kerja sama ekonomi dalam bentuk bantuan ekonomi maupun transfer teknologi.

Tarikan negara-negara Asia Timur ini dapat digunakan sebagai senjata untuk menekan mereka agar mengurangi ancaman terhadap Jepang. Pilihan Jepang lebih banyak dalam proses negosiasi masalah ekonomi.

TABEL X*)
TINGKAT PERTUMBUHAN EKSPOR - IMPOR JEPANG DENGAN BEBERAPA
NEGARA DI ASIA TIMUR 1974 - 1980

NEGARA	Tingkat Pertumbuhan Ekspor Jepang ke	Tingkat Pertumbuhan Impor Jepang dari
AS	11 %	7,0 %
US	11,8 %	0,4 %
RRC	11,9 %	17,0 %
KORSEL	8,0 %	6,9 %
TAIWAN	12,3 %	11,1 %

*) Sumber: The Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan 1979 - 1980. An annual abstract of official reports and statistics of Japanese Government*, h. 208.

Perubahan drastis yang dapat mengubah Jepang adalah perubahan mendasar dalam hubungan Jepang-AS. Selama hubungan Jepang-AS masih dapat dikendalikan, maka tidak ada perubahan-perubahan drastis yang terjadi.

Selama AS tidak merubah persepsinya terhadap Jepang sebagai sekutu utama di Asia, maka Jepang relatif aman dari tekanan US dan RRC. Jepang akan mendapat perlindungan AS sebagai implementasi Perjanjian Keamanan Saling Menguntungkan (Mutual Security Treaty) 1970.

Musuh potensial yang dapat mengancam keamanan Jepang hanyalah US. Jepang dengan US ini mempunyai 5 masalah yang belum

terselesaikan. 5 masalah itu adalah: *Pertama*, masalah perundingan perjanjian perdamaian. Meskipun Jepang dan US telah mengadakan hubungan diplomatik semenjak tahun 1956, tapi diantara kedua negara belum ditandatangani perjanjian perdamaian. *Kedua*, masalah pertikaian tentang 4 pulau di utara Jepang, yaitu Habomai, Kunashiri, Etorofu dan Shikotan. *Ketiga*, masalah kerja sama ekonomi dalam pembangunan kawasan Siberia yang kaya akan sumber mineral dan sangat dibutuhkan Jepang. *Keempat*, adanya kecurigaan AS dan RRC dalam hubungan baik Jepang-US. *Kelima*, masalah daerah penangkapan ikan dalam kaitannya dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³⁴

Dari kelima masalah dengan US itu, masalah yang paling menonjol adalah sengketa kepulauan di sebelah utara. Penyelesaian atas masalah ini adalah tujuan utama pemerintah Jepang dalam hubungannya dengan US. Tetapi US tetap tidak mau merundingkan masalah tersebut dengan Jepang, karena wilayah itu dianggap sudah menjadi bagian US.

Tekanan Jepang atas masalah ini lebih bersifat diplomatik. Jepang tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan militer, karena kekuatan militer Jepang kecil sekali bila dibandingkan dengan US. Disamping itu Jepang tidak memiliki kekuatan nuklir untuk menyelesaikan masalah dengan segera.

³⁴ Harrison M. Holland, "The U.S. - Japan Alliance, A Post Vietnam Assessment", *Pacific Community, An Asian Quarterly Review*, January, 1976, vol. 7, no. 2, h. 207.

BAB IV

KESIMPULAN

Keberhasilan Jepang dalam membangun ekonomi pada dekade 1970-an, tidak bisa dilepaskan dari peranan AS dalam masa-masa krisis antara tahun 1945-1951. Pada masa tersebut AS dapat memenuhi kebutuhan dasar Jepang, baik berupa makanan atau bahan baku bagi keperluan industri.

Kebijakan AS ini menimbulkan harapan Jepang dalam mengatasi persoalan-persoalan internal sebagai akibat PD II, seperti masalah hiperinflasi, pengangguran, kekurangan bahan makanan, kemacetan industri dan banyak lagi masalah lain yang memberatkan Jepang.

Dukungan AS ini tidak disia-siakan, Jepang merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam wujud: *Pertama*, menjadikan ekonomi sebagai masalah paling utama ("Economic First" principle), *kedua*, melakukan kebijakan yang berorientasi pada produksi, *ketiga*, memperluas industri-industri berat, *keempat*, mendorong ekspor.

Keempat pilihan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat Jepang, sehingga hasilnya menakjubkan. Sampai tahun 1973 pertumbuhan ekonomi Jepang melebihi 10% setiap tahun, tetapi sejak tahun 1974 ekonomi Jepang tidak dapat tumbuh sebesar 10% per tahun lagi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur

ekonomi internasional yang ada, baik karena kebijakan AS dengan New Economic Policy (NEP) atau kenaikan harga minyak yang tinggi pada akhir tahun 1973 oleh negara-negara pengekspor minyak (OPEC).

Strategi yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 1950-an dan 1960-an mendapatkan "momentum" perkembangan lebih besar dengan adanya perang Korea dan perang Vietnam. Pada perang Korea, 1950-1952, Jepang menikmati keuntungan dengan meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan perang tersebut. Mereka menamakan dengan sebutan Jimmu Boom. Sedangkan keuntungan yang dinikmati selama perang Vietnam tidaklah sebesar keuntungan yang dinikmati selama perang Korea. Keberuntungan yang dinikmati pada dekade 1950-an dan 1960-an ini telah memperkuat ekonomi Jepang pada dekade 1970-an.

Pada dekade 1970-an terjadi perubahan ekonomi internasional. AS menjalankan kebijakan yang semakin proteksionistis dengan memberikan hambatan bagi barang-barang impor dengan mengenakan tambahan biaya 10%. Kebijakan ini mempengaruhi Jepang, karena AS adalah pasar terbesar bagi barang-barang Jepang. Pengenaan biaya ini menurunkan permintaan akan barang-barang Jepang, tetapi pada saat yang sama, industri Jepang sudah bersifat padat modal dengan menggunakan teknologi tinggi, seperti industri elektronika, automobile dan sebagainya, sehingga Jepang tetap dapat mempertahankan bagian pasar di AS yang besar. Kemerosotan ekspor Jepang di satu sektor (padat tenaga) dapat digantikan kedudukannya dengan barang-barang hasil teknologi tinggi.

Hasil dari memburuknya perdagangan AS-Jepang membuat AS semakin keras menekan Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Tekanan ini mulai terlihat dalam Doktrin Guam, 1969, yang dikemukakan Nixon. AS ingin menarik semua pasukannya dari daratan Asia. Seperti juga keinginan Presiden Carter (1976-1980) untuk menarik pasukan AS dari Korea Selatan.

Kebijakan AS untuk menarik pasukan dari daratan Asia dapat mengguncang Jepang, karena kebutuhan akan keamanan jalur suplai bahan baku menuju Jepang atau kestabilan semenanjung Korea sebagai wilayah terpenting bagi keamanan Jepang menekan Jepang untuk memikirkan masalah pertahanannya.

Tekanan AS agar Jepang menaikkan anggaran pertahanan selalu diabaikan, karena masalah peningkatan kekuatan pertahanan akan menimbulkan sejumlah permasalahan domestik dan kawasan. Jepang yang kuat secara militer bukan berarti menjamin, tetapi justru hal tersebut dapat meningkatkan perlombaan persenjataan.

Masalah ancaman ketidakstabilan kawasan yang sukar dihadapi Jepang berasal dari US. Sedangkan dari RRC atau Korea Utara tidak demikian, karena bobot politik kedua negara yang disebut terakhir tidak besar.

US sebagai negara adi daya dengan kekuatan nuklir sebanding AS adalah ancaman berarti bagi Jepang. Persoalannya diletakkan pada keberanian US dalam menggunakan senjata nuklir bila terjadi perang dengan Jepang. Tanpa penggunaan senjata nuklir yang ada, ancaman US menjadi kurang efektif.

Untuk mengurangi ancaman senjata nuklir US, Jepang

selalu mengadakan dialog dengan US bagi pemecahan masalah yang ada. Masalah paling penting Jepang-US adalah sengketa atas kepulauan di sebelah Utara, yaitu kepulauan Kunashiri, Habomai, Etorofu dan Shikotan. Sedangkan masalah-masalah lain tidak sepenting masalah sengketa kepulauan tersebut. Hal ini membuat Jepang dapat memusatkan diri pada masalah-masalah ekonomi.

Tekanan pada masalah ekonomi inilah yang membuat Jepang dapat berhasil mencapai strategi pembangunan ekonomi. Keberhasilan ini membawa konsekwensi bagi peningkatan peran dalam dunia internasional. Jepang ditarik untuk menjadi sekutu salah satu negara yang bertentangan, seperti tarikan RRC kepada Jepang untuk memusuhi US atau tawaran ekonomi US yang menarik agar Jepang menjauhkan diri dari ikatan dengan RRC.

Tarikan dari negara-negara yang saling bertentangan ini membuat Jepang dapat memilih alternatif lebih banyak bagi perkembangan ekonomi domestiknya.

Tawaran US untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam di Siberia akan memberi keuntungan Jepang dengan semakin tersedianya suplai bahan baku yang diperlukan Jepang. Tawaran US ini menjadi berkurang artinya setelah RRC menawarkan hal yang sama. Jepang dapat memilih tawaran-tawaran tersebut.

Kemampuan ekonomi Jepang yang besar membuat Jepang dapat berunding untuk masalah bahan baku di negara-negara yang jauh dari Jepang, seperti Amerika Latin, Timur Tengah atau Afrika. Jadi tawaran yang diberikan pada Jepang oleh US atau RRC dapat dikompensasi Jepang dari negara-negara lain. Hal itu dapat menekan

kekuatan tawar US atau RRC dalam masalah tersebut. Tanpa kemampuan ekonomi yang besar, Jepang tidak akan dapat menekan kekuatan tawar US atau RRC atas bahan baku yang dimiliki.

Konsistensi sikap AS dalam membantu sekutu-sekutunya membuat Jepang tidak kuatir atas tekanan US (selama US tidak menggunakan kekuatan nuklir), karena setiap serangan US akan berhadapan dengan tindakan balasan dari AS.

Selama tidak ada perubahan kebijakan yang dijalankan AS, strategi Jepang tidak akan banyak berubah, sehingga Jepang dapat mengkonsentrasikan diri pada masalah-masalah ekonomi. Hal ini dapat mengalihkan kekuatan pertahanan menjadi kekuatan yang dapat membangun ekonomi negara-negara yang menjadi sekutu AS di Asia Timur, seperti Taiwan, Korea Selatan dan RRC.

Kepentingan Jepang akan masalah ekonomi dapat dipenuhi selama ada jaminan keamanan AS. Hal ini mulai berubah dengan semakin timpangnya neraca perdagangan kedua negara. AS mulai menekankan kepentingan sendiri, sedangkan Jepang mulai menyadari akan bahaya ketimpangan lebih besar.

Peranan Jepang di Asia Timur bagi negara-negara sekutu AS (Korea Selatan dan Taiwan) adalah pendukung pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Dengan mentransfer modal dan teknologi yang dibutuhkan, Jepang mengisi kekosongan yang tidak dipenuhi AS dalam menyuplai kebutuhan negara-negara ini.

Dukungan Jepang bagi Korea Selatan dan Taiwan sangat penting, karena nilai investasi modal yang ditanam Jepang adalah nomor 1 dibanding investasi negara-negara lain, termasuk AS.

Dilihat dari segi besarnya modal yang ditanam, wajar kalau Jepang cemas akan krisis yang melanda negara-negara ini, tetapi dengan komitmen AS untuk menciptakan kestabilan di kawasan ini kecemasan Jepang itu mereda.

Jepang dalam memanfaatkan keuntungan dengan negara-negara Asia Timur berlindung dibalik Perjanjian Keamanan AS-Jepang yang memberikan beban lebih besar pada AS. Dengan perlindungan AS, Jepang dapat mengkonsentrasikan pada pembangunan ekonomi, tanpa terlalu mempersoalkan masalah pertahanan.

Jepang menjadi penting bagi negara lain, karena kemampuan ekonomi yang besar. Jepang ditawarkan kerja sama ekonomi yang menguntungkan dan sekaligus diajak berkoalisi untuk melawan salah satu negara yang dianggap musuh.

Dalam menghadapi konflik Korea Selatan-Korea Utara, sikap Jepang jelas mendukung Korea Selatan. Hal ini disebabkan bobot politik kedua negara ini bukan ancaman bagi Jepang. Hal ini berbeda dengan sikap Jepang dalam pertentangan US-RRC, dimana sikap Jepang tidak jelas mendukung negara mana, karena kedua negara ini relatif dapat mengancam secara serius wilayah Jepang, terutama US.

Terlihat bahwa instrumen ekonomi dalam politik luar negeri Jepang sangat dominan terutama dalam hal penyediaan bahan baku dan perluasan pasar. Sedangkan negara-negara mitra Jepang melihat tawaran tersebut sebagai suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi domestik. Dengan demikian Jepang dilihat oleh negara-negara lain sejauh kemampuan Jepang mendukung

kebijakan ekonomi suatu negara. Kemampuan ekonomi Jepang yang besar itu menciptakan kaitan kepentingan ekonomi dengan masalah politik, sehingga permasalahan ekonomi bilateral dapat diangkat menjadi masalah politik. Disitulah Jepang terlibat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- DeGrasse, Robert W. *Military Expansion Economic Decline : The Impact of Military Spending on U.S Economic Performance*. New York : M.E Sharpe, Inc, 1983.
- Encyclopedia Britannica, Macropedia, vol. 10, 1980.*
- Hohenberg, John, *New Era in the Pacific : An Adventure in Public Diplomacy*. New York : Simon and Schuster, 1972.
- Holsti, K.J., *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977, cet. ke-2, 1977.
- Hopkins, Raymond F. & Richard W. Mansbach, *Structure and Process in International Politics*. New York, Evanston, San Francisco, London: Harper and Row Publisher, 1973.
- Japan External Trade Organization, *White Paper on International Trade, Japan 1982*. Tokyo: JETRO, 1982.
- Japan Institute of International Affairs, *White Papers of Japan, 1973-1974, Annual Abstract of Official Reports and Statistics of The Japanese Government*. Tokyo: Japan Institute of International Affairs, 1974.
- _____, *White Papers of Japan, 1976-1977*.
- Kataoka, Tetsuya, *Waiting For A "Pearl Harbor": Japan Debates Defense*. Stanford University, Stanford, California: Hoover Institution Press, 1980.
- Kedutaan Besar Jepang Jakarta, *Jepang Sebuah Pedoman Saku*. Jakarta: Kedutaan Besar Jepang, 1985.
- Knorr, Klaus, *Power, Strategy, and Security*. New Jersey : Princeton University Press, 1983.
- Kunio, Yoshihara, *Perkembangan Ekonomi Jepang: Sebuah Pengantar*. terj., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Penerbit Gramedia, 1983.
- Lach, Donald F. and Edmund S. Wehrle, *International Politics in East Asia Since World War II*. New York : Praeger Publisher, 1975.

- Lee, Chae Jin and Hideo Sato, *U.S. Policy Toward Japan and Korea: A Changing Influence Relationship*. New York: Praeger Publisher, 1982.
- MITI, *Japan in World Economy ; Japan Foreign Economic Policy for the 1970's*. Tokyo : Press International Ltd, 1972.
- _____, *White Paper of International Trade 1979*. Tokyo: MITI, 1979.
- Manullang, M. Drs., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Ghalia, 1980.
- Martin, Edwin M., *The Allied Occupation of Japan*. New York: American Institute of Pacific Relation, 1948.
- Morley, James William, *Forecast for Japan : Security in the 1970's* New Jersey : Princeton University Press, 1972.
- Ohkawa, Kazushi and Henry Rosovsky, *Japanese Economic Growth ; Trend Acceleration in the Twentieth Century*. California : Stanford University Press, 1973.
- Okita, Saburo, *Japan in the World Economy*. Tokyo: The Japan Foundation, 1975.
- Ozawa, Terutomo, *Multinationalism, Japanese Style ; The Political Outward Dependency*. New Jersey : Princeton University Press, 1979.
- Passin, Herbert and Akira Iriye. eds., *Encounter at Shimoda: Search for a New Pacific Partnership*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1979.
- Richardson, Bradley M. and Scott C. Flanagan, *Politics in Japan*. Boston : Little, Brown and Company, 1984.
- Scalapino, Robert A (ed.), *The Foreign Policy of Modern Japan*. Berkeley: University of California Press, 1977.
- Shiratori, Rei. *Japan in the 1980's* Tokyo : Kodansha International Ltd, 1982.
- Sills, David L. (ed.), *International Encyclopedia of The Social Sciences*, vol. 1 New York: The Macmillan Company & The Free Press, London: Collier Macmillan Publisher, 1980.
- Tsurutani, Taketsugu, *Political Change in Japan ; Response to Post Industrial Challenge*. New york : David Mac Kay Company, 1977.

_____, *The Politics of National Development : Political Leadership in Transitional Societies*. New York : Chandler Publishing Company, 1973.

Tow, William T. and William R. Feeney, *U.S. Foreign Policy and Asian-Pacific Security . A Transregional Approach*. Colorado : Westview Press, 1982.

Yanaga, Chitoshi, *Big Business in Japanese Politics*. New Haven : Yale University Press, 1971.

Young, Alexander K., *The Sogo Shosha : Japan's Multinational Trading Companies*. Colorado : Westview Press, 1979.

Majalah

Adelphi Papers, no. 173, 1982.

Asian Survey, vol. XII, no. 1, Nov. 1972.

_____, vol. XII, no. 11, 1973.

_____, vol. XVI, , Jan. 1976.

_____, vol. XVIII, 1978.

_____, vol. XXVII no. 5, May 1987.

_____, vol. XVIII no. 7, July 1987.

Australian Outlook, vol. 30, no. 3, Dec. 1976.

Conflict Studies, no. 129, April 1981.

Foreign Affairs, Spring 1986.

Orbis, A Journal of World Affairs, Summer 1985.

Japan Quaterly, vol. XX, Jan. - March 1973.

_____, vol. I , no.1, Jan. - March 1981.

Pacific Affairs, vol. 53, no.2, 1980.

_____, vol. 53, no.4, Winter 1984-1985.

_____, vol. 58, no.3, Fall 1985.

Pacific Community, vol.6, no.4, July 1975.

_____, vol.7, no.2, Jan. 1976.

_____, vol.8, no.1, 1977.

_____, vol.9, no.1, Oct. 1977.

_____, vol.9, no.2, Jan. 1978.

_____, no.12, Spring 1981.

United Malayan Banking Corporation (UMBC), *Economic Review*, vol.XV, no. 2, 1979.

fluence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.

(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.

(8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.

(10) We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.

(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the execution of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.

(12) The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefully inclined and responsible government.

(13) We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.

Lampiran I

The Potsdam Proclamation

July 26, 1945

(1) WE—THE PRESIDENT of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war.

(2) The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This military power is sustained and inspired by the determination of all the Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to resist.

(3) The result of the futile and senseless German resistance to the might of the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an example to the people of Japan. The might that now converges on Japan is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of life of the whole German people. The full application of our military power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland.

(4) The time has come for Japan to decide whether she will continue to be controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of annihilation, or whether she will follow the path of reason.

(5) Following are our terms. We will not deviate from them. There are no alternatives. We shall brook no delay.

(6) There must be eliminated for all time the authority and in-

Lampiran II

The Constitution of
Japan

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.

We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.

We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.

CHAPTER I. THE EMPEROR

Article 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.

Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

Article 3. The advice and approval of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.

Article 4. The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.

The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may be provided by law.

Article 5. When, in accordance with the Imperial House Law, a Regency is established, the Regent shall perform his acts in matters of state in the Emperor's name. In this case, paragraph one of the preceding article will be applicable.

Article 6. The Emperor shall appoint the Prime Minister as designated by the Diet.

The Emperor shall appoint the Chief Judge of the Supreme Court as designated by the Cabinet.

Article 7. The Emperor, with the advice and approval of the Cabinet, shall perform the following acts in matters of state on behalf of the people:

Promulgation of amendments of the constitution, laws, cabinet orders and treaties.

Convocation of the Diet.

Dissolution of the House of Representatives.

Proclamation of general election of members of the Diet.

Attestation of the appointment and dismissal of Ministers of State and other officials as provided for by law, and of full powers and credentials of Ambassadors and Ministers.

Attestation of general and special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.

Awarding of honors.

Attestation of instruments of ratification and other diplomatic documents as provided for by law.

Receiving foreign ambassadors and ministers.

Performance of ceremonial functions.

Article 8. No property can be given to, or received by, the Imperial House, nor can any gifts be made therefrom, without the authorization of the Diet.

CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR

Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 10. The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.

Article 11. The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.

Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

Article 14. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations, because of race, creed, sex, social status or family origin.

Peers and peerage shall not be recognized.

No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

Article 15. The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof.

Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election of public officials.

In all elections, secrecy of the ballot shall not be violated. A

voter shall not be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

Article 16. Every person shall have the right of peaceful petition for the redress of damage, for the removal of public officials, for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations and for other matters; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.

Article 17. Every person may sue for redress as provided by law from the State or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.

Article 18. No person shall be held in bondage of any kind, involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.

Article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated.

Article 20. Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.

No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.

The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.

No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

Article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.

Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

Article 23. Academic freedom is guaranteed.

Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.

With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.

Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.

Article 26. All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.

Article 27. All people shall have the right and the obligation to work.

Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.

Children shall not be exploited.

Article 28. The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.

Article 29. The right to own or to hold property is inviolable.

Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.

Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.

Article 30. The people shall be liable to taxation as provided by law.

Article 31. No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.

Article 32. No person shall be denied the right of access to the courts.

Article 33. No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent judicial officer which specifies the offense with which the person is charged, unless he is apprehended, the offense being committed.

Article 34. No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

Article 35. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized, or except as provided by Article 33.

Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer.

Article 36. The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.

Article 37. In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.

He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.

At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State.

Article 38. No person shall be compelled to testify against himself.

Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence.

No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

Article 39. No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy.

Article 40. Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained, may sue the State for redress as provided by law.

CHAPTER IV. THE DIET

Article 41. The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.

Article 42. The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.

Article 43. Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.

The number of the members of each House shall be fixed by law.

Article 44. The qualifications of members of both Houses and their electors shall be fixed by law. However, there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income.

Article 45. The term of office of members of the House of Representatives shall be four years. However, the term shall be terminated before the full term is up in case the House of Representatives is dissolved.

Article 46. The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.

Article 47. Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.

Article 48. No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

Article 49. Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.

Article 50. Except in cases provided by law, members of both Houses shall be exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the House.

Article 51. Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House.

Article 52. An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.

Article 53. The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.

Article 54. When the House of Representatives is dissolved, there must be a general election of members of the House of Representatives within forty (40) days from the date of dissolution, and the Diet must be convoked within thirty (30) days from the date of the election.

When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency session.

Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period of ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.

Article 55. Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members present.

Article 56. Business cannot be transacted in either House unless one-third or more of total membership is present.

All matters shall be decided, in each House, by a majority of those present, except as elsewhere provided in the Constitution, and in case of a tie, the presiding officer shall decide the issue.

Article 57. Deliberation in each House shall be public. However, a secret meeting may be held where a majority of two-thirds or more of those members present passes a resolution therefor.

Each House shall keep a record of proceedings. This record shall be published and given general circulation, excepting such parts of proceedings of secret session as may be deemed to require secrecy.

Upon demand of one-fifth or more of the members present, votes of the members on any matter shall be recorded in the minutes.

Article 58. Each House shall select its own president and other officials.

Each House shall establish its rules pertaining to meetings, proceedings and internal discipline, and may punish members for disorderly conduct. However, in order to expel a member, a majority of two-thirds or more of those members present must pass a resolution thereon.

Article 59. A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise provided by the Constitution.

A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, becomes a law when passed a second time by the House of Representatives by a majority of two-thirds or more of the members present.

The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Representatives from calling for the meeting of a joint committee of both Houses, provided for by law.

Failure by the House of Councillors to take final action within sixty (60) days after receipt of a bill passed by the House of Representatives, time in recess excepted, may be determined by the House of Representatives to constitute, a rejection of the said bill by the House of Councillors.

Article 60. The budget must first be submitted to the House of Representatives.

Upon consideration of the budget, when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, and when no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or in the case of failure by the House of Councillors to take final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet.

Article 61. The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the conclusion of treaties.

Article 62. Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.

Article 63. The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear when their presence is required in order to give answers or explanations.

Article 64. The Diet shall set up an impeachment court from among the members of both Houses for the purpose of trying those judges against whom removal proceedings have been instituted.

Matters relating to impeachment shall be provided by law.

CHAPTER V. THE CABINET

Article 65. Executive power shall be vested in the Cabinet.

Article 66. The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State, as provided for by law.

The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians. The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet.

Article 67. The Prime Minister shall be designated from among the members of the Diet by a resolution of the Diet. This designation shall precede all other business.

If the House of Representatives and the House of Councillors disagree and if no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or the House of Councillors fails to make designation within ten (10) days, exclusive of the period of recess, after the House of Representatives has made designation, the decision of the House of Representatives shall be the decision of the Diet.

Article 68. The Prime Minister shall appoint the Ministers of State. However a majority of their number must be chosen from among the members of the Diet.

The Prime Minister may remove the Ministers of State as he chooses.

Article 69. If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a confidence resolution, the Cabinet shall resign en masse, unless the House of Representatives is dissolved within ten (10) days.

Article 70. When there is a vacancy in the post of Prime Minister, or upon the first convocation of the Diet after a general elec-

tion of members of the House of Representatives, the Cabinet shall resign en masse.

Article 71. In the cases mentioned in the two preceding articles, the Cabinet shall continue its functions until the time when a new Prime Minister is appointed.

Article 72. The Prime Minister, representing the Cabinet, submits bills, reports on general national affairs and foreign relations to the Diet and exercises control and supervision over various administrative branches.

Article 73. The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions:

Administer the law faithfully; conduct affairs of state. Manage foreign affairs.

Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet.

Administer the civil service, in accordance with standards established by law.

Prepare the budget, and present it to the Diet.

Enact cabinet orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such law.

Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, and restoration of rights.

Article 74. All laws and cabinet orders shall be signed by the competent Minister of State and countersigned by the Prime Minister.

Article 75. The Ministers of State, during their tenure of office, shall not be subject to legal action without the consent of the Prime Minister. However, the right to take that action is not impaired hereby.

CHAPTER VI. JUDICIARY

Article 76. The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.

No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.

All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.

Article 77. The Supreme Court is vested with the rule-making power under which it determines the rules of procedure and of practice, and of matters relating to attorneys, the internal discipline of the courts and the administration of judicial affairs.

Public procurators shall be subject to the rule-making power of the Supreme Court.

The Supreme Court may delegate the power to make rules for inferior courts to such courts.

Article 78. Judges shall not be removed except by public impeachment unless judicially declared mentally or physically incompetent to perform official duties. No disciplinary action against judges shall be administered by any executive organ or agency.

Article 79. The Supreme Court shall consist of a Chief Judge and such number of judges as may be determined by law; all such judges excepting the Chief Judge shall be appointed by the Cabinet.

The appointment of the judges of the Supreme Court shall be reviewed by the people at the first general election of members of the House of Representatives following their appointment, and shall be reviewed again at the first general election of members of the House of Representatives after a lapse of ten (10) years, and in the same manner thereafter.

In cases mentioned in the foregoing paragraph, when the majority of the voters favors the dismissal of a judge, he shall be dismissed.

Matters pertaining to review shall be prescribed by law.

The judges of the Supreme Court shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

All such judges shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.

Article 80. The judges of the inferior courts shall be appointed by the Cabinet from a list of persons nominated by the Supreme Court. All such judges shall hold office for a term of ten (10) years with privilege of reappointment, provided that they shall be retired upon the attainment of the age as fixed by law.

The judges of the inferior courts shall receive, at regular stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.

Article 81. The Supreme Court is the court of last resort with power to determine the constitutionality of any law, order, regulation or official act.

Article 82. Trials shall be conducted and judgment declared publicly.

Where a court unanimously determines publicity to be dangerous to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses involving the press or cases

wherein the rights of people as guaranteed in Chapter III of this Constitution are in question shall always be conducted publicly.

CHAPTER VII. FINANCE

Article 83. The power to administer national finances shall be exercised as the Diet shall determine.

Article 84. No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.

Article 85. No money shall be expended, nor shall the State obligate itself, except as authorized by the Diet.

Article 86. The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each fiscal year.

Article 87. In order to provide for unforeseen deficiencies in the budget, a reserve fund may be authorized by the Diet to be expended upon the responsibility of the Cabinet.

The Cabinet must get subsequent approval of the Diet for all payments from the reserve fund.

Article 88. All property of the Imperial Household shall belong to the State. All expenses of the Imperial Household shall be appropriated by the Diet in the budget.

Article 89. No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.

Article 90. Final accounts of the expenditures and revenues of the State shall be audited annually by a Board of Audit and submitted by the Cabinet to the Diet, together with the statement of audit, during the fiscal year immediately following the period covered.

The organization and competency of the Board of Audit shall be determined by law.

Article 91. At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the state of national finances.

Article 92. Regulations concerning organization and operations of local public entities shall be fixed by law in accordance with the principle of local autonomy.

Article 93. The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with law.

The chief executive officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be

determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

Article 95. A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.

Amendments to this Constitution shall be initiated by the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.

Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.

The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.

The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.

The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.

This Constitution shall be enforced as from the day when the period of six months will have elapsed counting from the day of its promulgation.

The enactment of laws necessary for the enforcement of this Constitution, the election of members of the House of Councillors

determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

Article 95. A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.

Amendments to this Constitution shall be initiated by the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.

Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.

The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.

The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.

The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.

This Constitution shall be enforced as from the day when the period of six months will have elapsed counting from the day of its promulgation.

The enactment of laws necessary for the enforcement of this Constitution, the election of members of the House of Councillors

determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

Article 95. A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.

Amendments to this Constitution shall be initiated by the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.

Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.

The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.

This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.

The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.

The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.

This Constitution shall be enforced as from the day when the period of six months will have elapsed counting from the day of its promulgation.

The enactment of laws necessary for the enforcement of this Constitution, the election of members of the House of Councillors

determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.

Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations within law.

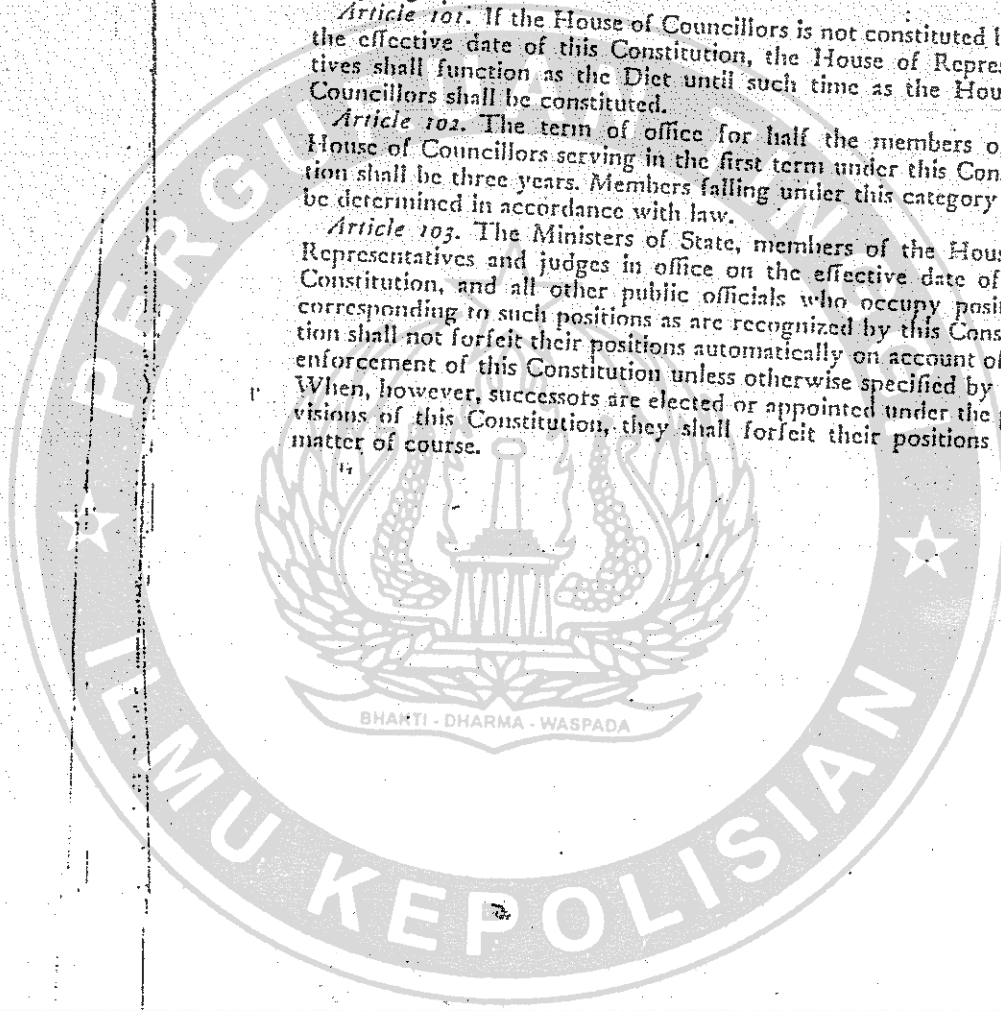
Article 95. A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.

and the procedure for the convocation of the Diet and other preparatory procedures necessary for the enforcement of this Constitution may be executed before the day prescribed in the preceding paragraph.

Article 101. If the House of Councillors is not constituted before the effective date of this Constitution, the House of Representatives shall function as the Diet until such time as the House of Councillors shall be constituted.

Article 102. The term of office for half the members of the House of Councillors serving in the first term under this Constitution shall be three years. Members falling under this category shall be determined in accordance with law.

Article 103. The Ministers of State, members of the House of Representatives and judges in office on the effective date of this Constitution, and all other public officials who occupy positions corresponding to such positions as are recognized by this Constitution shall not forfeit their positions automatically on account of the enforcement of this Constitution unless otherwise specified by law. When, however, successors are elected or appointed under the provisions of this Constitution, they shall forfeit their positions as a matter of course.



Lampiran III

Treaty of Peace
with Japan

Whereas the Allied Powers and Japan are resolved that henceforth their relations shall be those of nations which, as sovereign equals, cooperate in friendly association to promote their common welfare and to maintain international peace and security, and are therefore desirous of concluding a Treaty of Peace which will settle questions still outstanding as a result of the existence of a state of war between them;

Whereas Japan for its part declares its intention to apply for membership in the United Nations and in all circumstances to conform to the principles of the Charter of the United Nations; to strive to realize the objectives of the Universal Declaration of Human Rights; to seek to create within Japan conditions of stability and well-being as defined in Articles 55 and 56 of the Charter of the United Nations and already initiated by post-surrender Japanese legislation; and in public and private trade and commerce to conform to internationally accepted fair practices;

Whereas the Allied Powers welcome the intentions of Japan set out in the foregoing paragraph;

The Allied Powers and Japan have therefore determined to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries, who, after presentation of their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions:

CHAPTER I
PEACE

Article 1

(a) The state of war between Japan and each of the Allied Powers is terminated as from the date on which the present Treaty comes into force between Japan and the Allied Power concerned as provided for in Article 23.
(b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.

CHAPTER II
TERRITORY

Article 2

(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quehpari, Port Hamilton and Dagelet.

(b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.

(c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of September 3, 1905.

(d) Japan renounces all right, title and claim in connection with the League of Nations Mandate System, and accepts the action of the United Nations Security Council of April 3, 1947, extending the trusteeship system to the Pacific Islands formerly under mandate to Japan.

(e) Japan renounces all claim to any right or title to or interest in connection with any part of the Antarctic area, whether deriving from the activities of Japanese nationals or otherwise.

(f) Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Palauel Islands.

Article 3

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansel Shoto

Treaty of Peace with Japan

south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Soto Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

Article 4

(a) Subject to the provisions of paragraph (b) of this Article, the disposition of property of Japan and of its nationals in the areas referred to in Article 2, and their claims, including debts, against the authorities presently administering such areas and the residents (including juridical persons) thereof, and the disposition in Japan of property of such authorities and residents, and of claims, including debts, of such authorities and residents, and of Japan and its nationals, shall be the subject of special arrangements between Japan and such authorities. The property of any of the Allied Powers or its nationals in the areas referred to in Article 2 shall, insofar as this has not already been done, be returned by the administering authority in the condition in which it now exists. (The term nationals whenever used in the present Treaty includes juridical persons.)

(b) Japan recognizes the validity of dispositions of property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of the United States Military Government in any of the areas referred to in Articles 2 and 3.

(c) Japanese owned submarine cables connecting Japan with territory removed from Japanese control pursuant to the present Treaty shall be equally divided, Japan retaining the Japanese terminal and adjoining half of the cable, and the detached territory the remainder of the cable and connecting terminal facilities.

CHAPTER III
SECURITY

Article 5

(a) Japan accepts the obligations set forth in Article 2 of the Charter of the United Nations, and in particular the obligations (1) to settle its international disputes by peaceful means in

such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered;

(ii) to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations;

(iii) to give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the Charter and to refrain from giving assistance to any State against which the United Nations may take preventive or enforcement action.

(b) The Allied Powers confirm that they will be guided by the principles of Article 1 of the Charter of the United Nations in their relations with Japan.

(c) The Allied Powers for their part recognize that Japan as a sovereign nation possesses the inherent right of individual or collective self-defense referred to in Article 51 of the Charter of the United Nations and that Japan may voluntarily enter into collective security arrangements.

Article 6

(a) All occupation forces of the Allied Powers shall be withdrawn from Japan as soon as possible after the coming into force of the present Treaty, and in any case not later than 90 days thereafter. Nothing in this provision shall, however, prevent the stationing or retention of foreign armed forces in Japanese territory under or in consequence of any bilateral or multilateral agreements which have been or may be made between one or more of the Allied Powers, on the one hand, and Japan on the other.

(b) The provisions of Article 9 of the Potsdam Proclamation of July 16, 1945, dealing with the return of Japanese military forces to their homes, to the extent not already completed, will be carried out.

(c) All Japanese property for which compensation has not already been paid which was supplied for the use of the occupation forces and which remains in the possession of those forces at the time of the coming into force of the present Treaty, shall be returned to the Japanese Government within the same 90 days unless other arrangements are made by mutual agreement.

CHAPTER IV

POLITICAL AND ECONOMIC CLAUSES

Article 7

(a) Each of the Allied Powers, within one year after the present Treaty has come into force between it and Japan, will notify Japan which of its prewar bilateral treaties or conventions with which it wishes to continue in force or revive, and any treaties or conventions so notified shall continue in force or be revived subject to such amendments as may be necessary to ensure conformity with the present Treaty. The treaties and conventions so notified shall be considered as having been continued in force or revived three months after the date of notification and shall be registered with the Secretariat of the United Nations. All such treaties and conventions as to which Japan is not so notified shall be regarded as abrogated.

(b) Any notification made under paragraph (a) of this Article may except from the operation or revival of a treaty or convention any territory for the international relations of which the notifying Power is responsible, until three months after the date on which notice is given to Japan that such exception shall cease to apply.

Article 8

(d) Japan will recognize the full force of all treaties now or hereafter concluded by the Allied Powers for terminating the state of war initiated on September 1, 1939, as well as any other arrangements by the Allied Powers for or in connection with the restoration of peace. Japan also accepts the arrangements made for terminating the former League of Nations and Permanent Court of International Justice.

(b) Japan renounces all such rights and interests as it may derive from being a signatory power of the Conventions of St. Germain-en-Laye of September 10, 1919, and the Straits Agreement of Montreux of July 10, 1916, and from Article 16 of the Treaty of Peace with Turkey signed at Lausanne on July 24, 1911.

(c) Japan renounces all rights, title and interests acquired under, and is discharged from all obligations resulting from, the Agreement between Germany and the Creditor Powers of January 30, 1939, and its Annexes, including the Trust Agreement, dated May 17, 1930; the Convention of January 20, 1930, respecting the Bank for International Settlements; and the Statutes of the Bank for International Settlements. Japan will notify to the Ministry of For-

sign Affairs in Paris within six months of the first coming into force of the present Treaty its renunciation of the rights, title and interests referred to in this paragraph.

Article 9

Japan will enter promptly into negotiations with the Allied Powers so desiring for the conclusion of bilateral and multilateral agreements providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

Article 10

Japan renounces all special rights and interests in China, including all benefits and privileges resulting from the provisions of the final Protocol signed at Peking on September 7, 1901, and all annexes, notes and documents supplementary thereto, and agrees to the abrogation in respect to Japan of the said protocol, annexes, notes and documents.

Article 11

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.

Article 12

- (a) Japan declares its readiness promptly to enter into negotiations for the conclusion with each of the Allied Powers of treaties or agreements to place their trading, maritime and other commercial relations on a stable and friendly basis.
- (b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty

(1) accord to each of the Allied Powers, its nationals, products and vessels

(i) most-favored-nation treatment with respect to customs duties, charges, restrictions and other regulations on or in connection with the importation and exportation of goods;

(ii) national treatment with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities;

(3) ensure that external purchases and sales of Japanese state trading enterprises shall be based solely on commercial considerations.

(c) In respect to any matter, however, Japan shall be obliged to accord to an Allied Power national treatment, or most-favored-nation treatment, only to the extent that the Allied Power concerned accords Japan national treatment or most-favored-nation treatment, as the case may be, in respect of the same matter. The reciprocity envisaged in the foregoing sentence shall be determined, in the case of products, vessels and juridical entities of, and persons domiciled in, any non-metropolitan territory of an Allied Power, and in the case of juridical entities of, and persons domiciled in, any state or province of an Allied Power having a federal government, by reference to the treatment accorded to Japan in such territory, state or province.

(d) In the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favored-nation treatment, as the case may be, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the need to safeguard that party's external financial position or balance of payments (except in respect to shipping and navigation), or on the need to maintain its essential security interests, and provided such measure is proportionate to the circumstances and not applied in an arbitrary or unreasonable manner.

(e) Japan's obligations under this Article shall not be affected by the exercise of any Allied rights under Article 14 of the present

Treaty; nor shall the provisions of this Article be understood as limiting the undertakings assumed by Japan by virtue of Article 15 of the Treaty.

Article 13

(a) Japan will enter into negotiations with any of the Allied Powers, promptly upon the request of such Power or Powers, for the conclusion of bilateral or multilateral agreements relating to international civil air transport.

(b) Pending the conclusion of such agreement or agreements, Japan will, during a period of four years from the first coming into force of the present Treaty, extend to such Power treatment not less favorable with respect to air-traffic rights and privileges than those exercised by any such Powers at the date of such coming into force, and will accord complete equality of opportunity in respect to the operation and development of air services.

(c) Pending its becoming a party to the Convention on International Civil Aviation in accordance with Article 93 thereof, Japan will give effect to the provisions of that Convention applicable to the international navigation of aircraft, and will give effect to the standards, practices and procedures adopted as annexes to the Convention in accordance with the terms of the Convention.

CHAPTER V
CLAIMS AND PROPERTY

Article 14

(a) It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war. Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all such damage and suffering and at the same time meet its other obligations.

Therefore,

1. Japan will promptly enter into negotiations with Allied Powers so desiring, whose present territories were occupied by Japanese forces and damaged by Japan, with a view to assisting to compensate those countries for the cost of repairing the damage done, by making available the services of the Japanese people in production, salvaging and other work for the Allied Powers in question. Such arrangements shall avoid the imposition of addi-

Treaty of Peace with Japan

tional liabilities on other Allied Powers, and, where the manufacturing of raw material is called for, they shall be supplied by the Allied Powers in question, so as not to throw any foreign exchange burden upon Japan.

2. (I) Subject to the provisions of sub-paragraph (II) below, each of the Allied Powers shall have the right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of all property, rights and interests of

(a) Japan and Japanese nationals, (b) persons acting for or on behalf of Japan or Japanese nationals, and

(c) entities owned or controlled by Japan or Japanese nationals, which on the first coming into force of the present Treaty were subject to its jurisdiction. The property, rights and interests specified in this sub-paragraph shall include those now blocked, vested or in the possession or under the control of enemy property authorities of Allied Powers, which belonged to, or were held or managed on behalf of, any of the persons or entities mentioned in (a), (b) or (c) above at the time such assets came under the controls of such authorities.

(II) The following shall be excepted from the right specified in sub-paragraph (I) above:

(i) Property of Japanese natural persons who during the war resided with the permission of the Government concerned in the territory of one of the Allied Powers, other than territory occupied by Japan, except property subjected to restrictions during the war and not released from such restrictions as of the date of the first coming into force of the present Treaty;

(ii) all real property, furniture and fixtures owned by the Government of Japan and used for diplomatic or consular purposes, and all personal furniture and furnishings and other private property not of an investment nature which was normally necessary for the carrying out of diplomatic and consular functions, owned by Japanese diplomatic and consular personnel;

(iii) property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used exclusively for religious or charitable purposes;

(iv) property, rights and interests which have come within its jurisdiction in consequence of the resumption of trade and financial relations subsequent to September 2, 1945,

between the country concerned and Japan, except such as have resulted from transactions contrary to the laws of the Allied Power concerned;

(v) obligations of Japan or Japanese nationals, any right, title or interest in tangible property located in Japan, interests in enterprises organized under the laws of Japan, or any paper evidence thereof; provided that this exception shall only apply to obligations of Japan and its nationals expressed in Japanese currency.

(III) Property referred to in exceptions (i) through (v) above shall be returned subject to reasonable expenses for its preservation and administration. If any such property has been liquidated the proceeds shall be returned instead.

(IV) The right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of property as provided in sub-paragraph (i) above shall be exercised in accordance with the laws of the Allied Power concerned, and the owner shall have only such rights as may be given him by those laws.

(V) The Allied Powers agree to deal with Japanese trademarks and literary and artistic property rights on a basis as favorable to Japan as circumstances ruling in each country will permit.

(b) Except as otherwise provided in the present Treaty, the Allied Powers waive all reparations claims of the Allied Powers, other claims of the Allied Powers and their nationals arising out of any actions taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war, and claims of the Allied Powers for direct military costs of occupation.

Article 15

(a) Upon application made within nine months of the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned, Japan will, within six months of the date of such application, return the property, tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of each Allied Power and its nationals which was within Japan at any time between December 7, 1941, and September 2, 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud. Such property shall be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return. Property whose return is not applied for by or on behalf of the owner or by his Government within the pre-

Treaty of Peace with Japan

scribed period may be disposed of by the Japanese Government as it may determine. In cases where such property was within Japan on December 7, 1941, and cannot be returned or has suffered injury or damage as a result of the war, compensation will be made on terms not less favorable than the terms provided in the draft Allied Powers Property Compensation Law approved by the Japanese Cabinet on July 13, 1951.

(b) With respect to industrial property rights impaired during the war, Japan will continue to accord to the Allied Powers and their nationals benefits no less than those heretofore accorded by Cabinet Orders No. 309 effective September 1, 1949, No. 12 effective January 28, 1950, and No. 9 effective February 1, 1950, all as now amended, provided such nationals have applied for such benefits within the time limits prescribed therein.

(c) (i) Japan acknowledges that the literary and artistic property rights which existed in Japan on December 6, 1941, in respect to the published and unpublished works of the Allied Powers and their nationals have continued in force since that date, and recognizes those rights which have arisen, or but for the war would have arisen, in Japan since that date, by the operation of any conventions and agreements to which Japan was a party on that date, irrespective of whether or not such conventions or agreements were abrogated or suspended upon or since the outbreak of war by the domestic law of Japan or of the Allied Power concerned.

(ii) Without the need for application by the proprietor of the right and without the payment of any fee or compliance with any other formality, the period from December 7, 1941, until the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned shall be excluded from the running of the normal term of such rights; and such period, with an additional period of six months, shall be excluded from the time within which a literary work must be translated into Japanese in order to obtain translating rights in Japan.

Article 16

As an expression of its desire to indemnify those members of the armed forces of the Allied Powers who suffered undue hardships while prisoners of war of Japan, Japan will transfer its assets and those of its nationals in countries which were neutral during the war, or which were at war with any of the Allied Powers, or at its option, the equivalent of such assets to the International

Committee of the Red Cross which shall liquidate such assets and distribute the resultant fund to appropriate national agencies, for the benefit of former prisoners of war and their families on such basis as it may determine to be equitable. The categories of assets described in Article 14 (a) 2(ii) through (v) of the present Treaty shall be excepted from transfer, as well as assets of Japanese natural persons not residents of Japan on the first coming into force of the Treaty. It is equally understood that the transfer provision of this Article has no application to the 1970 shares in the Bank for International Settlements presently owned by Japanese financial institutions.

Article 17

(a) Upon the request of any of the Allied Powers, the Japanese Government shall review and revise in conformity with international law any decision or order of the Japanese Prize Courts in cases involving ownership rights of nationals of that Allied Power and shall supply copies of all documents comprising the records of these cases, including the decisions taken and orders issued. In any case in which such review or revision shows that restoration is due, the provisions of Article 15 shall apply to the property concerned.

(b) The Japanese Government shall take the necessary measures to enable nationals of any of the Allied Powers at any time within one year from the coming into force of the present Treaty between Japan and the Allied Power concerned to submit to the appropriate Japanese authorities for review any judgment given by a Japanese court between December 7, 1941, and such coming into force, in any proceedings in which any such national was unable to make adequate presentation of his case either as plaintiff or defendant. The Japanese Government shall provide that, where the national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored in the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances.

Article 18

(a) It is recognized that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of a state of war, and which are due by the Government

or nationals of Japan to the Government or nationals of one of the Allied Powers, or are due by the Government or nationals of one of the Allied Powers to the Government or nationals of Japan. The intervention of a state of war shall equally not be regarded as affecting the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or re-presented by the Government of one of the Allied Powers to the Government of Japan, or by the Government of Japan to any of the Governments of the Allied Powers. The provisions of this paragraph are without prejudice to the rights conferred by Article 14.

(b) Japan affirms its liability for the prewar external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses its intention to enter into negotiations at an early date with its creditors with respect to the resumption of payments on those debts; to encourage negotiations in respect of other prewar claims and obligations; and to facilitate the transfer of sums accordingly.

Article 19

(a) Japan waives all claims of Japan and its nationals against the Allied Powers and their nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of any of the Allied Powers in Japanese territory prior to the coming into force of the present Treaty.

(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by any of the Allied Powers with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of the Allied Powers, but does not include Japanese claims specifically recognized in the laws of any Allied Power enacted since September 2, 1945.

(c) Subject to reciprocal renunciation, the Japanese Government also renounces all claims (including debts) against Germany and German nationals on behalf of the Japanese Government and Japanese nationals, including inter-governmental claims and claims for loss or damage sustained during the war, but excepting (a) claims in respect of contracts entered into and rights acquired before September 1, 1939, and (b) claims arising out of trade and

CHAPTER VII
FINAL CLAUSES

financial relations between Japan and Germany after September 3, 1945. Such renunciation shall not prejudice actions taken in accordance with Articles 16 and 20 of the present Treaty.

(d) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Allied nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

Article 20

Japan will take all necessary measures to ensure such disposition of German assets in Japan as has been or may be determined by those powers entitled under the Protocol of the proceedings of the Berlin Conference of 1945 to dispose of those assets, and pending the final disposition of such assets will be responsible for the conservation and administration thereof.

Article 21

Notwithstanding the provisions of Article 25 of the present Treaty, China shall be entitled to the benefits of Articles 10 and 14(a); and Korea to the benefits of Articles 1, 4, 9 and 14 of the present Treaty.

CHAPTER VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 22

If in the opinion of any Party to the present Treaty there has arisen a dispute concerning the interpretation or execution of the Treaty, which is not settled by reference to a special claims tribunal or by other agreed means, the dispute shall, at the request of any party thereto, be referred for decision to the International Court of Justice. Japan and those Allied Powers which are not already parties to the Statute of the International Court of Justice will deposit with the Registrar of the Court, at the time of their respective ratifications of the present Treaty, and in conformity with the resolution of the United Nations Security Council, dated October 15, 1946, a general declaration accepting the jurisdiction, without special agreement, of the Court generally in respect to all disputes of the character referred to in this Article,

Article 23

(a) The present Treaty shall be ratified by the States which sign it, including Japan, and will come into force for all the States which have then ratified it, when instruments of ratification have been deposited by Japan and by a majority, including the United States of America as the principal occupying Power, of the following States, namely Australia, Canada, Ceylon, France, Indonesia, the Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Pakistan, the Republic of the Philippines, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. The present Treaty shall come into force for each State which subsequently ratifies it, on the date of the deposit of its instrument of ratification.

(b) If the Treaty has not come into force within nine months after the date of the deposit of Japan's ratification, any State which has ratified it may bring the Treaty into force between itself and Japan by a notification to that effect given to the Governments of Japan and the United States of America not later than three years after the date of deposit of Japan's ratification.

Article 24

All instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America which will notify all the signatory States of each such deposit, of the date of the coming into force of the Treaty under paragraph (a) of Article 23, and of any notifications made under paragraph (b) of Article 23.

Article 25

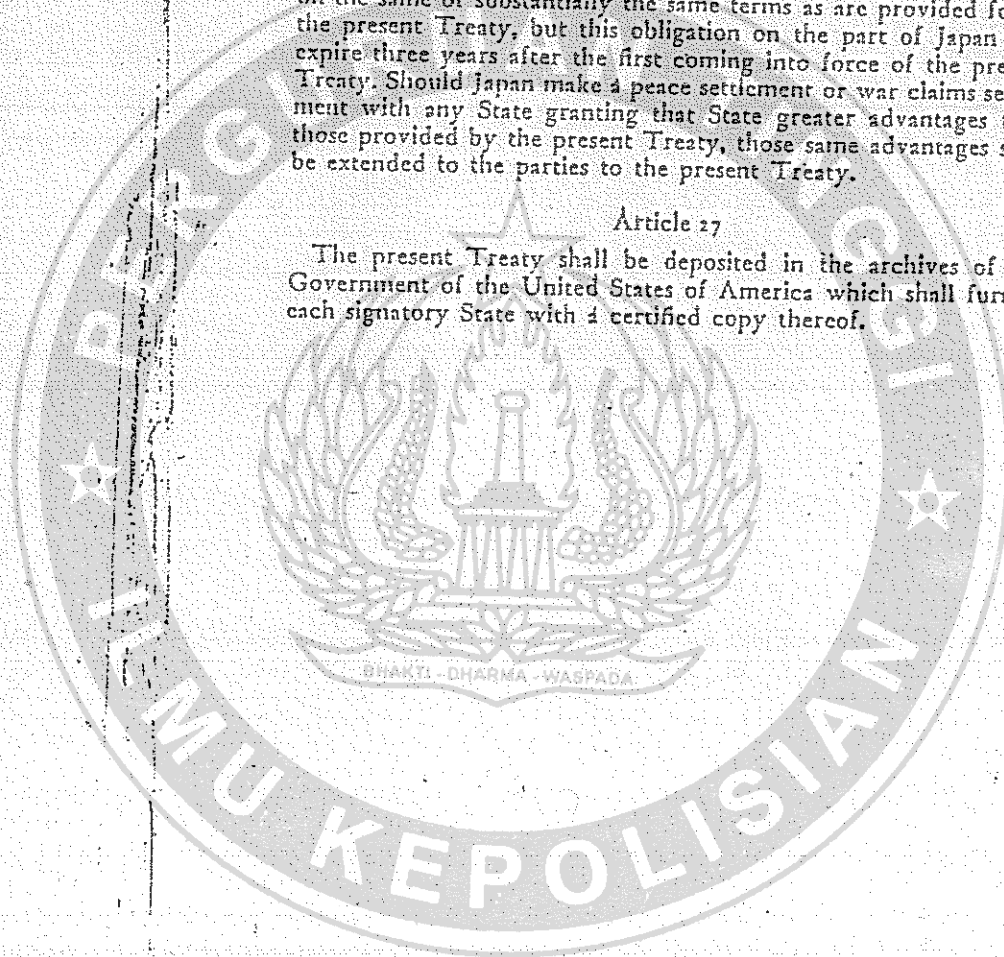
For the purposes of the present Treaty the Allied Powers shall be the States at war with Japan, or any State which previously formed a part of the territory of a State named in Article 23, provided that in each case the State concerned has signed and ratified the Treaty. Subject to the provisions of Article 21, the present Treaty shall not confer any rights, titles or benefits on any State which is not an Allied Power as herein defined; nor shall any right, title or interest of Japan be deemed to be diminished or prejudiced by any provision of the Treaty in favor of a State which is not an Allied Power as so defined.

Article 26

Japan will be prepared to conclude with any State which signed or adhered to the United Nations Declaration of January 1, 1942, and which is at war with Japan, or with any State which previously formed a part of the territory of a State named in Article 13, which is not a signatory of the present Treaty, a bilateral Treaty of Peace on the same or substantially the same terms as are provided for in the present Treaty, but this obligation on the part of Japan will expire three years after the first coming into force of the present Treaty. Should Japan make a peace settlement or war claims settlement with any State granting that State greater advantages than those provided by the present Treaty, those same advantages shall be extended to the parties to the present Treaty.

Article 27

The present Treaty shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America which shall furnish each signatory State with 2 certified copy thereof.



*Treaty of Mutual
Cooperation and Security Between
the United States of America and
Japan (1960)*

The United States of America and Japan,

Desiring to strengthen the bonds of peace and friendship traditionally existing between them, and to uphold the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law,

Desiring further to encourage closer economic cooperation between them and to promote conditions of economic stability and well-being in their countries,

Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and their desire to live in peace with all peoples and all governments,

Recognizing that they have the inherent right of individual or collective self-defense as affirmed in the Charter of the United Nations,

Considering that they have a common concern in the maintenance of international peace and security in the Far East,

Having resolved to conclude a treaty of mutual cooperation and security,

Therefore agree as follows:

ARTICLE I

The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively.

ARTICLE II

The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well being. They will seek to eliminate conflicts in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them.

ARTICLE III

The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack.

ARTICLE IV

The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, and, at the request of either Party, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened.

ARTICLE V

Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 31 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.

ARTICLE VI

For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan.

Treaty of Cooperation with Japan

The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between the United States of America and Japan, signed at Tokyo on February 18, 1951, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon.

ARTICLE VII

This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security.

ARTICLE VIII

This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo.

ARTICLE IX

The Security Treaty between the United States of America and Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty.

ARTICLE X

This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of the United States of America and Japan there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area.

However, after the Treaty has been in force for ten years, either Party may give notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty, in which case the Treaty shall terminate one year after such notice has been given.

BASIC STATISTICAL TABLE 1
Gross National Product: Current Prices
(Million yen)

Year	Net domestic product at market prices	Net factor income from abroad	Net national product at market prices	Provisions for consumption of fixed capital	Statistical discrepancy	Gross national product at market prices	Statistical discrepancy/ GNP (percent)
1905	2,726	-26	2,700	269	187	3,156	5.9%
1906	3,137	-69	3,068	293	90	3,451	2.6
1907	3,634	-51	3,583	335	-290	3,628	-8.0
1908	3,622	-57	3,565	329	48	3,942	1.2
1909	3,526	-55	3,471	321	169	3,961	4.3
1910	3,574	-61	3,513	336	254	4,103	6.2
1911	4,162	-66	4,096	358	201	4,655	4.3
1912	4,573	-66	4,507	411	50	4,968	1.0
1913	4,691	-67	4,624	433	155	5,212	3.0
1914	4,320	-68	4,252	430	-17	4,665	-0.4
1915	4,790	-64	4,726	473	-280	4,919	-5.7
1916	5,843	-31	5,812	609	-346	6,075	-5.7
1917	7,813	2	7,815	871	-201	8,485	-2.4
1918	10,702	26	10,728	1,170	-229	11,669	-2.0
1919	14,136	38	14,174	1,307	-270	15,211	-1.8
1920	13,453	17	13,470	1,800	360	15,630	2.3
1921	13,830	5	13,835	1,573	-419	14,969	-2.8
1922	14,216	17	14,233	1,623	-193	15,663	-1.2
1923	14,181	19	14,200	1,709	-910	14,999	-6.1
1924	15,067	-8	15,059	1,745	-1,176	15,628	-7.5
1925	15,734	-11	15,723	1,589	-1,002	16,310	-6.1
1926	15,484	-18	15,466	1,538	-952	16,052	-5.9
1927	14,945	-3	14,942	1,558	-157	16,343	-1.0
1928	15,526	-24	15,502	1,605	-538	16,569	-3.2
1929	15,817	-20	15,797	1,631	-1,081	16,347	-6.6
1930	13,257	-25	13,232	1,394	140	14,766	0.9
1931	11,954	-24	11,930	1,214	260	13,404	1.9
1932	12,921	-38	12,883	1,370	-557	13,696	-4.0
1933	14,514	-53	14,461	1,570	-716	15,315	-4.7
1934	15,696	-26	15,670	1,604	-228	17,016	-1.3
1935	16,787	-14	16,773	1,674	-85	18,362	-0.5
1936	18,639	25	18,664	1,805	-1,067	19,402	-5.5
1937	22,046	8	22,054	2,428	-798	23,684	-3.4
1938	25,018	40	25,058	2,748	183	27,989	0.7
1939	31,877	17	31,894	3,140	-3,622	31,412	-11.5
1940	37,026	70	37,096	3,870	-4,383	36,583	-12.0

Sumber: Henry Rosovsky & Kazushi Ohkawa, Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century (California: Stanford University Press, 1973)

BASIC STATISTICAL TABLE 1 (continued)
Gross National Product: Current Prices
(1941-44, million yen; 1946-70, billion yen)

Year	Net domestic product at market prices	Net factor income from abroad	Net national product at market prices	Provisions for consumption of fixed capital	Statistical discrepancy	Gross national product at market prices	Statistical discrepancy/ GNP (percent)
1941	38,598	259	38,857	3,157	2,882	44,896	6.4%
1942	45,474	367	45,841	3,666	4,877	54,384	9.0
1943	53,419	348	53,767	4,272	5,785	63,824	9.1
1944	60,941	165	61,106	5,257	8,140	74,503	10.9
1946	359		359	24	92	475	19.4
1947	1,061	-1	1,060	57	192	1,309	14.7
1948	2,205	-1	2,204	108	353	2,665	13.2
1949	3,017	-1	3,016	158	202	3,376	6.0
1950	3,723	-2	3,721	207	18	3,946	0.5
1951	5,018	-11	5,007	280	155	5,442	2.8
1952	5,520	45	5,565	434	260	6,259	4.2
1953	6,406	43	6,449	553	53	7,055	0.8
1954	7,199	32	7,231	701	-56	7,836	-1.2
1955	7,844	25	7,869	791	-36	8,624	-0.4
1956	8,652	18	8,670	934	122	9,726	1.3
1957	10,120	10	10,130	1,044	-97	11,077	-0.9
1958	10,543	3	10,546	1,129	-152	11,523	-1.3
1959	11,735	-7	11,728	1,300	-103	12,925	-0.8
1960	14,144	-16	14,128	1,590	-219	15,499	-1.4
1961	16,758	-37	16,721	2,037	368	19,126	1.9
1962	19,073	-50	19,023	2,413	-236	21,200	-1.1
1963	21,840	-66	21,780	2,855	-171	24,464	-0.7
1964	24,933	-98	24,835	3,513	491	28,839	1.7
1965	27,780	-99	27,681	4,024	-82	31,787	-0.3
1966	31,940	-99	31,841	4,760	193	36,794	0.5
1967	37,866	-107	37,759	5,506	278	43,543	0.6
1968	44,920	-150	44,770	6,670	267	51,707	0.5
1969	52,030	-168	51,862	8,098	280	60,240	0.5
1970	61,857	-159	61,698	9,571	-287	70,982	-0.4

Source and remarks: Treasury, IR, pp. 149-50, with a slight recent revision for investment in agriculture. "Statistical discrepancy" includes possible effects of inventory changes that have not been estimated. The large deficit for 1939 and 1940 may be due to unrecorded military expenditures. Therefore, in calculating growth rates in the main text, the discrepancy is assumed to be 5.75 percent in 1939 and 6.10 percent in 1940. Postwar: 1941-51, NIS (1962), pp. 120, 143; 1952-65, revised NIS (1969), pp. 40-61; 1966-70, NIS (1972), pp. 38-37. Figures for 1945 are not available; figures for 1946-51 are for fiscal year. Net national product and domestic product at factor cost have been converted to market prices.

BASIC STATISTICAL TABLE 2
Gross National Product: Constant Prices
(1954=100 prices, million yen)

Year	Net domestic product at market prices	Net factor income from abroad	Net national product at market prices	Provisions for consumption of fixed capital	Statistical discrepancy	Gross national product at market prices
1905	5,854	-47	5,807	472	383	6,662
1906	6,223	-122	6,101	492	167	6,760
1907	6,667	-81	6,586	514	-561	6,535
1908	6,727	-96	6,631	537	80	7,248
1909	6,645	-96	6,549	562	306	7,417
1910	6,940	-106	6,834	584	479	7,897
1911	7,159	-107	7,052	615	311	7,978
1912	7,373	-101	7,272	645	76	7,993
1913	7,249	-100	7,149	680	238	8,067
1914	7,599	-110	7,489	706	-62	8,133
1915	8,508	-109	8,399	725	-506	8,618
1916	9,097	-47	9,050	754	-450	9,354
1917	9,637	3	9,640	804	-272	10,172
1918	10,401	24	10,425	867	-244	11,018
1919	10,878	27	10,905	940	-220	11,625
1920	10,290	12	10,302	1,013	250	11,565
1921	11,537	4	11,541	1,071	340	12,272
1922	11,012	13	11,025	1,116	-177	11,964
1923	10,974	14	10,988	1,148	-714	11,422
1924	12,590	-6	12,585	1,187	-964	12,808
1925	12,001	-8	11,993	1,222	-779	12,436
1926	12,063	-14	12,049	1,264	-730	12,583
1927	11,569	-3	11,566	1,312	70	12,948
1928	12,902	-20	12,882	1,358	-464	13,776
1929	13,380	-17	13,363	1,401	-929	13,835
1930	12,440	-24	12,416	1,439	121	13,976
1931	12,370	-30	12,340	1,473	254	14,067
1932	13,762	-40	13,722	1,507	-619	14,610
1933	15,291	-55	15,236	1,556	-766	16,026
1934	16,148	-27	16,121	1,618	-229	17,510
1935	16,848	-14	16,834	1,690	-87	18,437
1936	18,083	24	18,107	1,775	-1,043	18,839
1937	19,588	7	19,595	1,851	-737	20,709
1938	19,514	32	19,546	1,941	15	21,502
1939	22,931	12	22,943	2,064	-2,735	22,272
1940	23,614	47	23,661	2,202	-2,914	22,949

BASIC STATISTICAL TABLE 3 (continued)
Gross National Product: Constant Prices
(1960 prices, billion yen)

Year	Net domestic product at market prices	Net factor income from abroad	Net national product at market prices	Provisions for consumption of fixed capital	Statistical discrepancy	Gross national product at market prices
1953	7,072	43	7,115	641	638	8,394
1954	7,965	32	7,997	818	-2	8,813
1955	8,577	26	8,603	915	182	9,700
1956	9,114	18	9,132	997	509	10,638
1957	10,131	9	10,140	1,036	487	11,663
1958	10,950	3	10,953	1,183	77	12,213
1959	12,195	-7	12,188	1,336	-133	13,391
1960	14,144	-16	14,128	1,593	-217	15,504
1961	16,018	-36	15,982	1,935	331	18,248
1962	17,581	-50	17,531	2,230	-474	19,287
1963	19,382	-66	19,316	2,593	-746	21,163
1964	21,464	-97	21,367	3,125 ¹	-232	24,260
1965	22,968	-97	22,871	3,448	-1,014	25,305

Sources and remarks: Preview, pp. 64-65, with a slight recent revision for investment in agriculture. These preview series are estimated on the assumption that statistical discrepancies are the same as in current price series, and that the real output of the service sector can be approximated as a residual of the domestic account, the foreign account being excluded. This was done to avoid the use of unreliable deflators for the service sector. Postwar deflators: M45 (1969), pp. 82-83; no deflators are available after 1965. No price indexes have been used to link preview and postwar series because of the tentative nature of the series.

Sumber: Henry Kosovsky & Kazushi Ukhawa, Japanese Economic Growth: Trend Acceleration in the Twentieth Century (California: Stanford University Press, 1973).

BASIC STATISTICAL TABLE 5 (continued)
Gross National Expenditure: Current Prices
(1941-44, million yen; 1946-70, billion yen)

Year	Private consumption expenditure	General govt. consumption expenditure	Gross domestic fixed capital formation	Exports of goods & services & factor income received from abroad	Less: Imports of goods & services & factor income paid abroad	Gross national expenditure at market prices
1905	2,351	626	516	401	738	3,156
1906	2,461	485	540	540	575	3,451
1907	2,672	338	634	617	633	3,628
1908	3,060	307	663	506	594	3,942
1909	3,060	320	598	539	556	3,961
1910	3,145	339	689	586	656	4,103
1911	3,488	407	860	618	718	4,655
1912	3,855	370	857	723	837	4,968
1913	4,128	339	860	836	951	5,212
1914	3,531	344	806	790	816	4,665
1915	3,554	366	793	994	788	4,919
1916	4,082	361	1,035	1,637	1,040	6,075
1917	5,318	423	1,816	2,347	1,419	8,485
1918	7,599	582	2,702	3,003	2,217	11,669
1919	11,072	881	2,937	3,230	2,909	15,211
1920	11,075	1,085	3,596	2,968	3,094	15,630
1921	11,286	1,120	2,868	1,998	2,303	14,969
1922	11,719	1,198	2,975	2,309	2,538	15,663
1923	11,921	1,164	2,500	2,095	2,681	14,999
1924	12,274	1,187	2,930	2,561	3,324	15,638
1925	12,863	1,073	2,704	3,167	3,497	16,310
1926	12,496	1,133	2,826	2,880	3,283	16,052
1927	12,283	1,391	2,892	2,857	3,080	16,343
1928	12,370	1,668	2,743	2,900	3,131	16,569
1929	11,942	1,612	2,815	3,160	3,182	16,347
1930	11,001	1,479	2,323	2,358	2,395	14,776
1931	9,926	1,684	1,946	1,895	2,047	13,404
1932	9,945	1,839	2,030	2,294	2,412	13,696
1933	11,000	2,046	2,466	2,845	3,042	15,315
1934	12,257	2,005	2,923	3,424	3,563	17,046
1935	12,825	2,117	3,346	3,985	3,911	18,362
1936	13,505	2,184	3,622	4,382	4,291	19,402
1937	15,298	2,609	5,660	6,006	5,889	23,684
1938	17,101	3,016	7,977	5,684	5,819	27,989
1939	17,630	3,402	9,822	6,601	6,043	31,412
1940	20,005	4,821	11,698	7,253	7,194	36,583
1941	20,701	13,495	9,308	2,414	2,414	31,117
1942	23,734	17,118	10,187	4,416	4,416	38,451
1943	26,001	22,855	14,158	1,716	1,716	48,899
1944	26,554	27,672	17,390	3,265	3,265	57,821
1945	333	55	78	5	5	475
1946	915	102	263	83	82	1,309
1947	1,741	282	516	236	191	2,665
1948	2,261	394	623	208	327	3,376
1949	2,397	437	639	368	364	3,946
1950	3,018	552	1,093	570	699	5,442
1951	3,861	668	1,277	385	720	6,259
1952	4,665	780	1,549	142	870	7,055
1953	5,162	864	1,698	140	882	7,836
1954	5,329	894	1,705	421	904	8,624
1955	6,012	936	2,290	507	1,208	9,726
1956	6,597	1,009	2,916	740	1,549	11,077
1957	7,057	1,105	2,941	252	1,150	11,523
1958	7,722	1,382	3,435	418	1,390	12,925
1959	8,023	1,607	4,882	551	1,713	15,499
1960	10,106	1,864	6,370	1,382	2,199	19,126
1961	11,747	2,000	7,136	459	2,148	21,200
1962	13,769	2,200	7,875	884	2,349	24,464
1963	15,945	2,554	9,404	1,083	3,036	28,839
1964	17,929	2,949	9,767	776	3,197	31,767
1965	20,586	3,328	11,344	1,037	3,665	36,794
1966	23,554	3,733	13,965	2,296	4,472	43,543
1967	27,296	4,277	17,327	2,366	5,087	51,707
1968	31,320	4,925	20,938	2,228	5,989	60,240
1969	36,292	5,853	24,921	3,132	7,488	70,982

Source and remark: Prewar: IB, pp. 147-48, slightly changed because of a recent revision of agricultural investment. Postwar: Personal consumption expenditures based on Shinozaki, IRES, vol. 6, with regional price differences adjusted by Ohkawa. Shinozaki's calculation goes somewhat beyond "personal" consumption expenditures since business consumption expenditures are included. There is no way to separate this item, and we may assume on the basis of postwar input-output data that its size roughly corresponds to "increases in stocks," for which no reliable prewar estimates exist. Postwar: 1941-51, NIS (1962), pp. 120, 149; 1952-65, revised NIS (1969), pp. 78-79; 1966-70, NIS (1972), pp. 54-55. Figures for 1945 are not available; figures for 1946-51 are for fiscal year.

Source: Kazushi Ushikawa & Henry Rosovsky, *Ibid.*

BASIC STATISTICAL TABLE 6
Gross National Expenditure: Constant Prices
(1934-36 prices; million yen)

Year	Private consumption expenditure	General gov. consumption expenditure	Gross domestic fixed capital formation	Exports of goods & services & factor income received from abroad	Less: Imports of goods & services & factor income paid abroad	Gross national expenditure at market prices
1905	5,272	1,552	688	346	1,196	6,662
1906	5,238	1,136	866	443	923	6,760
1907	5,378	755	926	451	955	6,555
1908	6,015	691	1,035	440	933	7,247
1909	6,132	719	991	492	917	7,417
1910	6,389	734	1,146	579	951	7,897
1911	6,306	815	1,389	601	1,133	7,978
1912	6,487	719	1,271	697	1,181	7,993
1913	6,692	657	1,297	779	1,358	8,067
1914	6,516	722	1,271	764	1,140	8,133
1915	6,896	870	1,176	1,009	1,243	8,618
1916	7,289	762	1,252	1,281	1,230	9,354
1917	7,622	763	1,598	1,525	1,336	10,172
1918	8,055	842	2,038	1,657	1,544	11,048
1919	8,813	1,032	2,283	1,323	1,826	11,625
1920	8,680	1,060	2,471	1,136	1,782	11,565
1921	9,253	1,045	2,649	1,014	1,689	12,272
1922	9,827	1,116	2,381	1,078	2,438	11,964
1923	9,998	1,099	1,883	927	2,485	11,422
1924	10,207	1,116	2,052	1,194	1,761	12,808
1925	10,407	1,005	2,215	1,430	2,621	12,436
1926	10,556	1,084	2,338	1,329	2,924	12,583
1927	10,861	1,304	2,395	1,710	3,322	12,948
1928	11,177	1,595	2,368	1,824	3,188	13,776
1929	11,102	1,531	2,505	2,012	3,315	13,835
1930	11,152	1,475	2,430	2,017	3,098	13,976
1931	11,425	1,841	2,197	2,091	3,487	14,067
1932	11,232	1,981	2,302	2,488	3,393	14,610
1933	11,999	2,173	2,565	2,606	3,517	16,026
1934	12,757	2,061	2,955	3,483	3,746	17,510
1935	12,747	2,108	3,355	4,096	3,869	18,437
1936	13,082	2,135	3,559	4,197	4,134	18,839
1937	13,748	2,454	4,326	4,988	4,807	20,709
1938	13,915	2,544	5,386	4,614	4,957	21,502
1939	13,332	2,541	6,906	4,020	4,627	22,272
1940	13,341	3,524	7,071	4,005	4,992	22,949

Sources and remarks: Prewar: IR, pp. 155-56, with some adjustments as in BSTS, Postwar: 1941-52, NIS (1962), pp. 160-61; 1952-65, current price series from BSTS; deflators from NIS (1967), pp. 82-83; 1963-70, NIS (1972), pp. 58-59. Figures for 1945 are not available; figures for 1946-51 are for fiscal year.

Sumber: Kazushi Dhkawa & Henry Rosovsky, *Ibid.*

BASIC STATISTICAL TABLE 6 (continued)
Gross National Expenditure: Constant Prices
(1941-52 at 1934-36 prices; 1952-65 at 1960 prices; 1965-70 at 1965 prices;
1941-52, million yen; 1952-70, billion yen)

Year	Private consumption expenditure	General gov. consumption expenditure	Gross domestic fixed capital formation	Increase in stocks	Exports of goods & services & factor income received from abroad	Less: Imports of goods & services & factor income paid abroad	Gross national expenditure at market prices
1941	9,410	6,134	4,607	1,316	4,433	4,992	20,908
1942	8,956	6,460	3,901	2,071	3,246	3,814	20,820
1943	8,469	7,445	4,771	820	2,910	3,330	21,085
1944	7,006	7,301	4,723	1,218	2,310	2,445	20,113
1945							
1946	6,826	1,123	2,545	812	102	534	10,874
1947	7,410	828	2,965	1,273	247	757	11,966
1948	8,391	1,360	2,973	1,734	352	889	13,921
1949	9,297	1,619	2,756	1,230	753	1,186	14,469
1950	10,077	1,838	2,741	1,277	1,614	1,307	16,240
1951	11,040	2,022	2,929	2,009	2,187	1,757	13,430
1952	12,927	2,395	3,581	1,365	2,354	2,262	20,360
1952a	4,635	1,075	1,612	401	782	542	7,963
1953	5,241	1,105	1,857	137	783	729	8,394
1954	5,497	1,110	1,994	141	838	767	8,813
1955	5,945	1,119	2,021	426	958	769	9,700
1956	6,437	1,107	2,494	485	1,123	1,008	10,638
1957	6,850	1,118	2,978	718	1,287	1,288	11,663
1958	7,374	1,206	3,079	259	1,365	1,070	12,213
1959	7,969	1,277	3,537	416	1,531	1,339	13,391
1960	8,823	1,256	4,696	554	1,778	1,703	15,504
1961	9,661	1,433	6,050	1,372	1,915	2,183	18,248
1962	10,611	1,576	6,564	460	2,264	2,188	19,287
1963	11,738	1,637	7,088	861	2,442	2,603	21,163
1964	13,123	1,804	8,270	1,047	2,976	2,960	24,260
1965	13,856	1,067	8,333	737	3,681	3,169	25,305
1965a	18,112	2,943	9,765	705	3,563	3,197	31,891
1966	19,599	3,103	10,919	949	4,114	3,582	35,102
1967	21,598	3,272	12,894	2,090	4,374	4,382	39,846
1968	23,748	3,499	15,750	2,180	5,356	4,946	45,587
1969	25,973	3,721	18,432	2,110	6,429	5,656	51,009
1970	27,942	3,981	20,965	2,841	7,463	6,830	56,362

Sources and remarks: Prewar: IR, pp. 155-56, with some adjustments as in BSTS, Postwar: 1941-52, NIS (1962), pp. 160-61; 1952-65, current price series from BSTS; deflators from NIS (1967), pp. 82-83; 1963-70, NIS (1972), pp. 58-59. Figures for 1945 are not available; figures for 1946-51 are for fiscal year.

Sumber: Kazushi Dhkawa & Henry Rosovsky, *Ibid.*

BASIC STATISTICAL TABLE 12

Foreign Trade

(Constant prices: 1905-52 in millions of 1934-36 yen; 1953-65 in billions of 1960 yen; 1965-70 in billion of 1965 yen)

Year	Imports	Exports	Year	Imports	Exports	Year	Imports	Exports
1905	1,135	1,336	1951	1,745	2,178	1956	785	1,067
1906	797	435	1952	2,209	2,333	1957	1,229	
1907	856	439	1953	534	727	1958	1,027	1,314
1908	822	428	1954	708	719	1959	1,285	1,483
1909	793	474	1955	631	901	1960	1,705	1,718
1910	835	561				1961	1,782	1,848
1911	999	583				1962	2,108	2,189
1912	1,057	675				1963	2,457	2,359
1913	1,227	755				1964	2,779	2,886
1914	1,012	741				1965	2,961	3,566
1915	1,099	982				1965a	2,987	3,452
1916	1,135	1,242				1966	3,358	3,986
1917	1,257	1,469				1967	4,127	4,227
1918	1,486	1,597				1968	4,628	5,187
1919	1,770	1,271				1969	5,263	6,193
1920	1,728	1,095				1970	6,384	7,166
1921	1,628	969						
1922	2,373	1,039						
1923	2,421	888						
1924	1,715	1,158						
1925	2,539	1,386						
1926	2,827	1,481						
1927	3,212	1,650						
1928	3,078	1,771						
1929	3,188	1,947						
1930	2,948	1,939						

Sources and remarks: Previous: Total exports and imports of NST 11, de-rated by export and import price indexes of NST 14. Postwar: 1941-52, NIS (1962); price deflators from p. 168; figures for 1945 are not available; figures for 1946-51 are for fiscal year; 1952-70, price deflator for 1953-65 from NIS (1967), pp. 82-83; for 1963-70, NIS (1972), pp. 62-63.

BASIC STATISTICAL TABLE 13
Commodity Composition: Exports and Imports
(Current prices, million yen)

Year	Exports						Imports						Total	
	Food-stuffs	Raw materials	Mineral fuels	Chemicals	Semi-finished materials	Investment goods	Consumption goods	Food-stuffs	Raw materials	Mineral fuels	Chemicals	Semi-finished materials		Investment goods
1905	43	93	14	2	108	3	55	318						
1906	51	138	16	2	132	4	76	419						
1907	45	151	19	2	129	8	75	429						
1908	43	139	18	1	105	7	62	375						
1909	49	159	17	2	116	3	65	411						
1910	51	172	16	2	140	3	71	455						
1911	56	166	19	3	156	4	80	484						
1912	63	207	21	3	182	7	89	572						
1913	69	248	25	5	221	8	95	671						
1914	69	212	25	5	223	7	85	626						
1915	81	213	21	12	290	11	116	744						
1916	108	353	25	27	418	38	204	1,173						
1917	176	466	32	30	624	121	216	1,665						
1918	219	485	40	30	838	123	314	2,049						
1919	164	732	48	18	888	41	356	2,247						
1920	158	466	51	21	883	49	358	2,006						
1921	78	465	39	13	472	25	147	1,239						
1922	97	735	24	9	535	26	178	1,604						
1923	89	619	22	9	484	17	172	1,412						
1924	111	765	23	10	652	18	184	1,763						
1925	136	984	34	19	809	26	214	2,222						
1926	144	819	32	16	742	23	200	1,976						
1927	135	824	26	16	685	24	204	1,914						
1928	158	806	25	19	644	27	233	1,912						
1929	163	860	24	20	740	37	261	2,105						
1930	139	471	23	16	548	38	200	1,435						
1931	106	391	16	14	407	28	158	1,120						
1932	108	425	16	15	530	27	242	1,363						
1933	162	452	17	22	725	52	398	1,828						
1934	173	398	14	22	1,022	98	398	2,125						
1935	199	529	14	28	1,128	104	460	2,462						
1936	203	572	16	37	1,177	123	504	2,632						
1937	248	632	15	41	1,393	172	620	3,121						

(continued)

Sumber: Kazushi Uekawa & Henry Kosovsky, *Ibid.*

BASIC STATISTICAL TABLE 15 (continued)
Population: Total and Gainfully Occupied (Labor Force Employed) by Industry
(Thousands)

Year	Agriculture (including forestry & fishing)		Mining & manufacturing	Facilities industry	Construction	Services	Total gainfully occupied	Private nonagri culture
	Total population	Total population						
1905	46,746	16,205	3,094	625	538	4,542	25,004	7,774
1906	47,132	16,117	3,154	642	557	4,637	25,107	7,841
1907	47,654	16,126	3,180	732	547	4,671	25,256	8,018
1908	48,224	16,069	3,248	713	613	4,721	25,364	8,174
1909	48,850	15,926	3,384	691	613	4,805	25,419	8,369
1910	49,489	15,943	3,353	705	614	4,907	25,522	8,413
1911	50,179	16,051	3,373	687	637	4,923	25,671	8,435
1912	50,925	16,060	3,417	709	669	4,991	25,846	8,596
1913	51,671	16,094	3,534	661	682	5,072	26,043	8,761
1914	52,399	16,068	3,531	706	666	5,226	26,197	8,917
1915	53,110	15,520	3,897	746	701	5,532	26,396	9,560
1916	53,768	15,489	3,837	799	673	5,839	26,637	9,343
1917	54,365	15,539	4,285	785	698	5,561	26,868	9,989
1918	54,711	14,784	4,684	923	698	5,843	26,932	10,554
1919	55,032	14,834	4,764	972	690	5,766	27,026	10,577
1920	55,885	14,663	4,966	1,043	701	5,838	27,211	10,906
1921	55,963	14,731	4,746	1,020	707	6,201	27,405	10,984
1922	56,666	14,772	4,899	1,023	730	6,209	27,633	11,150
1923	57,389	14,110	5,399	1,089	745	6,530	27,873	12,013
1924	58,119	14,452	5,226	1,102	767	6,352	27,899	11,742
1925	58,876	14,394	5,330	1,118	790	6,471	28,103	11,979
1926	59,736	14,349	5,412	1,099	825	6,747	28,432	12,312
1927	60,741	14,276	5,725	1,091	802	6,590	28,484	12,432
1928	61,659	14,363	5,719	1,121	839	6,783	28,825	12,654
1929	62,595	14,573	5,795	1,135	853	6,815	29,171	12,780
1930	64,450	14,689	5,872	1,162	846	7,050	29,619	13,101
1931	65,457	14,865	5,785	1,156	836	7,295	29,937	13,169
1932	66,433	15,014	5,659	1,107	834	7,610	30,224	13,081
1933	67,431	14,891	5,835	1,060	860	7,896	30,542	13,296
1934	68,309	14,752	6,137	1,091	818	8,030	30,828	13,629
1935	69,254	14,571	6,461	1,121	833	8,228	31,214	14,176
1936	70,133	14,609	6,708	1,137	846	8,308	31,608	14,472
1937	70,630	14,538	6,887	1,189	863	8,228	31,705	14,529
1938	71,012	14,466	7,111	1,239	885	8,154	31,855	14,874
1939	71,379	14,395	7,401	1,308	918	8,175	32,197	15,263
1940	71,933	14,323	7,686	1,371	948	8,170	32,498	15,566

Sources and remarks: Total population prior to 1941 based on unpublished materials of M. Umemura and K. Akasaka, forthcoming in LTES, vol. 2. Total population postwar: 1941-68, Statistics Bureau of the Prime Minister's Office, *Whon no mukedinka / Jinkoku no shiyo* (Population Estimates of Japan, Population Estimates Series, 1965), no. 36, p. 46; 1969-70, *ibid.*, *Jinkoku no shiyo* (Monthly Report on Current Population Estimates, Jan. 1972), pp. 43-39; with unpublished revisions by R. Afinski. Gainfully occupied population postwar: agriculture, 1941-53, from interpolated census data, except for 1946, which is from Y. Yamada, *Whon Kokumin shiyo no shiyo* (A Comprehensive Survey of National Income Data in Japan, Tokyo, 1957), p. 153. Other industries 1941-44, our estimation based on data provided in Japan, Economic Planning Agency, *Whon Kozai to Kokumin shiyo*; 1944-52, interpolated census data; 1953-70, for all industries interpolated census data using the Labor Force Survey as an index. Employment in the private sector from W.S. section L. Figures for 1946-51 are for the total year. There is a conceptual difference between the present concept of "gainfully occupied persons" and the postwar definition of "labor force." For an explanation, see Chapter 5.

Sumber: Kazushi uhkawa & Henry Rosov - sky, *ibid.*

Lampiran XI

Year	Traffic											(Mil. persons, 1,000)
	Passenger Carried						Cargo tonnage carried					
	Railways		Buses	Passenger cars	Domestic aircraft	International aircraft	Railways		Motor vehicles	Domestic vessels	Domestic aircraft	
National	Private	National					Private					
1973	6,871	10,185	11,390	15,922	23,538	2,661	175,681	53,161	4,911,957	321,856	178,320	94,549
1974	7,113	10,476	11,206	16,105	25,274	2,379	157,659	48,114	4,377,374	410,415	160,787	86,211
1975	7,048	10,540	10,731	17,681	25,466	2,683	141,691	42,737	4,392,859	377,342	166,306	117,727
1976	7,180	10,402	10,231	18,679	28,243	3,357	140,914	45,110	4,355,945	401,492	180,373	132,794
1977	7,068	10,699	10,189	19,416	32,897	3,826	132,036	43,129	4,456,443	412,554	205,408	144,281
1978	6,997	10,763	9,964	21,446	37,130	4,518	133,243	45,416	4,860,424	440,780	244,512	167,335
1979	6,931	10,907	9,967	23,405	41,360	4,903	136,393	47,454	5,258,277	455,886	288,594	200,090
1973	208,097	104,831	111,713	225,732	16,035	12,605	57,405	932	140,979	138,727	133,670	680,852
1974	215,564	108,460	115,776	228,400	17,639	12,892	51,575	869	138,770	180,714	124,045	653,323
1975	215,389	108,511	110,063	250,804	21,591	14,086	46,577	770	129,701	172,705	135,278	841,909
1976	218,740	108,826	98,714	264,499	20,187	16,155	45,526	779	132,619	184,481	146,505	932,399
1977	199,653	112,644	104,639	263,961	23,637	17,931	40,587	755	143,095	190,863	168,115	999,622
1978	195,844	115,285	107,009	296,043	26,923	20,926	40,413	791	156,065	200,401	208,383	1,125,048
1979	194,690	117,770	108,317	319,869	30,245	23,318	42,384	802	172,888	213,722	255,492	1,337,583

Source: MT (Ministry of Transport), Japanese National Railways.

Year	External Trade by Regions											(100 mil. yen)
	Total	Developed area	U.S.A. & Canada	Western Europe	Australia, New Zealand & S. Africa	Developing area	Latin America	S.E. Asia	Middle & Near East	Africa	Communist bloc	
Exports												
1974	162,079	77,093	41,983	25,075	10,036	73,493	14,806	36,989	10,769	10,325	11,491	
1975	165,453	69,578	36,538	24,122	8,918	81,979	14,130	37,225	18,017	12,123	13,887	
1976	199,346	93,767	51,141	32,448	10,178	91,671	14,849	41,661	21,568	12,993	13,908	
1977	216,481	102,243	57,518	35,196	9,530	100,978	16,936	45,970	23,849	13,539	13,257	
1978	205,558	96,780	56,544	31,147	8,589	95,368	13,979	48,549	22,721	9,476	13,910	
1979	225,315	106,553	61,522	35,884	9,146	102,699	14,356	57,094	23,617	6,920	16,064	
1980	293,825	138,476	78,679	48,602	13,195	134,711	20,087	70,065	32,651	10,989	20,638	
Imports												
1974	180,764	75,051	44,703	15,210	15,137	96,522	7,904	36,325	46,346	4,607	9,153	
1975	171,700	70,881	41,831	13,040	16,009	91,893	7,481	31,417	48,913	3,297	8,921	
1976	192,292	77,310	43,115	14,710	19,486	106,520	7,302	39,782	55,649	2,899	8,443	
1977	191,318	74,458	41,374	15,028	18,056	107,898	8,287	40,705	55,379	2,565	8,956	
1978	167,276	69,531	37,817	16,986	14,729	89,616	6,361	36,370	44,157	2,065	8,126	
1979	242,454	93,937	53,535	22,026	18,375	136,698	9,867	57,398	64,760	3,541	11,814	
1980	319,953	111,709	66,321	23,692	21,697	193,105	12,929	72,415	101,443	4,856	15,126	

Source: MF (Ministry of Finance)

Year	External Trade by Countries of Destination or Origin										(mil. yen)
	Korea, Rep. of		China		Taiwan		Hong Kong		Thailand		
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	
1974	773,768	455,627	580,522	380,573	583,853	277,389	395,575	79,776	277,040	199,452	
1975	667,141	388,668	669,806	454,912	541,269	240,976	409,312	72,972	284,361	214,781	
1976	837,698	568,040	496,599	406,549	676,514	353,094	545,916	101,372	317,234	251,688	
1977	1,091,532	570,318	521,068	415,710	686,201	347,479	623,356	93,555	365,815	202,136	
1978	1,266,226	540,497	633,035	425,240	750,440	364,990	645,851	102,993	322,206	176,963	
1979	1,359,726	731,651	803,877	647,743	953,130	539,428	805,808	144,778	373,706	255,007	
1980	1,225,051	681,218	1,140,787	977,794	1,168,601	522,144	1,076,970	129,033	434,872	256,574	

Year	Singapore		Malaysia		Philippines		Indonesia		India		(mil. yen)
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	
1974	405,162	179,758	205,423	284,213	265,699	320,997	423,414	1,328,661	173,447	191,530	
1975	451,709	118,711	168,020	205,381	304,889	331,402	548,478	1,017,772	139,794	195,145	
1976	454,389	191,653	208,553	403,258	330,456	235,102	485,877	1,214,123	111,604	238,287	
1977	459,772	184,728	231,669	420,332	296,287	241,782	482,324	1,350,255	134,804	217,353	
1978	488,936	182,445	242,860	397,228	324,087	223,673	443,050	1,110,683	153,906	169,015	
1979	587,771	325,550	330,735	714,680	353,141	345,187	467,345	1,936,730	169,617	228,581	
1980	884,951	344,962	465,126	791,952	382,276	445,429	780,380	3,004,361	207,090	232,490	

Source: MI

Source: The Japan Institute of International Affairs, White Papers Of Japan 1979-80. Annual abstract of official reports and statistics of the Japanese Government.

External Trade by Countries of Destination or Origin (Cont'd)

Year	(mil. yen)											
	Pakistan		Iran		Iraq		Saudi Arabia		Kuwait		Norway	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	66,137	21,675	296,895	1,390,290	139,219	58,671	198,124	1,525,483	81,520	618,783	137,121	25,423
1975	85,995	26,270	549,724	1,476,080	242,645	117,727	400,621	1,821,697	109,055	596,878	155,535	22,523
1976	88,048	31,408	506,057	1,320,494	185,725	171,484	559,685	2,323,005	213,052	598,208	214,795	31,445
1977	97,339	25,549	514,905	1,149,600	232,032	200,155	627,133	2,296,612	253,634	669,948	237,157	25,781
1978	67,518	32,670	574,220	903,639	199,442	165,424	687,935	1,798,136	163,030	528,462	112,266	21,167
1979	120,052	44,829	208,649	964,722	355,454	399,548	840,756	2,660,812	194,463	949,730	84,871	43,811
1980	139,801	48,378	357,767	986,138	496,165	988,059	1,099,747	4,427,935	267,792	788,336	112,285	42,397

Year	(mil. yen)											
	Sweden		Denmark		United Kingdom		Netherlands		Belgium		France	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	98,602	72,686	60,620	31,494	446,256	255,053	308,095	64,522	141,232	66,949	214,671	172,357
1975	113,958	59,025	63,991	43,414	436,662	240,262	215,413	63,612	151,056	47,782	207,471	148,459
1976	169,151	67,146	70,276	42,914	415,152	250,285	321,606	74,481	207,817	52,490	286,115	159,638
1977	164,479	59,305	85,602	44,996	524,351	257,988	351,382	80,335	219,287	50,684	269,924	151,031
1978	126,039	74,372	156,162	118,569	490,560	290,158	336,246	67,403	203,029	66,057	232,046	157,758
1979	143,846	89,859	60,151	73,799	674,460	366,102	362,655	90,842	237,598	81,022	305,265	235,034
1980	178,352	105,440	95,937	72,179	857,892	440,019	465,527	86,155	321,131	85,232	456,771	293,795

Year	(mil. yen)											
	Germany, F.R.		Switzerland		Spain		Italy		U.S.S.R.		Yugoslavia	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	436,792	422,798	108,834	131,901	69,740	36,975	121,586	134,100	321,514	413,056	32,957	18,240
1975	492,318	337,577	103,040	123,921	90,016	34,188	98,959	108,439	482,284	346,761	31,856	5,651
1976	664,237	364,465	140,325	178,526	111,753	47,896	153,572	113,575	667,522	346,287	28,408	4,425
1977	747,534	403,846	146,352	174,753	79,514	42,190	120,326	125,579	626,135	384,909	38,886	6,443
1978	764,236	421,375	139,281	207,714	49,373	52,901	102,952	136,669	525,613	304,712	23,651	5,013
1979	933,001	563,569	163,918	225,374	62,978	82,776	149,581	216,722	535,286	419,129	25,232	6,219
1980	1,300,631	570,103	261,808	242,504	92,847	88,825	217,254	214,064	628,748	423,635	27,497	9,512

Year	(mil. yen)											
	Greece		U.S.A.		Canada		Mexico		Panama		Cuba	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	144,212	10,957	3,734,664	3,694,326	463,625	775,999	89,608	90,025	297,136	2,420	59,231	128,691
1975	99,748	11,710	3,312,128	3,441,494	341,670	741,644	103,039	62,970	330,418	10,434	130,089	101,042
1976	220,595	8,388	4,653,825	3,505,232	460,253	806,237	114,362	73,675	386,010	10,705	59,525	14,899
1977	298,394	10,592	5,292,208	3,357,384	459,612	780,021	120,573	80,658	361,565	7,893	97,423	17,069
1978	197,328	7,201	5,258,977	3,108,671	395,427	672,998	134,683	74,554	300,058	17,546	43,832	22,136
1979	164,367	16,228	3,772,773	4,434,676	379,476	896,461	184,559	106,175	196,353	37,331	30,087	26,092
1980	123,465	8,307	7,118,068	5,558,112	549,837	1,073,980	275,293	210,122	316,895	13,956	54,347	43,432

Year	(mil. yen)											
	Venezuela		Peru		Chile		Brazil		Argentina		Egypt	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	116,607	13,550	57,857	86,462	17,585	117,258	405,433	192,650	129,223	67,105	21,823	49,006
1975	106,619	110,078	56,995	61,068	28,220	76,691	274,652	262,209	107,851	63,397	63,325	3,733
1976	166,459	9,941	42,652	68,762	22,925	88,392	261,665	242,527	68,756	74,566	97,676	20,108
1977	246,204	13,144	32,476	32,285	58,185	88,266	225,995	255,491	80,426	112,283	103,632	21,518
1978	161,788	10,349	19,854	62,212	47,717	77,455	269,415	165,230	42,498	93,785	86,240	17,187
1979	171,363	31,556	31,180	112,133	54,108	120,671	245,768	271,113	110,173	116,603	86,327	20,437
1980	189,344	154,829	68,169	108,778	103,450	147,428	252,654	353,273	222,921	86,432	145,380	32,274

Year	(mil. yen)											
	Liberia		Nigeria		Zambia		South Africa		Australia		New Zealand	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
1974	683,121	10,513	83,482	130,879	31,768	93,314	279,980	223,767	582,394	1,173,161	141,198	116,811
1975	766,615	4,857	173,655	82,810	15,502	41,915	258,454	257,283	516,473	1,234,491	116,913	109,151
1976	831,490	19,734	169,872	32,675	5,875	19,887	210,239	221,372	684,281	1,590,460	123,296	134,725
1977	673,321	3,354	270,287	5,537	9,912	50,532	203,103	241,517	628,990	1,426,975	120,863	132,074
1978	354,723	38,675	203,900	1,559	5,560	34,408	206,654	219,322	564,944	1,119,310	87,307	134,221
1979	203,474	90,599	178,935	9,295	9,844	64,240	217,489	283,707	569,389	1,378,449	127,711	175,329
1980	317,695	76,579	335,862	25,948	12,421	68,495	405,004	396,029	761,727	1,585,183	152,743	188,450